



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

OPTIMALISASI TINDAKLANJUT LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI MELALUI CLOUD SHARING

Disusun Oleh:

Nama : Semiyati, S.E.

NIP : 196611281988032002

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

**PROGRAM DIKLAT KEPEMIMPINAN
TINGKAT IV ANGKATAN II
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2019**



LEMBAR PENGESAHAN PROYEK PERUBAHAN

OPTIMALISASI TINDAKLANJUT LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI MELALUI CLOUD SHARING

Disusun Oleh:

Nama : Semiyati, S.E.

NIP : 196611281988032002

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Peserta Diklat,




(Semiyati, S.E.)

Menyetujui
Mentor,



(Drs. Urip Soedjarwono)

Menyetujui
Coach,



(Agus Supriyono, S.S., M.A.P.)



LEMBAR PERSETUJUAN PROYEK PERUBAHAN

OPTIMALISASI TINDAKLANJUT LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI MELALUI CLOUD SHARING

Disusun Oleh:

Nama : Semiyati, S.E.

NIP : 196611281988032002

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

**Disetujui untuk dipresentasikan pada Seminar Proyek Perubahan
pada tanggal 25 Juli 2019**

Peserta Diklat,


(Semiyati, S.E.)

**Menyetujui
Mentor,**


(Drs. Urip Soedjarwono)

**Menyetujui
Coach,**


(Agus Supriyono, S.S., M.A.P.)



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

SURAT PERNYATAAN

1. Peserta diklat

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Semiyati, SE
Jabatan : Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi XI
Unit Kerja : Bagian Sekretariat Komisi XI
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Adalah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019

2. Pejabat yang Berwenang

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Dimiyati Sudja S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Persidangan I
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

3. Proyek perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil diklat. Proyek perubahan ini akan diimplementasikan di instansi kami dalam milestone jangka menengah yaitu pada Agustus 2019- Agustus 2020 dan jangka panjang pada Agustus 2020 – 2022.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala konsekuensinya.

Jakarta, Juli 2019

Mengetahui

M. Dimiyati Sudja, S.Sos, M.Si
NIP. 195909101980031005

Semiyati, SE.
NIP. 196611281988032002

DAFTAR ISI

Judul Laporan Proyek Perubahan	
Lembar Pengesahan Proyek Perubahan	
Lembar Persetujuan Proyek Perubahan	
Surat Pernyataan	
Daftar Isi	
Daftar Gambar	

Bab I Pendahuluan	1
1. Latar belakang Proyek Perubahan	1
2. Tujuan dan manfaat	7
3. Ruang lingkup perubahan.....	9
4. Deskripsi Proyek Perubahan (Inovasi)	9
 Bab II Deskripsi Proyek Perubahan	10
1. Kegiatan Proyek Perubahan	10
2. Identifikasi <i>Stakeholder</i> , Tim Efektif dan Tata Kelola Proyek Perubahan	14
 Bab III Implementasi Proyek Perubahan	19
1. Capaian Proyek Perubahan.....	19
2. Analisa Pergeseran <i>Stakeholder</i>	28
3. Kendala	29
4. Strategi Mengatasi Kendala	29
5. Faktor Kunci Keberhasilan	29
 Bab IV Penutup	30
1. Kesimpulan.....	30
2. Rekomendasi.....	30

Lampiran-lampiran

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Rapat awal Tim Efektif 16 Mei 2019.....	22
Gambar 2 Konsultasi Mentor.....	22
Gambar 2a Kegiatan Scanning Laporan Kunjungan Kerja.....	23
Gambar 2a Kondisi Penyimpanan Laporan Kunjungan Kerja 2019.....	24
Gambar 3 Kegiatan Analisa terhadap Laporan Kunjungan Kerja.....	25
Gambar 4 Screenshot penyampaian hasil laporan kunjungan kerja.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG PROYEK PERUBAHAN

Perubahan yang dinamis dalam sistem politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 68 ayat (1) memiliki 3 fungsi, yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Selain itu DPR RI juga menjalankan fungsi representasi dan diplomasi. Yang dimaksud dengan Fungsi legislasi yaitu menyampaikan usulan draft RUU maupun pembahasan RUU menjadi Undang-Undang Bersama pemerintah. Fungsi Anggaran yaitu melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dengan pemerintah maupun perubahannya. Sedangkan yang dimaksud dengan Fungsi Pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang maupun dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, DPR RI dibagi menjadi beberapa Alat Kelengkapan Dewan yaitu:

- a. Pimpinan DPR
- b. Komisi (I s.d. XI)
- c. Badan Anggaran
- d. Badan Kerjasama Antar Parlemen
- e. Badan Legislasi
- f. Badan Musyawarah
- g. Badan Urusan Rumah Tangga
- h. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

- i. Mahkamah Kehormatan Dewan
- j. Panitia Khusus

Komisi-Komisi yang ada di DPR RI merupakan kepanjangan tangan dari DPR RI dalam melakukan ketiga fungsi tersebut. Saat ini Komisi di DPR RI ada 11, yaitu Komisi I s.d. Komisi XI. Setiap Komisi memiliki bidang kerja yang berbeda-beda dan pasangan kerja yang berbeda.

Komisi XI merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan yang berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, memiliki ruang lingkup bidang tugas meliputi keuangan dan perbankan.

Komisi XI memiliki mitra kerja yaitu

1. Kementerian Keuangan,
2. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS)
3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
4. Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
5. Bank Indonesia (BI),
6. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB),
7. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP),
9. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
10. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPR dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Terkait dengan unit pendukung dimaksud, dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, serta menyesuaikan dengan perkembangan organisasi maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, diamanahkan untuk membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI untuk mengatur mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi dan unit pelaksana teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Untuk itu, ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018.

Visi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu terwujudnya Setjen dan BK DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI”

Pejelasan:

- a. **Profesional**, maksudnya mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.
- b. **Andal**, maksudnya mampu melakukan koordinasi, intergritas dan dicapai serta dapat diimplementasikan,
- c. **Transparan**, maksudnya kesediaan untuk senantiasa memberikan informasi factual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan organisasi, serta tugas dan fungsinya DPR RI.
- d. **Akuntabel**, maksudnya mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPR RI.

Visi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI selanjutnya diturunkan dalam Misi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, yaitu :

- a. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional andal, transparan, dan akuntabel.
- b. Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

Sekjen dan BK DPR RI membawahi Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi dan Inspektorat Utama. Didalam Persekjen Nomor 6 Tahun 2015 disebutkan bahwa **Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.**

Untuk melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Persidangan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi dilingkungan Deputi Bidang Persidangan.
- b. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan DPR RI

Deputi Persidangan terdiri dari :

- a. Biro Persidangan I
- b. Biro Persidangan II
- c. Biro KSAP
- d. Biro Kesekretariatan Pimpinan dan
- e. Biro Pemberitaan Parlemen

Adapun **tugas dari Biro Persidangan I yakni menyelenggarakan dukungan komisi dan persidangan paripurna.** Biro Persidangan I terdiri 11 (sebelas) Sekretariat komisi I sampai dengan XI dan bagian persidangan paripurna. Salah satu sekretariat dimaksud yakni sekretariat Komisi XI yang bertugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Komisi XI.

Adapun fungsi dari Bagian Sekretariat Komisi XI yakni :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dana anggaran Bagian Sekretariat Komisi XI;
- b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
- c. Pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat Komisi XI;

- e. Pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi XI;
- f. Pelaksanaan kegiatan lain ditugaskan oleh Kepala Biro Peridangan I;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepada Kepala Biro Persidangan I

Sehubungan dengan fungsi tersebut, Bagian Sekretariat Komisi XI terdiri atas:

- a. Subbagian rapat dan
- b. Subbagian Tata Usaha

Adapun yang menjadi tugas Sub bagian rapat yakni mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi XI

a. Kondisi saat ini :

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPR RI melakukan tugasnya baik di dalam gedung pada saat masa sidang maupun di luar gedung pada saat masa reses. Namun apabila ada hal-hal isu krusial yang sekiranya mendesak dan bersifat penting, maka DPR RI dapat melakukan kunjungan kerja spesifik ke daerah pada saat masa sidang berlangsung. Kunjungan kerja Komisi tidak hanya dilakukan ke Dalam Negeri tetapi juga ke Luar Negeri. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang ada di daerah serta dalam rangka pengawasan kinerja Pemerintah. Output dari kegiatan pelaksanaan kunjungan kerja adalah laporan kunjungan kerja.

Selama ini laporan kunjungan kerja yang ada di Komisi XI DPR RI belum ditindaklanjuti saat rapat komisi berlangsung, hal ini dikarenakan :

1. Hasil kunjungan kerja yang telah dilakukan oleh pimpinan dan anggota komisi XI berupa laporan kunjungan kerja belum diidentifikasi sesuai fungsi DPR RI yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.

2. Belum dimasukkannya hasil laporan kunker ke dalam bahan rapat pembahasan rapat-rapat di Komisi XI DPR R
3. Belum disampaikannya Laporan Kunjungan Kerja tersebut kepada pemerintah melalui rapat Komisi XI DPR RI.
4. Belum tersedianya Laporan Kunjungan Kerja yang di kompilasi secara menyeluruh dalam satu lokasi

b. Kondisi yang diharapkan :

Laporan Kunjungan Kerja yang menjadi output dari setiap kegiatan pelaksanaan kunjungan DPR RI seharusnya dapat ditindaklanjuti sehingga dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ditemukan ketika kunjungan kerja dilakukan. Untuk itu, dapat dijelaskan kondisi yang diharapkan sebagai berikut :

1. Laporan Kunker diharapkan dapat teridentifikasi sesuai dengan fungsi DPR RI yakni legislasi, anggaran dan pengawasan,
2. Laporan Kunjungan yang telah teridentifikasi dapat menjadi bagian bahan rapat dalam setiap pelaksanaan rapat di DPR RI sesuai dengan fungsi DPR RI, sehingga dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan dalam rapat.
3. Hasil Identifikasi Laporan Kunjungan kerja dapat disampaikan kepada Mitra Kerja Komisi XI DPR RI.
4. Tersedianya Laporan kunker yang terkompilasi dalam satu lokasi, untuk memudahkan penyediaan bahan rapat pada saat rapat-rapat di DPR RI.

c. Akibat/Dampak :

Adapun yang menjadi akibat/dampak jika kondisi saat ini tidak diselesaikan, maka dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Laporan yang tidak teridentifikasi sesuai fungsi DPR RI, akan menyulitkan sekretariat dalam penyediaan dukungan bahan rapat bagi Komisi XI DPR R, mengingat rapat Komisi XI dilakukan berdasarkan fungsi DPR RI yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.

2. Permasalahan yang ditemukan di daerah kunjungan kerja tidak dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh dikarenakan tidak lengkapnya laporan kunjungan kerja yang dikompilasi oleh sekretariat, sehingga tidak adanya kesinambungan dalam hal tindak lanjut berbagai permasalahan yang ditemukan di daerah kunjungan kerja.
3. Mitra Kerja Komisi XI DPR RI tidak terinformasi secara keseluruhan atas permasalahan yang ditemukan di lokasi Kunjungan Kerja.
4. Laporan Kunjungan Kerja rentan hilang, sehingga Komisi XI tidak mempunyai *back up* data laporan kunjungan kerja tersebut.

d. solusi :

Berdasarkan kondisi yang telah disampaikan di atas, maka diperlukan solusi untuk mengatasi kondisi saat ini, adapun solusi dimaksud yakni :

1. Melakukan identifikasi laporan kunjungan kerja sesuai dengan fungsi DPR RI yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.
2. Mengkompilasi laporan kunjungan kerja, agar ketika pencarian lebih mudah dan lebih cepat ditindaklanjuti oleh Anggota Komisi XI DPR RI.
3. Menjadikan hasil identifikasi laporan kunjungan kerja menjadi bagian dari bahan rapat Komisi XI DPR RI.
4. Melakukan *back up* data laporan kerja Komisi XI DPR RI melalui Aplikasi *Cloud Share*.

Terkait dengan hal tersebut diatas, penulis mengajukan gagasan yaitu ; **“OPTIMALISASI TINDAKLANJUT LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI MELALUI CLOUD FILE SHARING”**

2. TUJUAN DAN MANFAAT

A. TUJUAN

1. **Tujuan Jangka Pendek**, yaitu :

Tersedianya laporan kunjungan kerja sebagai bahan rapat yang telah diidentifikasi sesuai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang siap ditindaklanjuti dalam rapat Komisi XI DPR RI melalui cloud file sharing.

2. **Tujuan Jangka Menengah**, yaitu :

Tersedianya Laporan Kunjungan Kerja yang telah ditindaklanjuti pada rapat Komisi XI DPR RI.

3. **Tujuan Jangka Panjang**, yaitu :

Pengembangan aplikasi *cloud file sharing* Komisi XI DPR RI sesuai perkembangan informasi teknologi terkini.

B. MANFAAT

Adapun manfaat yang ingin didapat dengan Proyek Perubahan

a. Manfaat bagi organisasi

1. Meningkatkan kinerja Bagian Sekretariat Komisi XI dengan lebih efektif dan efisien, khususnya penyediaan dukungan bahan rapat bagi Komisi XI DPR RI
2. Sebagai data pendukung dalam pembuatan laporan Komisi XI DPR RI
3. Sebagai data pendukung dalam membuat laporan kinerja DPR RI

b. Manfaat bagi peserta diklat :

1. Meningkatkan kinerja subbagian rapat terutama dalam mendukung kinerja dewan dalam kegiatan kunjungan kerja
2. Sebagai wujud aktualisasi ide dalam optimalisasi tindaklanjut laporan kunjungan kerja.

c. Manfaat bagi Stakeholder

1. Mempermudah pemantauan baik terhadap daerah-daerah yang belum dikunjungi maupun yang belum dikunjungi, sehingga mempermudah Komisi XI untuk menentukan langkah kunjungan kerja berikutnya.
2. Laporan kunjungan kerja menjadi bahan dukung rapat bagi Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI untuk selanjutnya menjadi masukan dalam rapat Komisi XI DPR RI.

3. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN

Ruang lingkup gagasan Proyek Perubahan ini di lingkungan Sekretariat Komisi XI DPR RI.

a. **Lokus :**

Lokus proyek perubahan adalah Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI pada Sub Bagian Rapat

b. **Fokus :**

proyek perubahan memiliki fokus dalam mengoptimalkan laporan kunjungan kerja dan tindaklanjutnya psds Komidi XI DPR RI dengan memanfaatkan aplikasi Cloud Share.

4. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN (INOVASI)

Laporan dari setiap kunjungan kerja menjadi sangat penting untuk menjadi sumber masukan dalam pengambilan kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu bagi Sekretariat Komisi XI untuk melakukan identifikasi laporan kerja sesuai dengan fungsi DPR RI yakni legislasi, anggaran dan pengawasan agar selanjutnya bisa menjadi dukungan bahan dalam rapat-rapat Komisi XI DPR RI. Diharapkan melalui dukungan bahan-bahan rapat Komisi XI DPR RI yang disediakan oleh Sekretariat Komisi XI DPR RI, permasalahan yang ditemukan di lokasi kunjungan kerja dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan.

Laporan yang telah terkompilasi secara menyeluruh akan disimpan dalam satu lokasi yakni Aplikasi *Cloud Share*. Melalui gagasan ini, diharapkan laporan kunjungan kerja agar lebih optimal untuk ditindaklanjuti dan menjadi bahan dukung dalam rapat Komisi XI DPR RI.

BAB II
DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

1. KEGIATAN PROYEK PERUBAHAN

a. Jangka Pendek : (Bulan Mei – Juli 2019)

NO	KEGIATAN	TAHAPAN	OUTPUT	WAKTU
1	Terbentuknya Tim Efektif	a. Persiapan pertemuan b. Membuat Undangan rapat c. Pendistribusian Undangan d. Rapat pembentukan Tim e. Pembuatan dan Penandatanganan Surat Tugas (ST) Tim	• Undangan • Daftar Hadir, Laporan Singkat • Surat Tugas Tim Efektif • Dokumentasi	Minggu Kedua Mei 2019
2	Identifikasi Laporan Kunjungan Kerja sesuai fungsi Dewan Masa Sidang IV TS 2018-2019	a. Pengumpulan laporan Kunjungan Kerja MS I-II TS 2018-2019 b. Identifikasi Laporan Kunjungan Kerja berdasarkan fungsi Anggaran, Pengawasan dan Legislasi	• Berkas Laporan Kunjungan Kerja • Klasifikasi Laporan Kunker	Minggu Ketiga-keempat Mei 2019
3.	Analisa Laporan Kunjungan Kerja berdasarkan fungsi Dewan yang belum	a. Analisa Laporan Kunjungan Kerja yang belum ditindaklanjuti	• Analisa laporan kunjungan kerja yang belum di tindaklanjuti	Minggu ketiga Juni 2019

	ditindaklanjuti	b. Penyampaian hasil Analisa kepada Pimpinan Komisi XI DPR RI, untuk dapat dijadikan bahan rapat Komisi XI DPR RI yang dapat ditindaklanjuti.		
4	Penggunaan Aplikasi <i>Cloud Share</i>	b. Membahas Panduan penggunaan aplikasi Cloud Share c. Pembuatan Folder sesuai Tupoksi DPR RI d. Sosialisasi Penggunaan aplikasi <i>Cloud Share</i> internal e. Input data rekapitulasi laporan kunjungan kerja yang belum ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan penggunaan aplikasi Cloud Share • Screenshot rekapitulasi melalui aplikasi cloud • Laporan Kunker 	Minggu ketiga dan keempat Juni 2019
5	Penyusunan Laporan	a. Penyusunan Laporan Proyek Perubahan b. Penyusunan hasil evaluasi laporan kunjungan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan proyek perubahan • Laporan evaluasi 	Minggu pertama dan kedua Juli 2019

b. Jangka Menengah : (6 bulan, Agustus 2019 - Januari 2020)

1	Identifikasi Laporan Kunjungan Kerja sesuai fungsi Dewan Masa Sidang V TS 2018-2019	<p>a. Pengumpulan laporan Kunjungan Kerja MS V TS 2018-2019</p> <p>b. Identifikasi Laporan Kunjungan Kerja berdasarkan fungsi Anggaran, Pengawasan dan Legislasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berkas Laporan Kunjungan Kerja • Klasifikasi Laporan Kunker 	<ul style="list-style-type: none"> • Agustus s/d September 2019
2	Analisa Laporan Kunjungan Kerja berdasarkan fungsi Dewan yang belum ditindaklanjuti	<p>a. Inventarisir daftar pertanyaan Kunjungan Kerja</p> <p>b. Inventarisir Jawaban Kunjungan Kerja</p> <p>c. Analisa Laporan Kunjungan Kerja yang belum ditindaklanjuti</p> <p>d. Penyampaian hasil Analisa kepada Pimpinan Komisi XI DPR RI, untuk dapat dijadikan bahan rapat Komisi XI DPR RI yang dapat ditindaklanjuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rekap substansi daftar pertanyaan dan jawaban pertanyaan • Analisa laporan kunjungan kerja yang belum ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Oktober s/d November 2019

3	Tersedianya laporan kunjungan kerja yang telah ditindaklanjuti melalui aplikasi <i>cloud</i> pada MS I-II TS 2018-2019	Rekapitulasi laporan kunjungan kerja yang telah ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi Laporan Kunjungan Kerja yang telah ditindaklanjuti 	Desember 2019
---	--	---	---	---------------

c. Jangka Panjang : (2020 - 2022)

1	Melakukan pemutakhiran aplikasi cloud file sharing Komisi XI DPR RI, pada MS I-V TS 2019-2020	Pengembangan cloud file sharing Komisi XI DPR RI dalam rangka penyempurnaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terkini	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan aplikasi <i>Cloud Share</i> Komisi XI 	2020-2022
2	Mengintegrasikan aplikasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan	Uji coba integrasi aplikasi dengan unit lain di lingkungan Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil koordinasi dengan unit lain dalam hal integrasi aplikasi 	

2. IDENTIFIKASI *STAKEHOLDER*, TIM EFEKTIF dan TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

A. IDENTIFIKASI *STAKEHOLDER* dan STRATEGI KOMUNIKASI

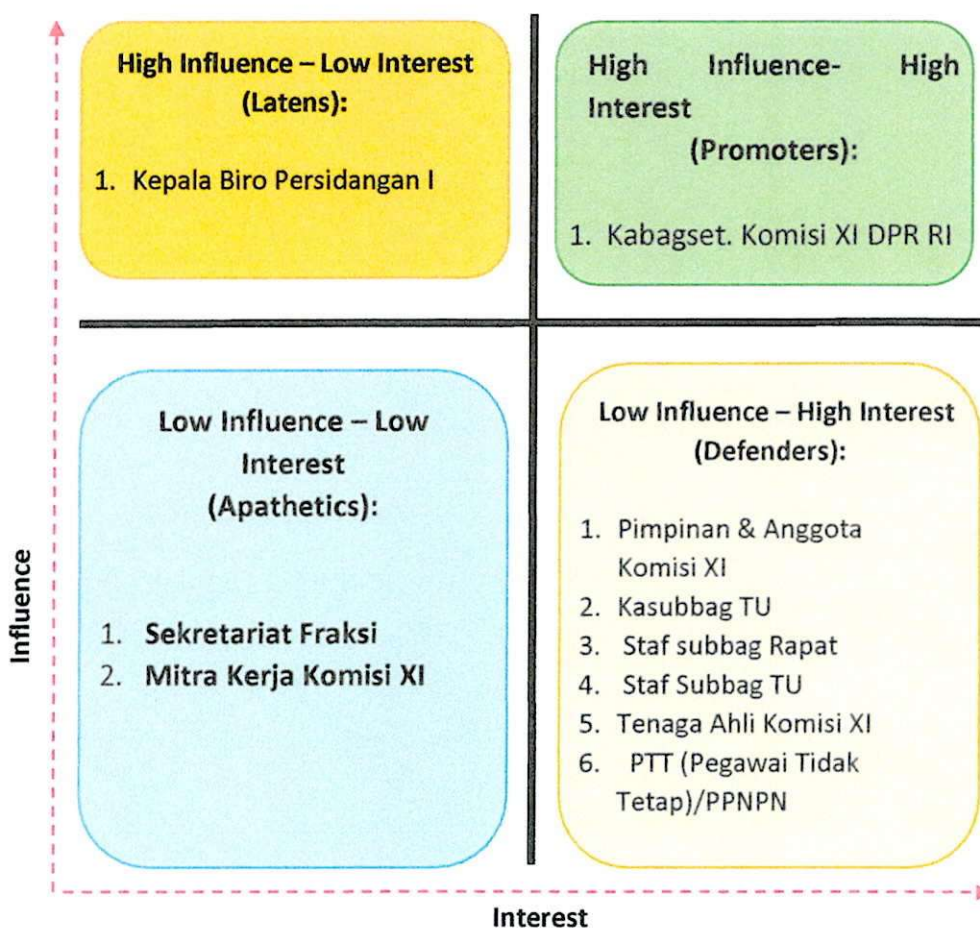
Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap inovasi / proyek perubahan yang sedang dilakukan. Stakeholders yang akan terlibat dalam proyek perubahan ini terdiri dari stakeholder internal di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, serta stakeholders eksternal. Tabel berikut menjelaskan jenis stakeholders:

No	Stakeholder	Kepentingan	Tingkat Kepentingan (T/R)	Sikap Dukungan (+), (-), (+/-)	Peran yang diharapkan
Internal					
1	Kepala Biro Persidangan I	Memudahkan dalam mengambil kebijakan	Tinggi	+	Membantu mengkomunikasikan Proyek Perubahan terhadap stakeholder
2	Kepala Bagian Komisi XI	Memudahkan dalam mengambil kebijakan	Tinggi	+	Membantu dan memberikan dukungan dalam Proyek Perubahan
3	Kasubag TU Komisi XI dan	Mempercepat pekerjaan	Rendah	+/-	Membantu dan memberikan dukungan dalam Proyek Perubahan
4	staf sub bagian rapat	Mempercepat pekerjaan	Rendah	+/-	Membantu Analisa Laporan KUnjungan Kerja
5	staf sub bagian TU	Mempercepat pekerjaan	Rendah	-	Membantu melaksanakan pendokumentasian
Eksternal					
6	Mitra Kerja	Mempercepat pekerjaan	Rendah	-	Mengikuti petunjuk /arahan pada proyek perubahan
7	PTT	Mempercepat	Rendah	+/-	Mengikuti petunjuk

		pekerjaan			/arahan pada proyek perubahan
8	Sekretariat Fraksi	Mempercepat pekerjaan	Rendah	-	Mengikuti petunjuk /arahan pada proyek perubahan
9	Pimpinan Komisi XI DPR I	Menerima manfaat	Tinggi	+	Menerima manfaat
10	Anggota Komisi XI DPR RI	Menerima manfaat	Tinggi	+	Menerima manfaat
11	Tenaga Ahli	Mempercepat pekerjaan	Rendah	+/-	Menyiapkan laporan

Setelah mengidentifikasi stakeholder yang mempengaruhi proyek perubahan ini, selanjutnya dilakukan analisis terhadap pengaruh *stakeholder* untuk tercapainya keberhasilan proyek perubahan ini. Analisis *stakeholder* menggunakan analisis tingkat pengaruh (Influence / power), dan tingkat minat (interest) *stakeholder* tersebut terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan. Hasil analisis pengelompokan *stakeholder* menunjukkan bahwa terdapat empat kelompok stakeholder yaitu :

Window Stakeholder



STAKEHOLDER	STRATEGI KOMUNIKASI
Promotors :	
Stakholder yang memiliki pengaruh minat tinggi terhadap keberhasilan proyek perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi dengan cara memberikan informasi untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang diusulkan sangat diperlukan dan bermanfaat. 2. Hal hal yang dikomunikasikan antara lain dengan menyampaikan maksud, tujuan, manfaat dan output yang dihasilkan serta impact dari proyek perubahan 3. Menyampaikan dukungan dukungan yang diperlukan untuk suksesnya pelaksanaan proyek perubahan seperti; perlunya dukungan anggaran dan motivasi kepada tim.
Latens :	
kelompok stakeholders yang pengaruhnya besar namun kepentingannya terhadap proyek perubahan rendah. Kelompok ini merupakan pejabat yang berpengaruh terhadap jalannya proyek perubahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi dengan memberikan informasi mengenai maksud, tujuan, manfaat dan output yang dihasilkan. 2. Memperlakukan mereka dengan baik.
Defenders :	
kelompok stakeholders yang memiliki pengaruh kecil tetapi memiliki kepentingan yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi dengan memberikan motivasi bahwa kegiatan proyek perubahan ini harus dilaksanakan karena berkaitan dengan

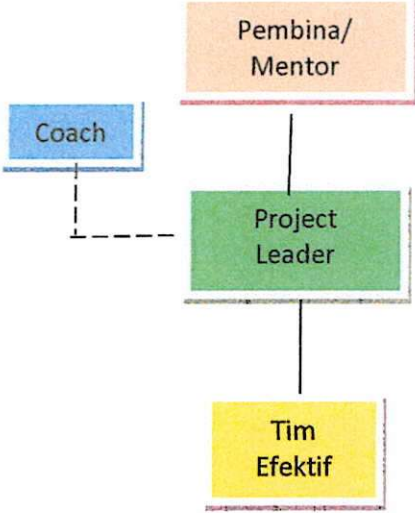
<p>tinggi terhadap proyek perubahan. Berdasarkan analisis pemangku kepentingan di atas kelompok ini paling banyak</p>	<p>tugas pokok dan merupakan kesempatan untuk menunjukan kepada pihak lain bahwa kita mampu untuk mengemban amanah.</p> <p>2. Menjaga semangat, motivasi dan memberikan apresiasi dan mengingatkan secara terus menerus pencapaian upaya agar proyek dapat terlaksanakan</p> <p>3. Mengajak diskusi dalam pembuatan perencanaan dan evaluasi permasalahan.</p> <p>4. Melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.</p>
<p>Apathetics :</p>	
<p>kelompok stakeholders yang pengaruhnya kecil dan kepentingannya juga kecil terhadap proyek perubahan. Potensi resistensinya rendah karena mereka tidak terlibat langsung terhadap proyek perubahan.</p>	<p>Memberikan informasi seperlunya dan menjaga agar tidak menjadi penghambat dari kegiatan proyek perubahan ini.</p>

B. TIM EFEKTIF

Tim efektif yang akan aktif dalam proyek perubahan :

1. Kepala Bagian Komisi XI.
2. Staf sub bagian Rapat.
3. Kasubag dan staf Tata Usaha.
4. Tenaga Ahli Komisi.
5. PTT (Pegawai Tidak Tetap).

C. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

STRUKTUR	DESKRIPSI
Struktur tim / orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proyek perubahan :	<ul style="list-style-type: none"> • Pembina/ Mentor : Kepala Bagian Komisi XI
 <pre> graph TD PM[Pembina/ Mentor] --- PL[Project Leader] C[Coach] -.- PL PL --- TE[Tim Efektif] </pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Project Leader : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Efektif : <ul style="list-style-type: none"> - Staf di Subbag Rapat - Subbag dan Staf di Tata Usaha - Tenaga Ahli - PTT (Pegawai Tidak Tetap)
	<ul style="list-style-type: none"> • Coach : Agus Supriyono, S,S., M.A.P.

PENJELASAN :

1. **Pembina/Mentor** : Memberikan persetujuan, arahan dalam menyelesaikan proyek perubahan dan fasilitasi kepada project leader dalam menyelesaikan proyek perubahan dan memantau capaian yang di dapat project leader sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam proyek perubahan.
2. **Project leader** : Inisiator dan Eksekutor dalam pelaksanaan Proyek Perubahan
3. **Tim Efektif** : Tim kerja yang akan membantu project leader dalam menyelesaikan proyek perubahan
4. **Coach** : Memberikan dorongan dan motivasi serta bimbingannya kepada project leader sampai terwujudnya proyek perubahan.

BAB III

BAB III

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

1. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

Kegiatan dan hasil dari implementasi proyek perubahan dalam jangka waktu 2 bulan (jangka pendek) yakni :

KEGIATAN 1

NO	KEGIATAN	TAHAPAN	OUTPUT	WAKTU
1	Terbentuknya Tim Efektif	a. Persiapan pertemuan b. Membuat Undangan rapat c. Pendistribusian Undangan d. Rapat pembentukan Tim e. Pembuatan dan Penandatanganan Surat Tugas (ST) Tim	• Undangan • Daftar Hadir, Laporan Singkat • Surat Tugas Tim Efektif • Dokumentasi	16 Mei 2019

Implementasi tahapan *kegiatan* pertama ini, adalah langkah awal dalam tahapan mengimplementasikan rancangan proyek perubahan. Diawali *project leader* konsultasi dengan Mentor untuk menyiapkan konsep susunan Tim Efektif, yang selanjutnya Surat Tugas Tim Efektif dapat ditandatangani oleh Kepala Biro Persidangan I, untuk menetapkan Surat Tugas terkait pembentukan Tim efektif.

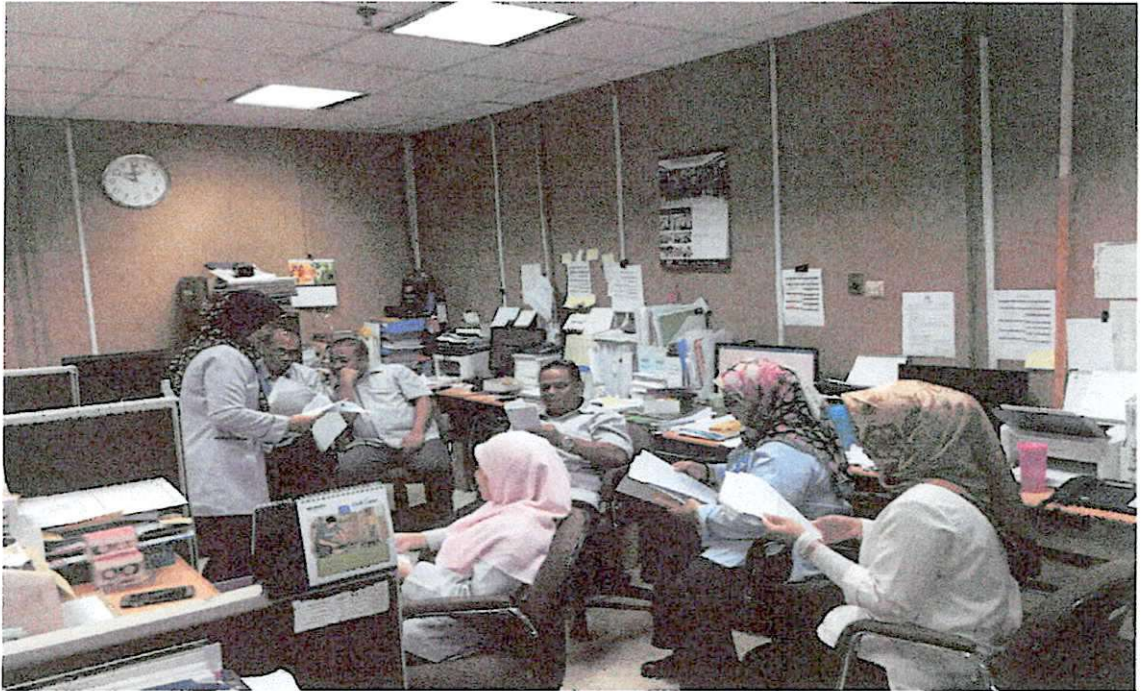
Kegiatan selanjutnya yakni mengadakan pertemuan awal dengan Tim Efektif, pada tanggal 16 Mei 2019 untuk berkoordinasi tahapan implementasi kegiatan jangka pendek ini.

Melalui Surat Tugas tertanggal 16 Mei 2019 yang menetapkan Tim Efektif sebagai berikut :

NO	N A M A	NIP	JABATAN
1.	Drs. Urip Soedjarwono	196205211982031001	Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI
2.	Semiyati, SE	196611281988032002	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi XI
3.	Sri Mulyani, S.H.	196909171996032003	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi XI
4.	Subagio, S.E.	197008211990031001	Analisis Tata Usaha
5.	Nur Solichah, S.Sos.	197106231999032004	Pengolah Data
8.	Oki Ganjar Ristawan, S.E.	197710162003121002	Pengelola Persidangan
9.	Almatika Isna Rostanti, S.E.	197712072003122001	Pengelola Persidangan
10.	Komaria Mahmud, S.Sos.	196409131998032002	Pengadministrasi Umum
11.	Joko Suroso	196607141987031002	Pengadministrasi Rapat
12.	Ratih	-	PPNPN/ Biro Persidangan
13.	Nyoman	-	Tenaga Ahli
14.	Syafrizal	-	Tenaga Ahli
15.	Aguswanti	-	Tenaga Ahli
16.	Happy	-	Tenaga Ahli

Adapun Surat tugas Tim Efektif terlampir dalam Lampiran, dan dokumentasi kegiatan awal tim efektif terlampir dalam lampiran.

Gambar 1. Rapat awal Tim efektif yang dilakukan tanggal 16 Mei 2019 untuk berkoordinasi tentang tahapan aktualisasi implementasi kegiatan jangka pendek proyek perubahan



Gambar 2. Konsultasi dengan Mentor terkait rencana lanjutan implementasi proyek perubahan.



KEGIATAN 2

NO	KEGIATAN	TAHAPAN	OUTPUT	WAKTU
2	Identifikasi Laporan Kunjungan Kerja sesuai fungsi Dewan Masa Sidang I - II TS 2018-2019	a. Pengumpulan laporan Kunjungan Kerja MS I - II TS 2018-2019 b. Identifikasi Laporan Kunjungan Kerja berdasarkan fungsi Anggaran, Pengawasan dan Legislasi	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kunjungan Kerja MS I - II TS 2018-2019 Klasifikasi Laporan Kunker 	20 s.d 21 Mei 2019

Dalam tahapan kedua kegiatan jangka pendek, yakni Tim Efektif sudah mulai melakukan rangkaian kegiatannya untuk pengumpulan laporan kunjungan kerja Masa Sidang I - II Tahun Sidang 2018-2019. Hasil dari pengumpulan ini, terlampir laporan Kunjungan Kerja selama Masa Sidang I – II Tahun Sidang 2018-2019 disertai dengan tabel identifikasi yang merupakan klasifikasi laporan kunjungan kerja Masa Sidang I - II Tahun Sidang 2018-2019.

Tim efektif memulai diskusi untuk mengidentifikasi masing-masing laporan kunjungan Masa Sidang I - II Tahun Sidang 2018-2019 dengan memilah berdasarkan fungsi anggaran, legislasi ataupun anggaran.

Identifikasi juga dilakukan dengan terlebih dahulu membuat daftar/ list tujuan daerah kunjungan kerja dan tanggal pelaksanaan kunjungan kerja. Tabel dimaksud menjadi bagian lampiran laporan ini.

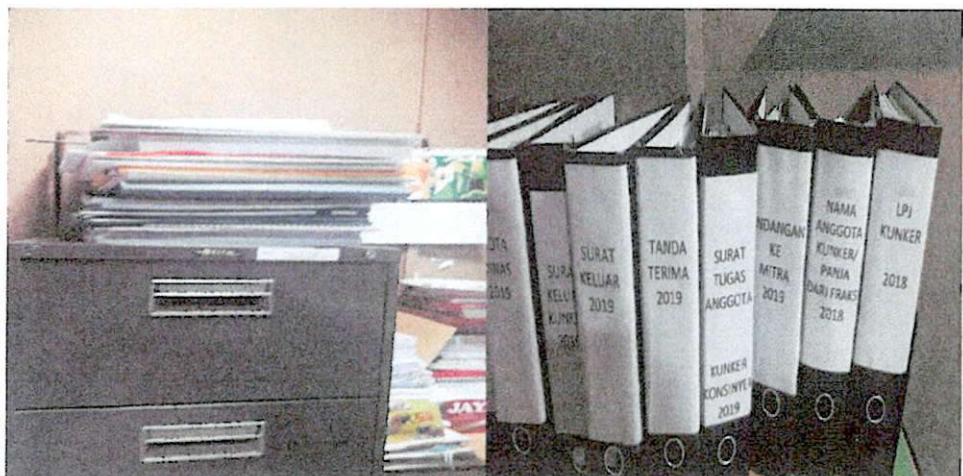
Setelah dilakukan pengumpulan, dilakukan scanning terhadap laporan kunjungan kerja Masa Sidang I-II Tahun Sidang 2018-2019. Berikut gambar dimaksud.

Gambar 2a. Kegiatan Scanning Laporan Kunjungan Kerja Masa Sidang I – II Tahun Sidang 2018-2019.



Setelah dilakukan scanning, maka dilakukan pendokumentasian dengan menggunakan box file.

Gambar 2b Kondisi Penyimpanan Laporan Kunjungan Kerja Masa Sidang I – II Tahun Sidang 2018-2019 sebelum dan sesudah dilakukan penataan.



KEGIATAN 3

NO	KEGIATAN	TAHAPAN	OUTPUT	WAKTU
3.	Analisa Laporan Kunjungan Kerja berdasarkan fungsi Dewan yang belum ditindaklanjuti Masa Sidang I - II TS 2018-2019	<p>a. Analisa Laporan Kunjungan Kerja yang belum ditindaklanjuti</p> <p>b. Penyampaian hasil Analisa kepada Pimpinan Komisi XI DPR RI, untuk dapat dijadikan bahan rapat Komisi XI DPR RI yang dapat ditindaklanjuti.</p>	• Analisa laporan kunjungan kerja yang belum ditindaklanjuti	8 -9 Juli 2019

Setelah melalui tahapan kegiatan 3, melakukan Identifikasi Laporan Kunjungan Kerja sesuai fungsi Dewan Masa Sidang I - II TS 2018-2019, maka tim efektif selanjutnya melakukan Analisa terhadap Laporan Kunjungan Kerja berdasarkan fungsi Dewan yang belum ditindaklanjuti Masa Sidang I - II TS 2018-2019. Adapun bentuk Analisa yang telah dilaksanakan oleh tim berupa tabel yang disajikan dalam lampiran.

Gambar 3. Kegiatan Analisa terhadap Laporan Kunjungan Kerja berdasarkan fungsi Dewan yang belum ditindaklanjuti Masa Sidang I - II TS 2018-2019.

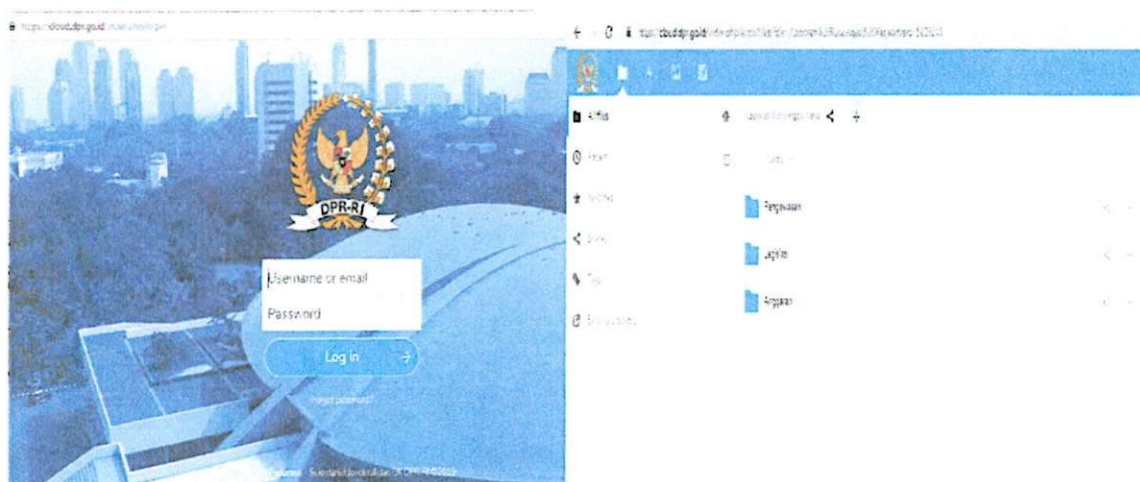


KEGIATAN 4

NO	KEGIATAN	TAHAPAN	OUTPUT	WAKTU
4	Penggunaan Aplikasi <i>Cloud Share</i>	a. Membahas Panduan penggunaan aplikasi <i>Cloud Share</i> b. Pembuatan Folder sesuai Fungsi DPR RI c. Sosialisasi Penggunaan aplikasi <i>Cloud Share</i> internal d. Input data rekapitulasi laporan kunjungan kerja yang belum ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan penggunaan aplikasi <i>Cloud Share</i> • Screenshot rekapitulasi melalui aplikasi cloud • Laporan Kunker 	10 Juli 2019

Dalam tahapan kegiatan 4 kegiatan di lakukan dengan penyusunan petunjuk teknis aplikasi Cloud Share. Kegiatan dilanjutkan dengan memberikan arahan kepada staf pelaksana dalam mengoperasikan penggunaan aplikasi *cloudshare*.

Gambar 4 *Screenshot* penyampaian Hasil Laporan Kunjungan Kerja



KEGIATAN 5

NO	KEGIATAN	TAHAPAN	OUTPUT	WAKTU
5	Penyusunan Laporan	a. Penyusunan Laporan Proyek Perubahan b. Penyusunan hasil evaluasi kegiatan jangka pendek	<ul style="list-style-type: none"> Laporan proyek perubahan Laporan evaluasi 	11 s.d 12 Juli 2019

Dalam tahapan terakhir dari proyek perubahan ini, *project leader* membuat laporan keseluruhan dari kegiatan yang telah dilakukan selama jangka pendek implementasi proyek perubahan. Selain itu *project leader* meminta masukan kepada anggota Tim Efektif untuk memberikan masukan dan saran atas kegiatan jangka pendek serta rekomendasinya untuk keberhasilan Jangka menengah dan Jangka Panjang. Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

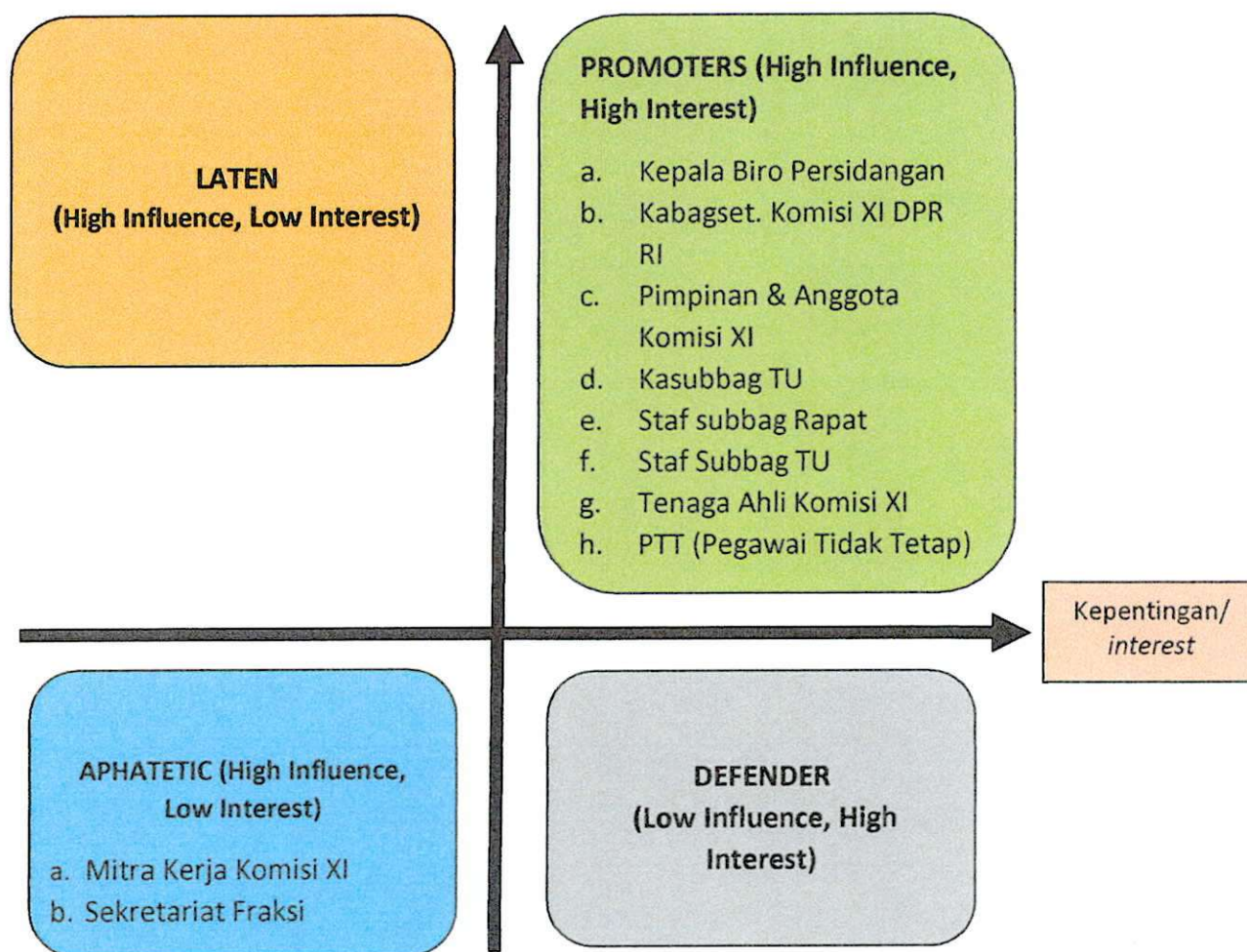
Bahwa melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, secara garis besar dapat di himpun beberapa hal masukan dan saran sebagaimana dibawah ini:

1. Laporan Kunjungan Kerja Masa Sidang I - II Tahun Sidang 2018-2019 telah terkompilasi dengan baik dan teridentifikasi sesuai dengan fungsi DPR RI yakni legislasi, anggaran dan pengawasan, tetap dilanjutkan di masa sidang berikutnya, sehingga pencari data yang nantinya akan ditindaklanjuti menjadi berkesinambungan.
2. Laporan Kunjungan kerja yang telah teridentifikasi dapat menjadi bagian bahan rapat dalam setiap pelaksanaan rapat di DPR RI sesuai dengan fungsi DPR RI, sehingga dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan dalam rapat, dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah dalam hal ini mitra kerja khususnya Komisi XI DPR RI.

Tim efektif merekomendasikan Penyampaian laporan kompilasi kepada mitra kerja, dapat mengembangkan Aplikasi *Cloud Share* untuk pengembangan jaringan di masa mendatang, dengan demikian penyimpanan berkas laporan kunjungan kerja menjadi terpusat dan sistematis, serta mendukung program pemerintah dalam menjalankan *e-government*.

2. ANALISA PERGESERAN STAKEHOLDER (SETELAH IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN)

Dalam waktu implementasi jangka pendek ini, telah terjadi pergeseran dari masing-masing *stakeholder*. Pergeseran dimaksud dilakukan melalui strategi komunikasi yang dilakukan. Dukungan dari para *stakeholder* dapat dibuktikan melalui surat dukungan sebagaimana terlampir dalam lampiran Dukungan *Stakeholder*.



3. KENDALA

NO	POTENSI KENDALA/MASALAH	RESIKO
1	Kurangnya Kerja sama Tim <i>stakeholder</i> internal karena ada tugas pokoknya yg harus dikerjakan.	Proyek perubahan tidak akan berjalan sesuai yang telah direncanakan
2	Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia bagian SubRapat	Proyek perubahan berjalan lambat

4. STRATEGI MENGATASI KENDALA

Adapun strategi yang timbul dalam pelaksanaan implementasi yakni sebagai berikut :

- Kerjasama tim dengan membangun komunikasi yang efektif sehingga tujuan tercapai.
- Meminta bantuan dari bagian SubTU

5. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Yang menjadi faktor kunci keberhasilan pada proyek perubahan ini adalah :

- Terbangunnya tim efektif yang terpadu dalam melaksanakan pekerjaan sesuai perencanaan;
- Adanya dukungan dan komitmen dari Pembina, *Mentor*, *Coach*, Tim Efektif dan stake holder untuk melaksanakan proyek perubahan;
- Adanya komitmen dan disiplin Tim Efektif dalam menjalani semua tahapan yang direncanakan;
- Adanya server dan aplikasi cloud.dpr.go.id

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Proyek perubahan yang telah dilakukan dari kegiatan optimalisasi tindaklanjut laporan kunjungan kerja Komisi XI melalui aplikasi *cloud file sharing*, dan telah membawa perubahan, yang dapat disimpulkan :

1. Laporan Kunjungan Kerja Masa Sidang I - II Tahun Sidang 2018-2019 telah terkompilasi dengan baik dan teridentifikasi sesuai dengan fungsi DPR RI yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.
2. Laporan Kunjungan yang telah teridentifikasi dapat menjadi bagian bahan rapat dalam setiap pelaksanaan rapat di DPR RI sesuai dengan fungsi DPR RI, sehingga dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan dalam rapat.

3. REKOMENDASI

1. Hasil Identifikasi Laporan Kunjungan kerja yang telah terkompilasi dengan baik, agar dapat juga dapat disampaikan kepada Mitra Kerja Komisi XI DPR RI secara berkala.
2. Penyampaian laporan kompilasi kepada mitra kerja, dapat mengembangkan aplikasi *Cloud Share* untuk pengembangan jaringan di masa mendatang.

MILESTONE 1



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR :

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI adalah melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Komisi XI.
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut pada huruf a, Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI menyelenggarakan dukungan pelayanan dalam rangka persiapan materi rapat, yakni Laporan Kunjungan Kerja.
- c. bahwa agar dukungan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan efektif dan efisien, diperlukan penyiapan materi rapat yang terkompilasi dengan baik, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam setiap Rapat Komisi XI DPR RI
- d. bahwa penyiapan materi rapat dimaksud diperlukan, maka diperlukan identifikasi dan Analisa dari setiap Laporan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI,
- e. Agar kegiatan sebagaimana dimaksud huruf d, dapat berjalan efektif dan efisien, perlu menugaskan Tim Kerja.

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;
3. Surat Tugas Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor PL/213/SETJEN DAN BK-DPR RI/PL.02/03/2019 tentang Penugasan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II Tahun 2019.

MENUGASKAN :

Kepada :

NO	N A M A	NIP	JABATAN
1.	Drs. Urip Soedjarwono	196205211982031001	Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI
2.	Semiyati, SE	196611281988032002	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi XI
3.	Sri Mulyani, S.H.	196909171996032003	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi XI
4.	Subagio, S.E.	197008211990031001	Analisis Tata Usaha

5.	Nur Solichah, S.Sos.	197106231999032004	Pengolah Data
8.	Oki Ganjar Ristawan, S.E.	197710162003121002	Pengelola Persidangan
9.	Almatika Isna Rostanti, S.E.	197712072003122001	Pengelola Persidangan
10.	Komaria Mahmud, S.Sos.	196409131998032002	Pengadministrasi Umum
11.	Joko Suroso	196607141987031002	Pengadministrasi Rapat
12.	Ratih	-	PPNPN/ Biro Persidangan
13.	Nyoman	-	Tenaga Ahli
14.	Syafrizal	-	Tenaga Ahli
15.	Aguswanti	-	Tenaga Ahli
16.	Happy	-	Tenaga Ahli

Untuk : menjadi bagian dari Tim Kerja Optimalisasi Tindakan Lanjut Laporan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI melalui cloud file sharing.

Demikian Surat Tugas ini kami buat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 16 Mei 2019

KEPALA BIRO
PERSIDANGAN I,



M. Dimiyati Sudja, S.Sos, M.Si
NIP. 195909101980031005



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : TU/01/KOM.XI/5/2019
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Pembentukan
Tim Efektif tanggal 16 Mei 2019

15 Mei 2019

YTH.

1. Kasubag TU Set. Komisi XI
 2. Para staf Set. Komisi XI
 3. Para Tenaga Ahli Komisi XI
- Sekretariat Jenderal DPR RI


Jakarta

Dalam rangka meningkatkan dukungan penyediaan materi rapat dan pelaksanaan rapat Komisi XI DPR RI, bersama ini kami mengundang Saudara dalam Rapat Koordinasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : **Kamis, 16 Mei 2019**
Waktu : **Pukul 14.00 WIB**
Tempat : Ruang Sekretariat Komisi XI DPR RI, Gedung
Nusantara I, Lt. I,
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - Jakarta.
Acara : 1. Pembentukan Tim Efektif
2. Pembagian Tugas dan wewenang

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara dalam Rapat Koordinasi dimaksud.

Kabagset Komisi XI DPR RI,


Drs. Urip Spedjarwono
NIP. 196205211982031001



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 01/MT/PIM.IV/05/2019
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Pembentukan
Tim Efektif tanggal 16 Mei 2019

15 Mei 2019

YTH.

1. Kasubag TU Set. Komisi XI
 2. Para staf Set. Komisi XI
 3. Para Tenaga Ahli Komisi XI
- Sekretariat Jenderal DPR RI

Jakarta

Dalam rangka meningkatkan dukungan penyediaan materi rapat dan pelaksanaan rapat Komisi XI DPR RI, bersama ini kami mengundang Saudara dalam Rapat Koordinasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : **Kamis, 16 Mei 2019**
Waktu : **Pukul 14.00 WIB**
Tempat : Ruang Sekretariat Komisi XI DPR RI, Gedung
Nusantara I, Lt. I,
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - Jakarta.
Acara : 1. Pembentukan Tim Efektif
2. Pembagian Tugas dan wewenang

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara dalam Rapat Koordinasi dimaksud.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terimakasih

Kasub Rapat Komisi XI DPR RI,

Semiyati, S.E.

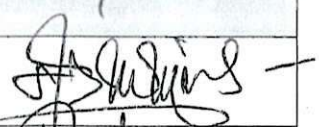
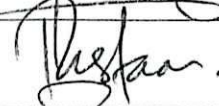
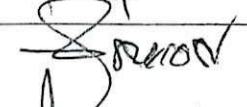
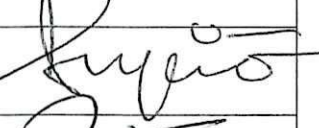
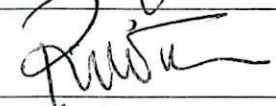
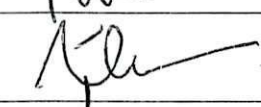
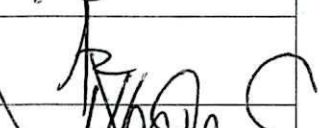

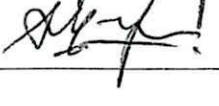
NIP. 196611281988032002



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI KASUBAG RAPAT KOMISI XI DPR RI DENGAN KASUBAG TU SET.
KOMISI XI DPR RI, PARA STAF SET. KOMISI XI DPR RI SERTA TENAGA AHLI
KOMISI XI DPR RI

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019
Pukul : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Sekretariat Komisi XI DPR RI
Acara : 1. Pembentukan Tim Efektif
2. Pembagian Tugas dan Wewenang

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sri Mulyani	Kasubg TU	
2.	OKI Ganjar R	STAF	
3.	Joko Surono	STAF	
4.	Subagio	staf	
5.	Komaria m.	STAF	
6.	Almatika Isua	staf	
7.	Ratih Estika Sari	STAF	
8.	Nyoman Indra Juarsa	Tenaga Ahli	
9.	syafriзал Syarif	Tenaga Ahli	
10.			
11.			



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT RAPAT KOORDINASI

Jenis Rapat : Rapat Koordinasi
Rapat Ke : 1
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Semiyati.SE
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. Selesai
T e m p a t : Ruang Sekretariat Komisi XI DPR RI
Acara : 1. Pembentukan Tim Efektif
2. Pembagian Tugas dan Wewenang
Hadir : 1. Kasubag TU Komisi XI
2. Para Staf Set. Komisi XI
3. Para Tenaga Ahli Komisi XI

I. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- Rapat Koordinasi oleh Kepala Sub Bagian Rapat Set. Komisi XI DPR RI dan dimulai pukul 14.00 Wib;
- Rapat dimulai dengan menyampaikan Rancangan Proyek Perubahan dengan judul Optimalisasi Tindak Lanjut Laporan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI melalui Cloud File Sharing dan akan diteruskan sebagai Materi rapat.
- Rapat membagi Tim Efektif menjadi :
 - Tim Kerja Administrasi terdiri dari Kasub TU dan Staf TU dengan penanggungjawab kepala Sub TU set. Komisi XI;
 - Tim Kerja Teknis terdiri dari Staf Subag Rapat dan Tenaga ahli dengan Penanggung jawab Oki Ganjar Ristawan.
- Selanjutnya akan mengirim surat ke BDTI.
- Membuat Surat Tugas pembentukan Tim Efektif.

II. Rapat ditutup Pukul 15.30 WIB.

**KEPALA SUBBAGIAN RAPAT
SET. KOMISI XI DPR RI,**

SEMIYATI, S.E.

NIP. 196611281988032002

MILESTONE 2

TABEL IDENTIFIKASI LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
MASA SIDANG I - II TAHUN SIDANG 2018-2019

NO	NAMA DAERAH	FUNGSI	WAKTU PELAKSANAAN
1.	PROVINSI SUMATERA UTARA	PENGAWASAN	22 S.D 24 SEPTEMBER 2018
2.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	PENGAWASAN	4 S.D 6 OKTOBER 2018
3.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	PENGAWASAN	4 S.D 6 OKTOBER 2018
4.	PROVINSI JAWA TIMUR	PENGAWASAN	25 S.D 27 OKTOBER 2018
5.	PROVINSI JAWA TIMUR	PENGAWASAN	1 S.D 5 NOVEMBER 2018
6.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	PENGAWASAN	7 S.D 9 DESEMBER 2018



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI

MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2018-2019

KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU

4 – 6 OKTOBER 2018

A. PENDAHULUAN

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019, Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Timur pada tanggal 4 sampai dengan 6 Oktober 2018. Sesuai dengan ruang lingkup tugasnya di bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional dan perbankan, Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah serta instansi-instansi Pemerintah Pusat dan mitra kerja Komisi XI DPR RI yang ada di daerah.

Komisi XI DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank yang bermitra kerja dengan Pemerintah.

Berdasarkan data Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) mencatat bahwa perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan II 2018 tercatat tumbuh sebesar 4,51% (yoy), menguat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,47% (yoy). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan ini didorong oleh pertumbuhan investasi, konsumsi pemerintah serta membaiknya kontraksi net ekspor pada sisi pengeluaran. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha ditopang oleh kinerja sektor konstruksi dan perdagangan yang meningkat. Memasuki triwulan III 2018, perekonomian Kepri diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 4,0% - 4,4% (yoy). Pendapatan dan belanja Pemda terealisasi masing-masing sebesar 38,32% dan 31,56% dari pagu anggaran. Realisasi pendapatan lebih rendah dibanding capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 39,10%, sedangkan realisasi belanja mencatatkan sedikit penurunan dari tahun lalu sebesar 31,85%. Penurunan

persentase realisasi pendapatan utamanya didorong oleh penurunan pendapatan transfer dan pendapatan retribusi daerah. Perlambatan konsumsi pemerintah disebabkan oleh penurunan belanja operasi terutama pelemahan belanja pegawai serta barang dan jasa. Kinerja perbankan mengalami perlambatan tercermin dari pelemahan pertumbuhan kredit, aset dan DPK. Ketiga indikator tersebut tercatat tumbuh masing-masing sebesar 5,15% (yoy), 4,24% (yoy) dan 4,65% (yoy).

Stabilitas keuangan daerah relatif tetap terjaga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Tingkat kredit bermasalah sebesar 4,58%, masih belum melewati ambang batas yang ditetapkan BI. Namun kredit bermasalah mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,23% (yoy). Aktivitas sektor UMKM mencatatkan perlambatan pertumbuhan dari 6,35% (yoy) menjadi 5,37% (yoy). Jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 berjumlah 131.676 orang atau 6,20% dari total penduduk. Angka ini lebih tinggi dibanding periode September 2017 sebesar 128.462 atau 6,13% dari total penduduk.

Gini ratio tercatat 0,330, lebih rendah dibanding periode sebelumnya 0,359. Namun gini ratio pedesaan tumbuh lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Kepri mencatatkan inflasi pada Juli 2018 sebesar 0,27% (mtm) atau 4,38% (yoy), didorong oleh kenaikan harga bayam dan kacang panjang. Seiring dengan berlalunya bulan Ramadhan dan hari raya Lebaran, tekanan inflasi khususnya komoditas volatile food mengalami penurunan. Namun memasuki Agustus dan September 2018, tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat didorong oleh peningkatan permintaan pada hari raya Idul Adha serta curah hujan serta gelombang laut yang tinggi menjelang akhir tahun. Dari sisi inflasi administered prices, peningkatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi oleh Pemerintah per 1 Juli 2018 diperkirakan dapat meningkatkan capaian inflasi pada triwulan III 2018.

Adapun susunan keanggotaan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Tugas Nomor 90/ST/K.XI/DPRRI/X/2018 adalah sebagai berikut:

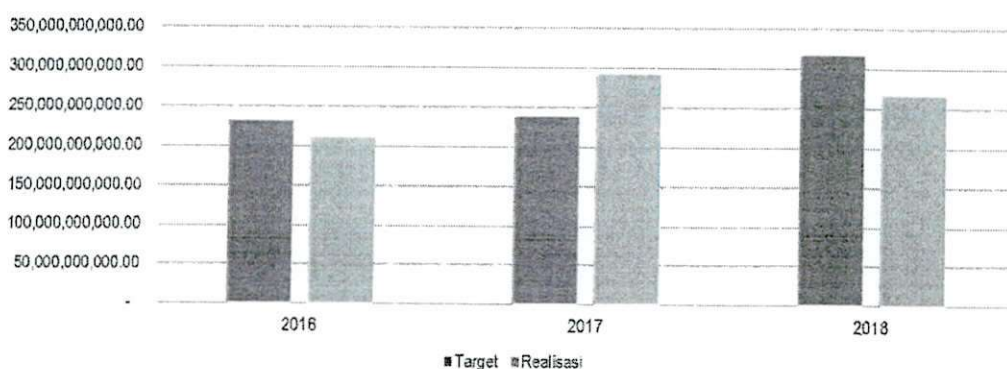
No	No. Anggota	Nama Anggota	Fraksi	Keterangan
1	465	Ir. Achmad Hafisz Tohir	F.PAN	<u>Ketua Tim</u> Wakil ketua Komisi
2	132	Marsiaman Saragih	F.PDI-P	Anggota
3	218	Ir. G. Michael Jen0, MM	F.PDI-P	Anggota
4	320	Edison Betaubun, S.H., M.H.	F.P. GOLKAR	Anggota
5	283	H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H	F.P. GOLKAR	Anggota
6	285	H. Muhammad Nur Purnamasidi	F.P. GOLKAR	Anggota
7	346	Heri Gunawan, S.E	F. P. GERINDRA	Anggota
8	384	Drs. Syaiful Rasyid, MM	F. P. GERINDRA	Anggota
9	366	Ir. Sumail Abdullah	F. P. GERINDRA	Anggota
10	422	Siti MUfattahah, S.Psi	F.P. DEMOKRAT	Anggota
11	498	H. Sukiman, S.Pd., M.M.	F.PAN	Anggota
12	41	Bertu Merlas	F. PKB	Anggota
13	89	H. Refrizal	F. PKB	Anggota
14	511	Dra. Elviana, M.Si	F.PPP	Anggota
15	27	Johnny G. Plate, SE	F.P. NASDEM	Anggota
16		Dewi Resmini, S.E., M.Si		Kasubag Rapat
17		Renaldi Setiawan, S.IP		Staf
18		Oki Ganjar Ristawan		Staf
19		Nyoman Indra Juarsa		Tenaga Ahli
20		Irfan Ramadhan		Staf

21		Jaka Nugraha		Media Cetak
22		Dwi Utomo		TV Parlemen

B. INFORMASI DAN TEMUAN

1. Kanwil Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Riau

- a. Besar target dan realisasi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai di Provinsi Kepulauan Riau selama 3 (tiga) tahun terakhir



Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Target Penerimaan : Rp 230.483.671.000	Target Penerimaan : Rp 238.034.695.000	Target Penerimaan : Rp 317.282.000.000
Realisasi Penerimaan : Rp 210.340.860.000	Realisasi Penerimaan : Rp 290.674.569.000	Realisasi Penerimaan : Rp 266.626.552.000
91,26%	106,07%	84,03%

- b. Bea Cukai merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara dalam membiayai APBN:

- 1) Langkah-langkah apa saja yang telah ditempuh dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN
 - a) Penerimaan bea masuk bergantung pada Importasi Propana-Butana oleh PT Pertamina, untuk tahun ini agak berkurang, karena ada pergeseran ke tangki penampungan pertamina di luar wilayah kepri.

- b) Untuk target Cukai belum sesuai karena target penerimaan cukai plastik sudah ada, namun sampai dengan saat ini belum dapat terlaksana pungutannya, karena belum ada regulasinya.
 - c) Melakukan analisis Kinerja Penerimaan setiap semester;
 - d) Melaksanakan Rekonsiliasi penerimaan dari tingkat KPPBC, Kanwil dan Kantor Pusat DJBC;
 - e) Melakukan pengawasan kepabeanan dan cukai untuk meminimalisir pemasukan barang ke daerah pabean secara illegal. Sehingga semua pemasukan barang ke daerah pabean menggunakan dokumen kepabeanan dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara;
 - f) Melakukan pendistribusian target ke setiap satker berdasarkan potensi penerimaan masing-masing satker;
 - g) Melakukan monitoring penerimaan satker yang berada dibawah Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri.
- c. Gambaran potensi penerimaan Bea dan Cukai di wilayah kerja Kanwil Bea dan Cukai Kepulauan Riau dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan, dan proses penetapan target penerimaan untuk masing-masing kantor wilayah
- Penetapan Target penerimaan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau oleh Kantor Pusat DJBC berdasarkan penerimaan tahun lalu, dengan mempertimbangkan, 'perkiraan' pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan juga kurs mata uang rupiah Target penerimaan Bea masuk dan cukai sulit untuk dicapai karena tergantung terhadap Jumlah importasi Propana-Butana oleh Pertamina. Capaian penerimaan sampai dengan September 2018 dapat melampaui target dikarenakan adanya penerimaan berupa Bea Keluar (BK) dari Ekspor Bauksit di KPPBC Tanjung Pinang.

d. Pola kerja dan upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Provinsi Kepulauan Riau dalam hal:

1) optimalisasi penerimaan Bea dan Cukai;

Meningkatkan kualitas SDM dan integritas SDM, khususnya yang berkaitan dengan pengoptimalisasian penerimaan Negara di bidang pabean dan cukai (Tarif, Nilai Pabean dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan ekspor dan impor). Meningkatkan kesadaran /pemahaman masyarakat diperbatasan akan kewajiban kepabeanan dengan melakukan sosialisasi, pembinaan, dan bimbingan kepada masyarakat pada umumnya dan pengguna jasa kepabeanan khususnya. Melakukan pengawasan kepabeanan secara optimal, baik pengawasan laut maupun pengawasan darat (pelabuhan).

2) Pencegahan Penyeludupan;

Melakukan kegiatan intelijen Kepabeanan dan Cukai di wilayah Pengawasan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan di wilayah yang perairannya masih terhubung dengan Kepulauan Riau dan juga melakukan kegiatan overseas intelligence di Malaysia atau perairan perbatasan Singapura. Kerja sama intelijen dan operasi penindakan dengan KPU Batam dan Kantor Wilayah DJBC di pesisir timur Sumatera untuk mengantisipasi penyelundupan baik dilaut maupun di area landing spot nya Koordinasi dengan Aparatur Penegak Hukum (APH) lainnya baik dalam kegiatan intelijen maupun operasi seperti dengan TNI AL, POLRI, BNN dan Bakamla. Menggelar Operasi bersama dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam operasi Patkorkastima dan dengan APH negara lain seperti dalam Patkor Optima yang di inisiasi oleh Badan Keamanan Laut Indonesia. Melakukan Patroli Laut untuk mencegah penyelundupan dengan skema operasi Bawah Kendali Operasi (BKO), Kerjasama Operasi (KSO), Skema Terpadu, Skema Mandiri dengan mengutamakan pola operasi targetting dan sewaktu waktu dilakukan ronda laut.

3) Tindakan Terhadap Penyeludup Dan Barang Hasil Seludupan.

a) Pelanggaran Pidana

Dalam hal dari hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti terjadi pelanggaran pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai dilakukan proses penyidikan sebagaimana kewenangan yang diatur dalam Pasal 112 Undang-undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan: Atas pelaku yang terlibat dalam proses penyelundupan dijadikan tersangka dan dilakukan penahanan. Atas sarana pengangkut, barang-barang hasil penindakan serta dokumen terkait dilakukan penyitaan dan dijadikan Barang Bukti untuk diajukan ke persidangan. Pengenaan sanksi pidana dan penyelesaian lebih lanjut atas Barang Bukti menunggu vonis pengadilan.

b) Pelanggaran Administratif

Dalam hal pelanggaran yang terjadi bersifat administratif dan bukan merupakan pelanggaran pidana maka dilakukan proses : Pengenaan pembayaran Bea Masuk (BM)/ Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan sanksi denda. Dalam hal Barang Hasil Penindakan belum dilakukan diselesaikan kewajiban kepabeanan atau terdapat kekurangan dalam pembayaran Bea Masuk (BM)/ Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)/ Cukai sebagaimana Pasal 82 Undang-undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan : Pelaku/pengusaha membayar Bea Masuk (BM)/ Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)/ Denda yang dikenakan. Setelah dilunasi seluruh kewajiban yang harus dibayar, atas barang hasil penindakan dapat diserahkan kembali, atau : Penetapan Barang Hasil Penindakan menjadi Barang yang dikuasai Negara (BDN) dan/atau Barang Milik Negara (BMN). Dalam hal penindakan ditemukan barang-barang yang

termasuk komoditas larangan pembatasan yang tidak diberitahukan/diberitahukan secara tidak benar sebagaimana pasal 53 Undang-undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan : Atas pelaku/pengusaha dilakukan pemeriksaan dan diberikan kesempatan untuk menunjukkan perizinan terkait barang-barang larangan pembatasan tersebut Atas barang ditetapkan menjadi Barang yang dikuasai Negara (BDN)/ Barang Milik Negara (BMN) dan peruntukan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri (dilelang, dimusnahkan, dihibahkan atau dijadikan inventaris).

- e. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memperlancar penerimaan negara dari sektor bea dan cukai di Provinsi Kepulauan Riau selama 3 (tiga) tahun terakhir
- 1) Rendahnya pemahaman masyarakat di perbatasan negara akan kewajiban pabean.
 - 2) Adanya pelabuhan rakyat (pelabuhan tidak resmi) yang lokasinya relatif sulit dijangkau oleh pengawasan Bea dan Cukai.
 - 3) Terbatasnya sumber daya manusia dan sarana pengawasan (contohnya kapal patroli beserta perlengkapannya) pada Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau yang wajib meng-cover wilayah laut yang luas dan daerah kepulauan;
 - 4) Penyumbang penerimaan terbesar Bea Masuk dari komoditas impor Gas Propane dan Gas Butane yang dilakukan oleh PT Pertamina (+95% penerimaan BM). Besarnya penerimaan BM untuk komoditas Gas Propane dan Gas Butane ini sangat tergantung dari faktor eksternal, yaitu volume impor dan fluktuasi harga kedua komoditas tersebut;
 - 5) Cukai MMEA hanya berasal dari 1 Pabrik di Tanjungpinang. Pada tahun 2013, terdapat 3 pabrik, 1 pabrik tutup (tidak melakukan kegiatan) pada awal tahun 2014, 1 dibekukan NPPBKC nya, sehingga realisasi penerimaan cukai berkurang.

Pabrik MMEA tersebut skala kecil, dan peruntukannya hanya untuk konsumen tertentu, sehingga produksinya pun relatif stagnan;

- 6) Sejak berlakunya Permendag Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian yang mengatur tentang persyaratan ekspor timah batangan mempengaruhi kegiatan penambangan dan produksi timah batangan di wilayah Kepri yang menggunakan peralatan eks impor antara lain sparepart dan kapal hisap pasir timah menjadi menurun dan cenderung tidak ada;
- 7) Untuk penerimaan Bea Masuk dari komoditi lain, faktor yang menyebabkan turunnya penerimaan adalah adanya impor yang berasal dari negara-negara yang memberlakukan perdagangan bebas (Free Trade Area), sehingga tarif BM menjadi lebih kecil atau bahkan menjadi 0% dengan menggunakan tarif BM preferensial FTA (menggunakan Form D atau form E).

- f. Kinerja pengawasan (preventif dan represif) yang telah dilakukan oleh Kanwil Bea dan Cukai Provinsi Kepulauan Riau

No	Tahun	Jumlah SPB	Pemeriksaan	Penyegehan	Tegahan	Nilai Barang (Rp)	Potensi Nilai Yang Berhasil Diselamatkan (Rp)
1	2015	388	445	85	77	60 Milyar	5.5 Milyar
2	2016	288	821	65	119	83 Milyar	37 Milyar
3	2017	349	1417	72	90	125 Milyar	14 Milyar
4	2018	307	1161	12	73	307 Milyar	14 Milyar

- g. Pengawasan dan pembinaan terhadap Aparat Bea dan Cukai Provinsi Kepulauan Riau selama ini sehingga tidak terjadi kebocoran Penerimaan Negara

- 1) Melaksanakan tindak Lanjut Kepuasan Pengguna Jasa;
- 2) Melakukan movev dalam bentuk pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas terkait sop proses bisnis dan prosedur yang rawan terjadi penyalahgunaan wewenang;

- 3) Monitoring Evaluasi Capaian Kinerja KPPBC dan PSO di bawah pengawasan Kanwilsus Kep. Riau;
- 4) Asistensi Penanganan dugaan pelanggaran disiplin pegawai;
- 5) Penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi SIPUMA;
- 6) Asistensi Analisis Beban Kerja;
- 7) Memberikan reward dan punishment yaitu dengan memberikan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan memberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang melanggar ketentuan;
- 8) Pemantauan Pengendalian Utama Penatausahaan Barang Hasil Penindakan;
- 9) Monitoring Pelaksanaan Pengisian SPT, ALPHA dan LHKPN oleh Pejabat dan Pelaksana;
- 10) Melaksanakan Pemeriksaan mendadak (Sidak) terhadap pegawai dalam pelaksanaan tugas di lapangan;
- 11) Melaksanakan internalisasi dan sosialisasi mengenai kode etik pegawai dan integritas Monitoring Evaluasi Program Penertiban Impor Cukai Ekspor Berisiko Tinggi (PICE-BT);
- 12) Pembangunan zona integritas (zi) menuju wbk/wbbm;
- 13) Pembinaan yang dilakukan adalah dengan menerapkan pengawasan melekat antara atasan dan bawahan sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan tugas;
- 14) Briefing rutin terkait pelaksanaan kegiatan operasional, dan telah dilakukan pengarahan-pengarahan dalam bentuk p2kp guna mengedukasi pegawai dalam menjalankan tugas.

2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

- a. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau 3 (tiga) tahun terakhir, sektor apa saja yang memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi dan sektor apa saja yang mengalami pertumbuhan negatif

Ekonomi Kepri tumbuh sebesar 4,51% (yoy) pada triwulan II-2018, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2018 sebesar 4,47% (yoy).

Ekonomi Kepri tumbuh menguat, didorong oleh: dari sisi pengeluaran, perekonomian Kepri triwulan II-2018 didorong oleh pertumbuhan investasi, konsumsi pemerintah serta membaiknya kontraksi net ekspor. Dari sisi lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi bersumber dari peningkatan kinerja sektor konstruksi dan perdagangan.

Realisasi investasi tumbuh menguat baik dari sisi investasi bangunan maupun non bangunan. Pertumbuhan investasi bangunan ditopang oleh tingginya aktivitas konstruksi baik oleh sektor swasta maupun pemerintah. Penguatan pertumbuhan pada investasi bangunan sejalan dengan pertumbuhan sektor konstruksi maupun investasi non bangunan yang juga meningkat terutama berupa pembelian mesin/peralatan industry.

Konsumsi Pemerintah tumbuh menguat terutama didorong oleh pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan PNS pada Juni 2018 tercermin dari realisasi belanja pegawai pemerintah (menggunakan APBD dan APBN) sampai dengan triwulan II-2018 yang lebih tinggi dibandingkan realisasi sampai dengan triwulan III – 2017.

Kinerja net ekspor masih mencatatkan kontraksi, namun membaik terutama di topan oleh peningkatan pertumbuhan ekspor luar negeri.

b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong serta kendala-kendala pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau

1) Faktor Pendorong ekonomi di Tahun 2018

- a) Ekspektasi bisnis semikonduktor Singapura untuk enam bulan ke depan mengalami pertumbuhan diperkirakan akan berdampak pada sektor industry Kepri terutama semikonduktor. Sejalan dengan hal tersebut, IIP Singapura juga terus menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan hasil liaison, pada triwulan III dan IV-2018 namun dibayang-bayangi risiko perang dagang.

- b) Tingkat kunjungan wisman yang tumbuh cukup tinggi diperkirakan akan mendorong kinerja perdagangan;
- c) Proyek infrastruktur pemerintah seperti pembangunan jalan dan proyek swasta diperkirakan akan mendorong kinerja sektor konstruksi;

2) Faktor Penghambat ekonomi di Tahun 2018

- a) Dinamika pertumbuhan ekonomi global seperti perang dagang yang dilancarkan oleh Amerika Serikat, sangat mempengaruhi ekonomi Kepri yang sangat berorientasi ekspor;
- b) Ekosistem investasi yang masih kalah bersaing dengan negara-negara kompetitor;
- c) Risiko keamanan seperti demo buruh dan mogok kerja mengurangi produktivitas korporasi serta kepastian hukum dapat mempengaruhi kinerja investasi;
- d) Kenaikan upah yang terus menerus tanpa diimbangi peningkatan produktivitas berpotensi mengurangi daya saing industri di Batam.

c. Industri unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau

Industri unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri adalah industri pengolahan dengan produk elektronik, kapal, produk besi baja dan CPP. Berdasarkan data yang dirilis BPS, secara subsector, Industri barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik memiliki kontribusi sekitar 19% terhadap perekonomian Kepri. Diikuti oleh industri logam dasar dengan kontribusi sekitar 5%.

Berdasarkan indikator ekspor impor, ekspor elektronik dan mesin mencapai sekitar 44% dari total ekspor Kepri dan ekspor produk ini menunjukkan tren pertumbuhan yang menguat hingga 2017. Namun, penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk sektor industri ini sangat rendah karena sifat produksi berupa maklon,

dimana seluruh bahan baku disediakan oleh *mother company* dan nilai tambah yang dilakukan di Kepri hanya berupa biaya tenaga kerja untuk jasa perakitan.

Selain industry elektronik, industry produk besi baja dan perkapalan juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap ekspor Kepri dengan share rata-rata sebesar 15% (2011-2017). Namun, kinerja ekspor sektor ini mengalami penurunan sejalan dengan pelemahan harga migas dunia ditandai dengan penurunan nilai ekspor sejak 2013-2017. Industri ini merupakan *industry supporting migas* sehingga sangat terpengaruh terhadap fluktuasi harga migas dunia.

- d. Kondisi inflasi di Provinsi Kepulauan Riau selama 3 (tiga) tahun terakhir dan kelompok/komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi`

Rata-rata Inflasi Tahunan Kepri selama 3 tahun terakhir (2015-2017) sebesar 3,98% (yoy) relative terjaga masih dalam kisaran target inflasi namun masin lebih tinggi dibandingkan angka inflasi nasional dengan rata0rata 3 tahun terakhir sebesar 3,33% (yoy). Kondisi inflasi terkini semakin membaik dengan angka inflasi tahunan Kepri untuk September 2018 sebesar 3,18% (yoy).

Inflasi Tahunan (% yoy)

Ket	2015	2016	2017	Rata-rata	Sep-18
Kepri	4,4	3,53	4,02	3,98	3,18
Nasional	3,35	3,02	3,61	3,33	2,88

Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi terbesar bervariasi tiap tahunnya, namun bila melihat frekuensi terbanyak dalam 3 tahun terakhir (2015-2017) yaitu tariff angkuta udara yang biasanya dipengaruhi kenaikan harga saar faktor musiman. Sementara untuk bahan makanan dipengarugi komoditas bawang merah dan cabai merah. Sementara di posisi September 2018, komoditas yang menyumbang terbesar antara lain beras yang naik di awal 2018.

- e. Upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas pasokan di Kepulauan Riau

Melakukan penguatan koordinasi TPID dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau melalui rapat rutin dan high level meeting untuk membahas fluktuasi harga dan membuat rekomendasi berupa langkah-langkah pengendalian inflasi antara lain: pengawasan persediaan kebutuhan pokok di tingkat distributor dan pemantauan harga, penyelenggaraan operasi pasar dan pasar murah terutama pada waktu harga mulai meningkat, penguatan ketahanan pangan pada semua kabupaten kota dengan konsep pertanian organik terpadu termasuk gerakan pemanfaatan lahan kosong (*urban farming* di kawasan pemukiman dan sekolah-sekolah khusus Batam dan Tanjungpinang), dengan prioritas komoditas penyumbang inflasi antara lain cabai rawit, sayuran serta pengembangan *pilot project* padi organik di Kabupaten Lingga, Anambas, Natuna dan Karimun.

Mendorong TPID untuk membangun kerjasama antardaerah (antara lain dengan Kabupaten Sleman dan Kulon Progp, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara) untuk menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi.

Mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan BUMD sebagai agen distribusi kepada masyarakat dan dapat berperan untuk memperpendek jalur distribusi sehingga menghemat biaya logistic.

Membangun klaster pertanian terintegrasi sebagai model percontohan – pengembangan ketahanan pangan serta mereplikasinya pada daerah lain.

Melakukan komunikasi di media untuk menyampaikan himbauan terkait pengendalian inflasi kepada masyarakat umum.

3. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau

- a. Kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Kepulauan Riau yang diatur dan diawasi oleh OJK yang meliputi:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

- a) Perkembangan Kinerja Sektor Perbankan (Bank Umum Konvensional dan Syariah dan BPR/BPRS)

Aset Rp60,946 M turun 1,46% (ytd), Kredit Rp40.059 M turun 0,02% (ytd), LDR 77,62%, DPK Rp51.606 M turun 1,29% (ytd), NPL 3,38%.

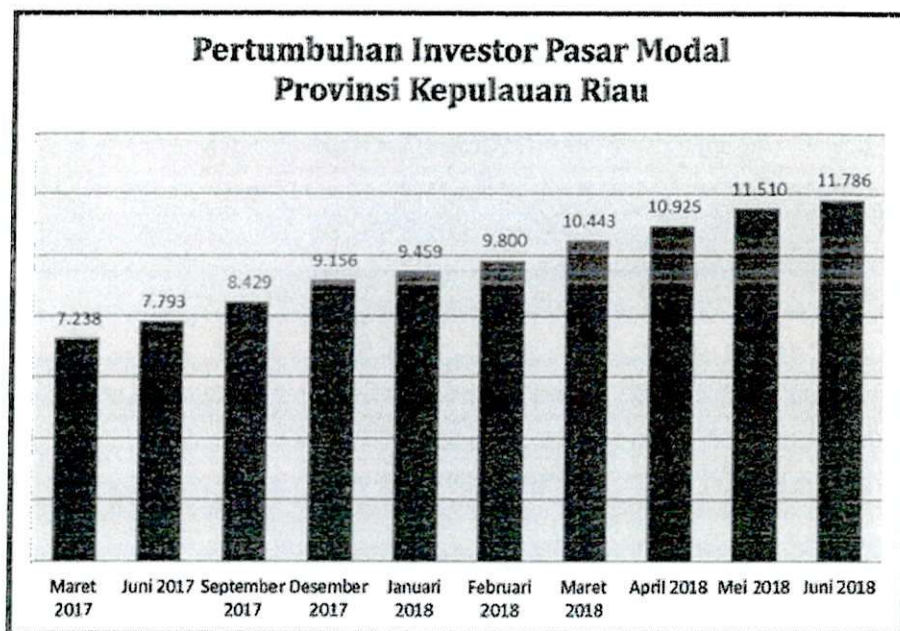
- b) Perkembangan Kinerja Sektor Perbankan Bank Umum dan Syariah

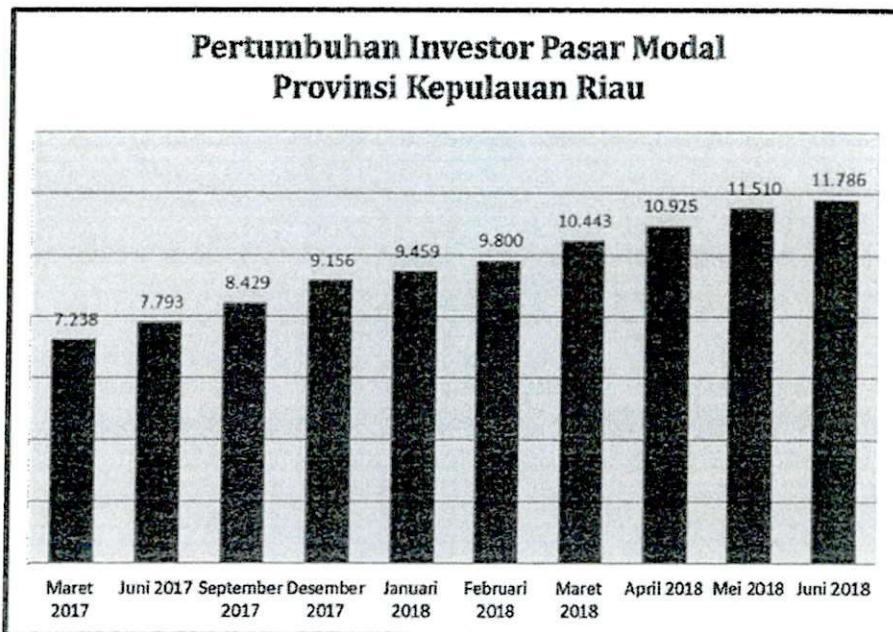
Aset Rp54.187 M turun 1,9% (ytd), Aset Rp54.187 M turun 1,9% (ytd), LDR 76,14%, DPK Rp46.096 M turun 2,19% (ytd), NPL 2,91%.

- c) Kinerja Perkembangan Sektor Perbankan BPR dan BPRS – Juni 2018

Aset BPR/S Rp6.759 M naik 2,14% (ytd), Kredit Rp4.961 M naik 2,40% (ytd), LDR 90%, DPK Rp5.509 M naik 6,93% (ytd), NPL/NPF 6,75% Naik 1,12%.

2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;





3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

a) Perusahaan Pembiayaan

Total Piutang Pembiayaan Rp. 2.748 Miliar (Naik 13,11% ytd) NPF 3,46%, Total Premi Asuransi Nelayan Rp 0,06 Miliar (turun 97,39% ytd) 395 Nasabah, Premi Asuransi Umum dan Jiwa Rp1.167 Miliar (Naik 242,65% yoy) dan Klaim Rp733,57 Miliar (Naik 34,14% yoy), Total Asuransi Ternak Sapi Rp 14,96 Juta (Naik 41,13% ytd) | 19 Nasabah.

b) Dana Pensiun

Total Aset Dana Pensiun Rp8,14 Miliar Investasi Rp7,80 Miliar (Turun 6,02% ytd)

c) Lembaga Penjaminan

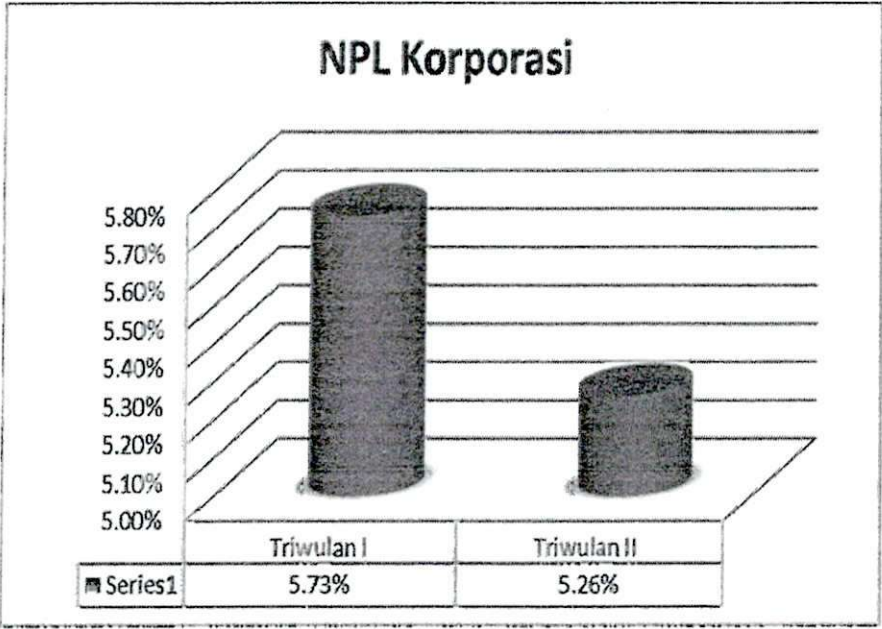
Total Penjaminan UMKM Rp149,82 Miliar (Naik 94,98% ytd) Pokok Kredit/Pembiayaan Rp180,47 Miliar

d) Pegadaian

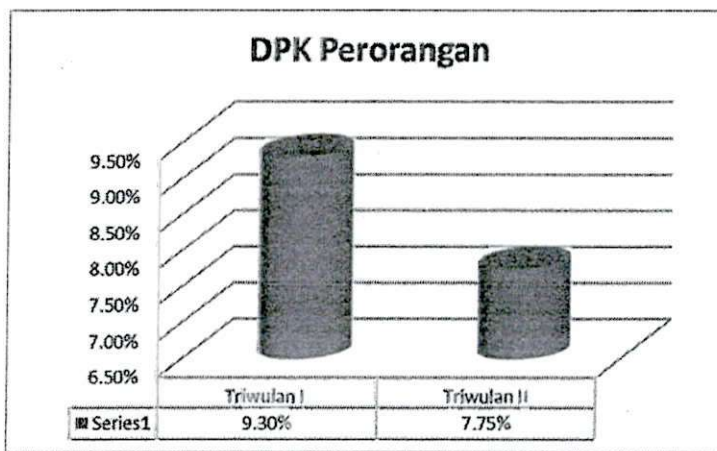
Total Penyaluran Kredit/Pembiayaan Rp693,64 Miliar (naik 223,39% ytd) | 149.056 Nasabah (naik 124,32% ytd).

- b. Ketahanan sistem keuangan di Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi sektor korporasi, UMKM, maupun rumah tangga

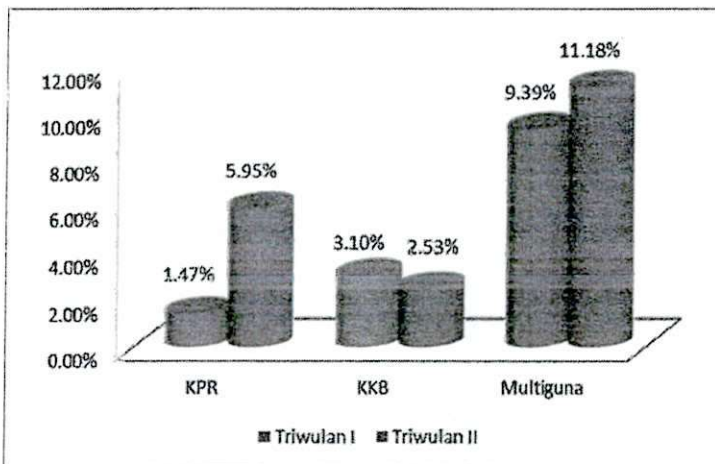
Perbaikan ekonomi Kepri pada triwulan II 2018 berdampak kepada ketahanan sektor korporasi, tercermin dari tingkat kredit bermasalah yang menurun dimana NPL sektor korporasi membaik sebesar 0,47% dari 5,73% pada Triwulan I 2018 menjadi 5,26% pada Triwulan II 2018. Total penyaluran kredit pada Sektor Korporasi sebesar Rp14.935 Miliar.



Ketahanan sektor rumah tangga relatif stabil pada triwulan II 2018. Berdasarkan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perseorangan tumbuh melambat sebesar 7,75% dibanding pada triwulan II 2018 sebesar 9,30%.

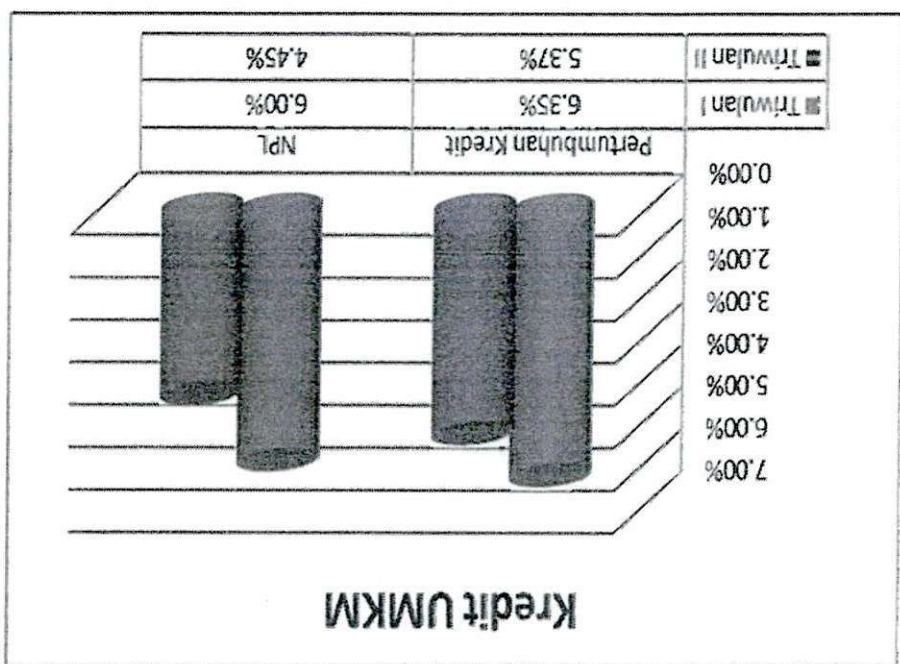


Penyaluran KPR dan Kredit Multiguna mencatat pertumbuhan masing-masing sebesar 5,95% (yoy) dan 11,18% (yoy) atau lebih baik dibanding Triwulan I 2018. Sedangkan kredit Kendaraan Bermotor (KKB) tumbuh melambat sebesar 2,53% dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,10%.



Kredit UMKM berdasarkan lokasi proyek pada Triwulan II 2018 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 0,98% dari 6,35% pada Triwulan I 2018 menjadi 5,37% pada Triwulan II 2018, dimana rasio NPL pada Triwulan I 2018 adalah sebesar 6,00% dan rasio NPL pada Triwulan II 2018 adalah sebesar 4,45%.

- c. Upaya yang sudah dilakukan agar peningkatan penyaluran kredit oleh Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya tidak memberikan dampak negatif bagi perkembangan intermediasi Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya maupun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau.
- 1) Perbankan
 - Peningkatan Pengawasan Off-site, Peningkatan Kualitas SDM (Capacity Building), Koordinasi dengan Stakeholder terkait penyaluran KUR, dan Pemberian Izin Operasional BPR/S dan Bank Umum.
 - 2) Lembaga Keuangan Lainnya
 - a) Melakukan pengawasan terhadap IKNB.
 - b) Melakukan kegiatan Sosialisasi/Seminar Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah kepada Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah.
 - c) Melakukan kegiatan Sosialisasi/Seminar Pergadaian, Jamkrida, Fintech, BPJS, LKM dan IKNB lainnya kepada Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah.



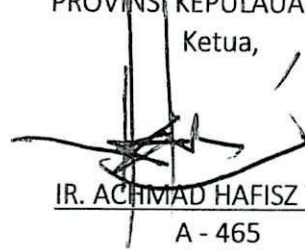
- d) Pemberian izin operasional Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan, Asuransi dan Pergadaian Swasta.
- e) Mendorong pembentukan Jamkrida Prov. Kepri melalui Focus Group Discussion (FGD)

C. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh didalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta menindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi XI DPR RI.

Jakarta, OKTOBER 2018
TIM KUNJUNGAN KERJA
KOMISI XI DPR RI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ketua,



IR. ACHMAD HAFISZ TOHIR
A - 465



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI

MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2018-2019

KE PROVINSI JAWA TIMUR

25 – 27 OKTOBER 2018

A. PENDAHULUAN

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019, Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 sampai dengan 27 Oktober 2018. Sesuai dengan ruang lingkup tugasnya di bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional dan perbankan, Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah serta instansi-instansi Pemerintah Pusat dan mitra kerja Komisi XI DPR RI yang ada di daerah.

Komisi XI DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank yang bermitra kerja dengan Pemerintah.

Sebagaimana kita ketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu lembaga negara yang bebas dan mandiri yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Dalam menjalankan aktifitasnya, BPK masih menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang selama ini menjadi dasar pelaksanaan tugas BPK. Namun demikian, Undang-Undang tersebut belum dapat mengakomodasi kebutuhan BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Lahirnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 tentang BPK, dan sekaligus untuk melaksanakan Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada saat lahirnya Undang-Undang tersebut, kedudukan dari BPK menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu, BPK diharapkan

akan menjadi lembaga pemeriksa eksternal yang bebas dan mandiri. Namun demikian, dalam perkembangannya, Undang-Undang BPK tersebut ternyata masih perlu disempurnakan karena masih terdapat beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan dari Undang-Undang BPK tersebut antara lain mengenai penghitungan kerugian negara, sifat kolektif kolegial dari keanggotaan BPK, termasuk mekanisme pemilihan Anggota BPK. Selain itu juga, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pernah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi mengenai syarat dan mekanisme pengisian jabatan anggota BPK pengganti. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tegas menyatakan bahwa pemilihan Anggota BPK harus untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, sehingga ada kekosongan hukum dalam pengaturannya yang mengharuskan pergantian antarwaktu.

Oleh karena itu, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini dan perlu diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang yang baru guna mendukung terwujudnya suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beberapa materi penting dalam perubahan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan ini, yaitu mengenai penentuan formasi dan rekrutmen Pelaksana BPK, penetapan struktur organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK, penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara/ penghitungan kerugian negara, dan pengaturan pengisian kekosongan Anggota BPK serta masa jabatan Pimpinan BPK.

Adapun susunan keanggotaan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Tugas Nomor 102/ST/K.XI/DPRRI/X/2018 adalah sebagai berikut:

No	No. Anggota	Nama Anggota	Fraksi	Keterangan
1	365	Ir. H. Soepriyatno	F. P. GERINDRA	<u>Ketua Tim</u> Wakil ketua Komisi
2	189	Indah Kurnia	F.PDI-P	Anggota

3	196	Dra. Eva Kusuma Sundari, M.A., MDE	F.PDI-P	Anggota
4	195	Andreas Eddy Susetyo, MM	F.PDI-P	Anggota
5	320	Edison Betaubun, S.H., M.H.	F.P. GOLKAR	Anggota
6	283	H. Mukhamad Misbakhun	F.P. GOLKAR	Anggota
7	379	Ir. Sumail Abdullah	F. P. GERINDRA	Anggota
8	358	Ir. H. Harry Poernomo	F. P. GERINDRA	Anggota
9	379	Wilgo Zainar	F.P. DEMOKRAT	Anggota
10	441	Tutik Kusumawardhani	F.P. DEMOKRAT	Anggota
11	51	H. Alamuddin Dimyati Rois	F.PKB	Anggota
12	12	Nur Chayati	F. PKB	Anggota
13	100	H. Ecky Awal Mucharam	F.PKS	Anggota
14	511	Dra. Elviana, M.Si	F.PPP	Anggota
15	27	Johnny G. Plate, SE	F.P. NASDEM	Anggota
16		Sri Mulyani, S.H.		Kabagset Komisi XI
17		Komariah Mahmud, S.Sos		Staf
18		Oki Ganjar Ristawan, S.E.		Staf
19		Nyoman Indra Juarsa		Tenaga Ahli
20		Titis Rudolf Saputro		PTT
21		Siti Nadiyah		Media Cetak
22		Zikri Amin		TV Parlemen

B. INFORMASI DAN TEMUAN

1. Universitas Airlangga

Pasal 4A

Anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat kolektif kolegial

Catatan:

- a) Reference Putusan Mk. No. 49/PUU-XI/2013
- b) Apa yang dimaksud “keputusan” dalam hal ini. Apakah keputusan tersebut dikategorikan sebagai KTUN? (referensi Putusan Kasasi 466K/TUN/2017)
- c) Apa yang dimaksud dengan “setiap keputusan, apakah keputusan dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang atau termasuk dalam tata kelola kelembagaan. Bila dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang, jenis-jenis keputusan apa yang dihasilkan? Termasuk dalam hal pembentukan peraturan, apakah hal ini termasuk pula “kolektif-kolegial”.
- d) Batasan kolektif kolegial “hanya pengambilan keputusan” mempunyai hubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang. Apakah setiap pelaksanaan tugas dan wewenang membutuhkan keputusan, maka berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang, termasuk dalam pemberian mandate (Pasal 11A RUU BPK).

Pasal 11A

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, BPK dapat memberi mandat kepada Anggota BPK dan/atau Pelaksana BPK.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 11A diatur dengan Peraturan BPK.

Catatan:

- a) Tata cara pelimpahan wewenang (termasuk mandat) secara umum tunduk pada UU AP.
- b) Pengaturan pemberian mandate tunduk pada ciri-ciri dari mandate.

- c) Referensi Putusan PTUN Jambi 20/G/2016/PTUN.JBI, Putusan PT TUN Medan 85/B/2017/PT.TUN.MDN dan Putusan Kasisi 446 K/TUN/2017.
- d) Implikasi tata cara pengaturan supporting pada kelembagaan (pelaksana, auditor) dan tata naskah.

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon Anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasl 4 ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;**
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;**
- c. berdomisili di Indonesia;**
- d. memiliki integritas moral dan kejujuran;**
- e. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- f. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;**
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;**
- h. sehat jasmani dan rohani;**
- i. berusia paling rendah 42 (empat puluh dua) tahun dan paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun pada waktu mendaftar;**
- j. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;**
- k. memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dalam bidang ekonomi, hukum, atau administrasi negara;**

catatan:

- a) karakter pengisian jabatan bagi lembaga yang independen adalah berbasis pada non partisan dan keahlian. Maka perubahan Pasal 15 dalam RUU telah mendorong kearah independen dan keahlian.

- b) Khusus mengenai ketentuan “paling singkat telah 2 (dua) tahun tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik”, seharusnya paling singkat tidak 2 tahun:
- 1) Hakikat pengisian jabatannya adalah proses politik.
 - 2) Hubungan kelembagaan BPK dan DPR.
 - 3) Bandingkan dengan Pasal 72 UU Pemilu.

Pasal 14

- (1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- (2) Dalam rangka pemilihan Anggota BPK oleh DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. Paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPK; atau
 - b. Paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal kekosongan jabatan atau penetapan pemberhentian anggota BPK dengan hormat atau pemberhentian anggota BPK tidak dengan hormat.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
- (5) Panitia Seleksi melakukan pengumuman, pendaftaran, seleksi, dan penilaian calon anggota BPK.
- (6) Hasil seleksi dan penilaian calon Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Presiden.
- (7) Presiden menyampaikan usulan calon anggota BPK kepada DPR untuk dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Catatan:

- a) Jabatan dengan karakteristik “independen dan *expertise*” harus dilakukan secara terbuka dan diseleksi oleh mereka yang *expertise* juga. Sehingga pengguna (DPR) diasumsikan akan “puas” dengan hasil panitia seleksi atas basis *expertise* dan pemenuhan syarat lainnya (pasal 13).

- b) Atribusi UUD 1945 Pasal 23F ayat (1): Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
Maka dari konstruksi Pasal tersebut, siapa yang membentuk Panitia Seleksi? DPR atau Presiden (Lihat Konstruksi Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (6)).
- c) Perlu diatur sifat dari keputusan hasil panitia seleksi (misalnya harus menggunakan/mengikat atau final).
- d) Selain unsur panitia seleksi, misalnya bidang keahlian.
- e) Tetap perlu diatur tentang partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen anggota BPK (Lihat Pasal 14 ayat 3).

Pasal 14A

- (1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam rangka pemilihan anggota BPK.**
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hasil seleksi dan penilaian calon Anggota BPK yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR.**

Pasal 14B

Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota BPK sesuai dengan jumlah anggota BPK yang dibutuhkan, paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya hasil seleksi dan penilaian calon Anggota BPK yang disampaikan oleh Presiden.

Catatan:

- a) Masa jabatan anggota BPK 5 (lima) tahun. (referensi Putusan MK 13/PUU-XI/2013).
- b) Referensi pada beberapa lembaga negara lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi Pasal 22 dan Pasal 3 ayat (3).
- c) Maka Pembatasan perlu dilakukan terhadap masa jabatan ketua dibatasi tidak dalam satu masa jabatan anggota, alasan: *basic expertise*, kolektif-kolegial.
- d) Model evaluasi berpotensi menimbulkan konflik (siapa yang melakukan evaluasi, parameter, metode dan akibat hukum)

Pasal 30

- (1) Untuk menegakkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik BPK yang keanggotaannya terdiri dari Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi.
- (1a) Keanggotan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari unsur-unsur profesi dan akademisi lebih banyak dari unsur Anggota BPK.
- (2) Majelis Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak undang-undang ini berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata cara persidangan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK diatur dengan Peraturan BPK.

Catatan:

- a) Untuk keseimbangan pada pemeriksaan, sudah seharusnya ditegaskan anggota BPK tidak lebih banyak dari unsur lainnya.
- b) Bahkan bila dipandang auditor adalah profesi maka unsur profesi dan unsur akademisi atau masyarakat sipil yang diperlukan

C. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh didalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta tindak lanjut dalam rapat-rapat Komisi XI DPR RI.

Jakarta, 30 OKTOBER 2018
TIM KUNJUNGAN KERJA
KOMISI XI DPR RI
PROVINSI JAWA TIMUR
Ketua,



Ir. H. Soepriyatno
A - 365



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA RESES ANGGOTA KOMISI XI DPR RI
MASA SIDANG TAHUN SIDANG KE PROPINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 1 S.D. 5 NOVEMBER 2018**

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI serta Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 106/ST/K.XI/DPRRI/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Penugasan Kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Kelompok pada Reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019, Komisi XI DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja ke Propinsi Jawa Timur.

Adapun susunan anggota Tim Kunker Reses ke Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

NO	NO. ANGG	NAMA ANGGOTA	FRAKSI	KET.
1.	183	Ir. M Prakosa	PDIP	Ketua Tim
2.	189	Indah Kurnia	PDIP	Anggota
3.	196	Dra. Eva Kusuma Sundari	PDIP	Anggota
4.	195	Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM	PDIP	Anggota
5.	320	Edison Betaubun, SH., MH.	Golkar	Anggota
6.	283	H. Mukhamad Misbakhun, SE.	Golkar	Anggota
7.	267	Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si	Golkar	Anggota
8.	366	Ir. Sumail Abdullah	Gerindra	Anggota
9.	379	H. Willgo Zainar	Gerindra	Anggota
10.	471	Ahmad Najib Qudratullah, SE.	PAN	Anggota
11.	51	Alamuddin Dimyati Rois	PKB	Anggota
12.	89	H. Refrizal	PKS	Anggota
13.	544	H. MZ. Amirul Tamim, M.Si.	PPP	Anggota
14.	27	Johnny G. Plate, SE.	Nasdem	Anggota

II. INFORMASI YANG DITEMUKAN

A. KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

1. Penerimaan BC Jatim I s.d. 29 Okt 2018 jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 13,9%.
2. Penerimaan BC Jatim II s.d. 29 Okt 2018 jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 8,9%.
3. Kendala yang mempengaruhi peningkatan penerimaan
 - Bea masuk/ bea keluar : Restitusi/pengembalian dari fasilitas dibidang kepabeanan dan cukai sebagai faktor pengurang penerimaan
 - Cukai MMEA : 1. Pergeseran selera konsumen ke produk perusahaan lain diluar wilayah Jatim; 2. Berkurangnya penyerapan produk MMEA di beberapa kota wisata yang terdampak bencana alam
 - Cukai HT: Meskipun terdapat penurunan persentase rokok ilegal pada tahun 2018 hingga menjadi 7,04% namun :
 1. pengetahuan masyarakat tentang rokok ilegal masih perlu ditingkatkan;
 2. terdapat resistensi masyarakat terhadap penegakan ketentuan di bidang cukai di daerah rawan BKC ilegal;
 3. berkembangnya modus pelanggaran dan jaringan dari tahun ke tahun.
4. Penyerapan Anggaran BC JATIM I

Tahun	Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
2016	PAGU	9.660.526.000	7.882.711.000	6.729.493.000
	REALISASI	8.571.284.838	7.318.733.293	6.612.289.019
	SALDO	1.089.241.162	563.977.707	117.203.981
2017	PAGU	8.657.278.000	9.485.364.000	1.263.214.000
	REALISASI	8.657.097.993	8.781.164.020	1.172.505.097
	SALDO	180.007	704.199.980	90.708.903
s.d. OKT 2018	PAGU	9.772.175.000	10.713.811.000	2.480.278.000
	REALISASI	8.657.017.114	8.160.835.793	442.939.571
	SALDO	1.115.157.886	2.552.975.207	2.037.338.429

Kendala Belanja Pegawai:

- Mutasi pegawai menyebabkan jumlah pegawai tidak pasti
- Pegawai pensiun menyebabkan jumlah pegawai berkurang

Kendala Belanja Barang & Modal:

- Pelaksanaan program efisiensi anggaran

- Pemotongan anggaran
- Pembatalan pemotongan anggaran

5. Penyerapan Anggaran BC JATIM II

Tahun	Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
2016	PAGU	22,470,578,000	23,354,469,000	6,052,987,000
	REALISASI	21,097,198,607	22,564,236,627	6,039,322,649
	SALDO	1,373,379,393	790,232,373	13,664,351
2017	PAGU	22,587,091,000	29,856,163,000	3,792,827,000
	REALISASI	21,539,583,604	27,400,335,640	3,612,911,792
	SALDO	1,047,507,396	2,455,827,360	179,915,208
s.d. OKT 2018	PAGU	22,150,126,000	32,449,716,000	11,567,053,00
	REALISASI	22,323,096,166	21,608,869,847	5,211,977,719
	SALDO	(172,970,166)	10,840,846,153	6,355,075,281

Kendala Belanja Pegawai : Banyaknya pegawai baru yang masuk sebagai akibat kenaikan tipe Kantor dari Pratama ke Madya

Kendala Belanja Barang & Modal : Pelaksanaan Program Efisiensi Anggaran
Pembatalan Pemotongan Anggaran

6. Upaya Optimalisasi Penerimaan:

- Melalui program PIBT, PCBT, dan meningkatkan efektifitas serta intensitas penindakan kepabeanan dan cukai;
- Meningkatkan pelayanan dan percepatan perizinan, simplifikasi persyaratan perizinan dan percepatan pelayanan.
- Joint Program antara DJBC dan DJP. Sampai dengan saat ini potensi yang telah digali dari joint program DJBC dan DJP Jatim sebesar Rp 2,1 T, dan telah terealisasi Rp 438,1 M.
- Membangun komunikasi yang baik dengan pengguna jasa dalam menemukan solusi guna mendorong pertumbuhan usaha.

B. BANK INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

1. Perkembangan Inflasi

- Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, inflasi Provinsi Jawa Timur cukup terkendali. Inflasi tahun 2015 sebesar 3,08% (yoy), tahun 2016 sebesar 2,74% (yoy), serta tahun 2017 sebesar 4,04% (yoy).
- Sepanjang tahun 2018, inflasi Jawa Timur relatif terkendali dan berada di bawah rata-rata inflasi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Capaian inflasi Triwulan I 2018 sebesar 3,16% (yoy) lebih rendah dibandingkan rata-rata 3

tahun terakhir yang mencapai 4,54% (yoy). Inflasi pada Triwulan II 2018 sebesar 2,67% (yoy), juga lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi 3 tahun terakhir yang mencapai 4,79% (yoy). Demikian pula inflasi Triwulan III 2018 juga terkendali dengan pencapaian sebesar 2,75% (yoy) yang di bawah inflasi rata-rata 3 tahun terakhir sebesar 4,41% (yoy).

- Bila dibandingkan dengan capaian inflasi nasional, inflasi Jawa Timur selama kurun waktu tiga tahun terakhir juga menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2015, capaian inflasi Jawa Timur (3,08% yoy) lebih rendah dari capaian inflasi nasional (3,35% yoy). Pada tahun 2016 capaian inflasi Jawa Timur (2,74% yoy) lebih rendah dari capaian inflasi nasional (3,02% yoy). Sedangkan pada tahun 2017 capaian inflasi Jawa Timur (4,04% yoy) lebih tinggi dari capaian inflasi nasional (3,61% yoy), namun masih berada pada rentang target inflasi $4\% \pm 1\%$.

2. Perkembangan Uang Beredar

- Pada bulan September 2018 Uang Beredar dalam arti luas (M2) secara Nasional meningkat sebesar 6,7% (yoy) menjadi Rp. Rp5.606,3 triliun atau tumbuh 5,9% (yoy). Peningkatan pertumbuhan M2 didorong oleh komponen uang kuasi yang meningkat dari 5,2% (yoy) pada Agustus 2018 menjadi 6,3% (yoy) pada September 2018. Akselerasi pertumbuhan M2 sedikit tertahan oleh perlambatan pertumbuhan komponen M1 sebesar 8,2% (yoy) pada September 2018, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 8,6% (yoy).
- Cash inflow pada triwulan III-2018 tercatat sebesar Rp30,17 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 3,56% dibandingkan triwulan II-2018 yang tercatat sebesar Rp29,14 triliun, sedangkan cash outflow pada triwulan III-2018 sebesar Rp15,42 triliun, mengalami penurunan sebesar 57,72% dibandingkan triwulan II-2018 yang mencapai sebesar Rp36,46 triliun.
- Secara keseluruhan pada triwulan III-2018 aliran uang tunai menunjukkan net inflow yang dipengaruhi oleh meningkatnya setoran perbankan setelah berlalunya masa puncak penggunaan uang tunai oleh masyarakat pada momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1439H.

3. Perkembangan Nilai Tukar

- Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, nilai tukar Rupiah secara umum relatif terkendali. Sepanjang tahun 2016, rerata nilai tukar Rupiah terhadap

USD mencapai Rp13.300, mengalami apresiasi sebesar 0,72%. Sementara itu, nilai tukar Rupiah terhadap USD pada tahun 2017 mencapai tingkat Rp13.558 atau terdepresiasi sebesar 0,60% dibandingkan tahun sebelumnya.

- Sementara itu dalam beberapa bulan terakhir nilai tukar Rupiah mengalami tekanan yang cukup kuat seiring dengan kebijakan pengetatan moneter The Federal Reserve (The Fed) dan European Central Bank (ECB).
- Beberapa tekanan terutama yang bersumber dari Amerika Serikat tersebut mendorong depresiasi nilai tukar Rupiah ke level yang lebih rendah dalam pada tahun 2018. Sejak awal tahun hingga sekarang ini (Oktober 2018), rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap USD mencapai Rp14.169 atau terdepresiasi sebesar 5,90% dibandingkan nilai tukar rata-rata pada tahun 2017.

4. Perkembangan Sistem Pembayaran

- Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE) menunjukkan peningkatan signifikan. Peningkatan penggunaan APMK dan UE antara lain dipengaruhi oleh pelaksanaan beberapa program pemerintah terkait elektronifikasi dan keuangan inklusif seperti elektronifikasi jalan tol, program bantuan sosial non tunai, dan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.

- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim turut berperan aktif dalam menyukseskan program pemerintah tersebut, diantara sebagai berikut :

1) Program Elektronifikasi Jalan Tol

Sampai dengan September 2018, terdapat 6 (enam) ruas tol di Jawa Timur yang penetrasi transaksi non-tunai-nya telah mencapai 100%, sedangkan 4 (empat) ruas lainnya yang merupakan ruas baru di Jawa Timur penetrasi non tunai sudah lebih dari 90%.

2) Program Bantuan Sosial Non Tunai

Pada triwulan III-2018 terdapat 1,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), serta 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

3) Program Elektronifikasi Pemerintah Daerah

Perkembangan kesiapan elektronifikasi transaksi pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur sebagai berikut :

a) Penggunaan SP2D Online BPD Jatim

- b) Penggunaan internet banking corporate BPD Jatim oleh beberapa pemerintah kabupaten/kota
- c) Penerimaan Pajak Daerah secara Host to Host
- d) Penerimaan Retribusi Secara Non Tunai
 - Pemerintah Kota Surabaya melalui penggunaan alat parkir meter di Kawasan Balai Kota dan Taman Bungkul,
 - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui e-retribusi pasar.
- e) Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) Pemerintah Kota Surabaya juga akan dilakukan secara non tunai, melalui integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPS) dengan internet banking Bank Jatim.

5. Prospek perekonomian Provinsi Jawa Timur di masa yang akan datang :

- Provinsi Jawa Timur sebagai penyumbang perekonomian terbesar kedua setelah DKI Jakarta, diperkirakan masih akan tumbuh dengan laju pertumbuhan yang stabil di masa yang akan datang, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan masih akan menunjukkan tren positif.
- Pada tahun 2018 dan 2019, perekonomian Provinsi Jawa Timur diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,6% - 5,8% dengan dorongan utama yang bersumber dari kinerja konsumsi swasta dan investasi. Proyeksi tersebut mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan domestik yang kemungkinan berdampak pada realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

Perkembangan yang mendukung optimisme:

- Prospek harga komoditas yang cukup baik (mendorong kinerja perekonomian Kawasan Timur Indonesia yang masih bergantung pada ekspor komoditas),
- Dampak perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok dapat berpotensi mendorong kinerja perdagangan Indonesia termasuk Jawa Timur apabila dimanfaatkan dengan baik.
- Potensi pengetatan moneter berbagai negara tidak dilaksanakan terus-menerus dalam jangka panjang dan mendorong kembali arus masuk investasi ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

6. Sektor-sektor yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperkirakan masih bersumber dari industri pengolahan; perdagangan besar dan

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pertanian, kehutanan dan perikanan; konstruksi; serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

7. Langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam memperkuat peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah dalam mendukung perekonomian dan mendorong terciptanya stabilitas harga di daerah, yaitu:

- Mengacu pada sembilan (9) fungsi utama Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia, peran KPwDN Bank Indonesia dalam mendukung perekonomian didorong oleh pelaksanaan fungsi strategic advisory serta fungsi terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Pelaksanaan fungsi strategic advisory dilaksanakan dalam rangka memperkuat peran Bank Indonesia dalam upaya pengembangan dan peningkatan kinerja perekonomian daerah. Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan mencakup :
 - Pendalaman profil dan permasalahan di Provinsi Jawa Timur secara komprehensif;
 - Evaluasi dan analisis perkembangan perekonomian dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan Bank Indonesia melalui Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR), Laporan Perkembangan Inflasi Daerah, penyusunan materi Rapat Evaluasi Ekonomi dan Keuangan Daerah (REKDA);
 - Memberikan advisory kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pengendalian inflasi dan stabilitas sistem keuangan (SSK) di daerah serta kebijakan perekonomian daerah yang ditetapkan oleh Pemda melalui penerbitan Surat Rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur tiap triwulan; serta
 - Memfasilitasi penyelesaian permasalahan ekonomi yang memerlukan solusi dari Pemerintah Pusat.
- Pelaksanaan fungsi terkait pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan kinerja perekonomian daerah, antara lain berupa pengembangan klaster-klaster komoditas terpadu

8. Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Bank Indonesia dan perbankan Provinsi Jawa Timur dalam rangka peningkatan kualitas dan pemenuhan permintaan uang rupiah sesuai kebutuhan.

- Mengacu pada Pasal 20 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia serta Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia merupakan

satu-satunya lembaga yang berwenang dalam Pengelolaan Uang Rupiah. Salah satu tahapan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan oleh KPw BI Provinsi Jawa Timur adalah pengedaran uang Rupiah.

• Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Uang Layak Edar (ULE) dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai maka beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan Volume Kegiatan Kas Titipan Bank Indonesia

Saat ini terdapat 3 (tiga) kas titipan di wilayah kerja KPw BI Prov Jatim yang terletak di Kab. Bojonegoro, Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep.

2) Bekerjasama dengan TNI AL dalam melakukan Kegiatan Ekspedisi Layanan kas di Kepulauan

Kegiatan ekspedisi layanan kas di Kepulauan merupakan kerjasama KPw BI Prov.Jatim dengan TNI AL, yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 dengan tujuan pulau-pulau Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T).

3) Bekerjasama dengan Perbankan dalam Program BI Jangkau

Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan BI Jangkau dalam rangka distribusi uang NKRI hingga ke pelosok negeri

4) Melaksanakan Kegiatan Kas Keliling oleh Bank Indonesia maupun Melalui Kerjasama dengan Perbankan.

Bank Indonesia melaksanakan kegiatan kas keliling secara rutin di beberapa tempat yaitu : Mojokerto, Mojosari, Jombang, Lamongan, Tuban, Gresik, Sidoarjo dan Krian.

5) Menambah Jumlah Hari Penukaran menjadi Senin – Kamis

Pelayanan penukaran uang rusak, cacat dan uang dicabut dari peredaran dilaksanakan setiap hari Senin s.d Kamis untuk menjaga agar uang yang beredar di masyarakat dalam kondisi baik.

9. Terkait Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Jawa Timur dalam rangka melakukan pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Timur dan kendalanya.

➤ Bank Indonesia sebagai anggota TPID Jawa Timur secara berkelanjutan terus melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait untuk memastikan kestabilan harga di Provinsi Jawa Timur. Dalam upaya menjaga kestabilan harga tersebut, Bank Indonesia melakukan sejumlah program/kegiatan, yang mengacu pada 5 (lima) pilar pengendalian inflasi Jawa Timur, GADIS REMO KANGEN

(Penguatan Kelembagaan, Produksi, Distribusi & Konektivitas, Regulasi & Monitoring, Kajian & Informasi serta Pengendalian Ekspektasi)

- Selain program tersebut diatas, program kerja KPwDN Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur terkait pengembangan klaster UMKM juga difokuskan pada pengendalian inflasi volatile foods serta stabilitas harga
- TPID Provinsi Jawa Timur juga telah memiliki roadmap pengendalian inflasi sejak tahun 2016 yang memuat program pengendalian inflasi untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai upaya menjaga inflasi pada sasaran targetnya.
- Dalam menjaga terkendalinya inflasi Jawa Timur pada sasaran targetnya, terdapat tantangan spesifik dan struktural, antara lain : inflasi inti, inflasi volatile food dan inflasi administered price
- Dalam mengatasi tantangan struktural tersebut diatas, Bank Indonesia bersama seluruh anggota TPID Provinsi Jawa Timur memiliki program pengendalian inflasi antara lain :
 - a. Pembentukan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) dan terintegrasinya data dan manajemen tata niaga antar SPR untuk mempermudah pemantauan dan distribusi produk peternakan (daging sapi).
 - b. Terbentuknya buffer stock pangan di Kota/Kabupaten melalui BUMD/BUMDes Pangan untuk menyerap surplus produksi maupun memperkuat kerjasama antar daerah.
 - c. Perbaikan dan penambahan infrastruktur pengairan (waduk dan irigasi) dan peningkatan dukungan teknologi pertanian.
 - d. Terbentuknya sistem distribusi dan logistik yang efektif dan efisien.
 - e. Tersedianya early warning system (EWS) melalui Big Data Inflasi secara otomatis.

C. BPK JAWA TIMUR

1. Hasil Audit/Pemeriksaan yang Dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa TImur

- Untuk memantau kegiatan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Timur BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan dua jenis pemeriksaan, terdiri dari Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja yang mencakup pemeriksaan di sektor Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan, dan Pengelolaan Dana Desa

➤ Pengawasan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada pegawai yang melaksanakan tugas pemeriksaan antara lain :

- a. Pelaksanaan supervisi di lapangan oleh Penanggungjawab Pemeriksaan (Kepala Perwakilan/Kepala Subauditorat) dan Pengendali Teknis;
 - b. Reviu Pengendalian Mutu oleh Inspektorat Utama BPK;
 - c. Biaya akomodasi Tim Pemeriksa diselesaikan oleh Kantor Perwakilan;
 - d. BPK Perwakilan Jawa Timur berhasil memperoleh Predikat WBK dari Kementrian PAN dan RB pada tahun 2015 karena kami dinilai dapat:
 - i. Menginternalisasi budaya integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi budaya yang melekat dalam setiap individu;
 - ii. Memberikan supervisi dan coaching terus menerus untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - iii. Melakukan komunikasi hasil pemeriksaan kepada auditee agar manfaat hasil pemeriksaan dirasakan Pemda;
 - iv. Melakukan pengelolaan pembangunan zona integritas dengan konsisten dan komitmen kuat;
 - v. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Jawa Timur telah dilengkapi SOP;
 - vi. Melakukan pengelolaan dan pengembangan pegawai;
 - vii. Menegakkan integritas melalui pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan pengaduan masyarakat, dan penerapan whistle blowing system untuk meminimalisir adanya penyimpangan.
 - e. Pembinaan oleh Pimpinan Pusat maupun di internal Perwakilan Jawa Timur. Pembinaan oleh Pimpinan selama tahun 2018, berupa
 - i. Pengarahan Anggota V dan Tortama KN V
 - ii. Pengarahan Kepala Perwakilan sebelum melaksanakan tugas pemeriksaan
 - iii. Pengarahan Kepala Subauditorat di masing-masing Subauditorat
2. Langkah dan pembinaan dalam rangka memperbaiki kinerja Laporan Keuangan di daerah baik pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
- a. Memberikan Rekomendasi kepada Pemda melalui LHP BPK;
 - b. Melaksanakan Pemantauan tindak lanjut dengan cara pembahasan, dan melaksanakan diskusi-diskusi percepatan dan penerapan Sistem Informasi Pembahasan Tindak Lanjut (SiPTL);
 - c. Audiensi Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur.

- d. Menerima konsultasi dari DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 - e. Melaksanakan pemeriksaan PDDT dan Kinerja setiap semester II;
 - f. Hadir sebagai narasumber terkait pengelolaan keuangan dan kualitas pemeriksaan
 - g. Membuka diri berdiskusi dengan Pemerintah Daerah untuk upaya-upaya perbaikan LKPD di Wilayah Provinsi Jawa Timur;
 - h. Melaksanakan kegiatan Media Workshop untuk menjaring aspirasi dari stakeholder.
 - i. Melaksanakan Dialog Terbuka dengan narasumber Pimpinan BPK dengan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Kediri
3. Upaya dan usaha BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan empowering terhadap pegawai Pemerintah Daerah agar Laporan Keuangan Daerah menjadi lebih baik adalah:
- a. Audiensi Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur
 - b. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dengan menyampaikan penekanan-penekanan untuk pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada saat entry dan exit briefing pelaksanaan pemeriksaan di Perwakilan Jawa Timur.
4. Saran dan pandangan Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur kepada Komisi XI DPR RI sebagai masukan perbaikan kinerja dan pengawasan mendatang
- Pemerintah khususnya melalui Inspektorat agar memberikan perhatian lebih serius terhadap upaya menindaklanjuti hasil pemeriksaan;
 - BUMD → Pemerintah harus memperbaiki pola pembinaan dan pengelolaan BUMD sesuai tujuan pendirian BUMD, melalui penyusunan seperangkat peraturan perundang-undangan yang lengkap dan terintegrasi disertai dengan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan pengelolaan BUMD sebagai acuan bagi Pemda dan BUMD dalam rangka memperbaiki pola pembinaan dan pengelolaan BUMD.

D. BPKP JAWA TIMUR

1. Pelaksanaan pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPKP terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Provinsi Jawa Timur serta informasi terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah sehingga pemanfaatan anggaran dapat berlangsung tepat guna.

2. Kebijakan pengawasan BPKP fokus pada empat hal yaitu (1). mengawal akuntabilitas program pembangunan nasional, (2). pengawasan yang mendorong peningkatan kontribusi ruang fiskal, (3). Pengawasan terhadap pengamanan aset-aset negara/daerah dan (4). membangun governance system yang baik.
3. Salah satu peran BPKP di daerah adalah meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Indikator kualitas akuntabilitas keuangan salah satunya ditunjukkan dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan. Sedangkan indikator kinerja adalah melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) serta evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).
4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2017 memperoleh Nilai A. Sedangkan untuk 38 kabupaten/Kota di Jatim sebanyak 33 kabupaten/Kota atau 87% memperoleh predikat B ke atas.
5. Dalam enam tahun terakhir (2012 sd. 2017) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur mengalami perkembangan dan atau peningkatan yang cukup signifikan, dimana dalam tahun 2011 hanya 11 Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK RI menjadi 35 Pemerintah Daerah dalam tahun 2017. Capaian ini telah melampaui target RPJMN 2015 – 2019.
6. Capaian tersebut diperoleh melalui transfer of knowledge kepada sumber daya manusia pengelola keuangan di tingkat pemerintah daerah dan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unit akuntansi pengelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta penyedia aplikasi teknologi informasi melalui penguatan governance system. Transfer of knowledge dimaksud dilakukan melalui kegiatan, antara lain:
 - a. Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

Asistensi/bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam tahun 2018 (sd. bulan September) meliputi:

1. Asistensi/Bimbingan Teknis Aplikasi SIMDA Keuangan

Sampai dengan bulan Oktober 2018, penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrua yang dikembangkan BPKP untuk pengelolaan keuangan daerah adalah sebanyak 20 Pemerintah Daerah.

2. Asistensi/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur atas asistensi/bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah melalui “Coaching Clinic” sampai dengan bulan Oktober 2018, pada 14 Pemerintah Daerah

b. Asistensi/Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah

Asistensi/Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur juga meliputi :

- Asistensi/Bimbingan Teknis Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)

Sampai dengan bulan Oktober 2018, penggunaan aplikasi SIMDA BMD yang dikembangkan oleh BPKP untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah adalah sebanyak 17 Pemerintah Daerah

c. Asistensi/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam tahun 2018 (sd. bulan Oktober 2018), asistensi/bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa dan implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) melalui asistensi/bimbingan teknis desa dilakukan sebanyak 29 kegiatan pada 21 Pemerintah Daerah

d. Asistensi/Bimbingan Teknis SIMDA Perencanaan

BPKP telah mengembangkan SIMDA Perencanaan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang diselaraskan dengan RKPD dan penatausahaannya. SIMDA perencanaan tersebut telah di implementasikan pada lima Pemda

7. Pelaksanaan audit, reviu, pemanfaatan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas pengeluaran daerah serta pembangunan dilakukan sepanjang ada mandatory menurut ketentuan perundangan undangan yang memperbolehkan BPKP melaksanakan kegiatan dimaksud dan atau ada permintaan dari pemerintah daerah. Kegiatan yang selama ini dilakukan oleh BPKP lebih banyak mengarah pada fungsi consultancy. Fungsi assurance utamanya dilaksanakan dalam konteks pembinaan dan atau early warning system bagi

pemerintah daerah. Fungsi ini dilakukan melalui audit kinerja pelayanan pemerintah daerah bidang kesehatan dan pendidikan, efisiensi pengeluaran negara/daerah melalui asistensi reviu atas probity audit pengadaan barang/jasa, verifikasi DAK reimbursement dan optimalisasi pendapatan asli daerah dan pemetaan pajak daerah serta evaluasi dana desa sebanyak 56 kegiatan.

8. Sesuai dengan amanat yang dibebankan dalam PP 60 Tahun 2008, BPKP melakukan kegiatan pengawasan terhadap akuntabilitas kebendaharaan umum negara atas permintaan dari BUN diantaranya melakukan monitoring dana transfer (Monitoring DAK Reimbursement). Kegiatan monitoring atas pengelolaan dana-dana tersebut oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah kegiatan yang telah dilakukan sebanyak 49 Kegiatan.
9. Kendala dalam pengelolaan DAK antara lain adanya perubahan peraturan PMK, antara lain PMK yang mengatur mengenai tahapan dan syarat transfer dana DAK dari RKUN ke RKUD, dimana beberapa pemda kurang aktif merespon perubahan ketentuan tersebut yang berdampak pada efektivitas hasil kegiatan DAK.
10. Sinergi telah dilakukan dengan beberapa inspektorat dalam bentuk asistensi atas kegiatan Reviu LKPD yang dilakukan oleh inspektorat serta asistensi atas permasalahan utama yang menyebabkan opini LKPD masih WDP. Pada umumnya permasalahan utama yang mempengaruhi opini adalah pengelolaan aset (Barang Milik Daerah). Khusus untuk dua pemerintah daerah yang memperoleh opini WDP dalam tahun 2017 telah dilakukan sinergi dengan APIP pemerintah daerah dalam bentuk pembuatan action plan peningkatan opini atas LKPD, sehingga diharapkan opini LKPD pemerintah dimaksud dalam tahun 2018 memperoleh opini WTP.
11. Saran dan pandangan dari kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang disampaikan kepada Komisi XI DPR RI demi perbaikan kinerja dan pengawasan mendatang, yaitu:
 - Pembiayaan Penugasan Pengawasan dan Pembinaan oleh BPKP.
Pembiayaan penugasan pengawasan dan pembinaan BPKP sampai saat ini belum dapat sepenuhnya dilakukan oleh BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, sehingga sebagian penugasan dilakukan atas dasar permintaan yang pembiayaannya menggunakan dana bantuan kedinasan dari mitra kerja baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun BUMN/BUMD.

Hal tersebut mengakibatkan kesulitan pada kegiatan perencanaan pengawasan termasuk penganggarannya karena jadwal permintaannya tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Oleh karena itu dalam kerangka untuk meningkatkan kinerja pengawasan di masa mendatang dalam pengawasan dan atau pengawalan akuntabilitas keuangan daerah maka perlu dipertimbangkan tambahan alokasi anggaran.

E. BPS PROVINSI JAWA TIMUR

1. Pada periode Maret 2014- Maret 2018 tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan, kecuali pada Maret 2015. Peningkatan angka kemiskinan pada Maret 2015, antara lain dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak.
2. Jumlah penduduk penganggur di Jawa Timur pada Februari 2018 mencapai 809,45 ribu orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun, dimana TPT Februari 2017 sebesar 4,00 persen turun menjadi 3,85 pada Februari 2018.
3. Gini ratio di Jawa Timur tahun 2016-2018 masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang (antara 0,3-0,5). Selama tahun 2016-2018 nilai gini rasio di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada tahun 2016 sebesar 0,402 di tahun 2018 meningkat menjadi 0,379, kondisi ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah Jawa Timur dalam menurunkan kesenjangan antara di kaya dan si miskin.
4. Versi Bank Dunia penduduk di Jawa Timur, selama tiga tahun terakhir mulai tahun 2016 sampai 2018, masuk dalam kelompok 40 persen bawah presentase distribusi pengeluaran penduduknya semakin meningkat, yaitu sebesar 16,85 persen pada tahun 2016 menjadi 17,74 persen pada tahun 2018. Tahun 2017 dan 2018 pengelompokkan distribusi pengeluaran masuk dalam kategori ketimpangan rendah karena jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen.
5. Pembangunan manusia di Jawa Timur selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari sebesar 67,55 (tahun 2013) menjadi 70,27 (tahun 2017) atau mengalami pertumbuhan 4,03 persen. Kategori IPM Jawa Timur pada tahun 2017 naik dari kategori sedang menjadi kategori tinggi.

6. Pada tahun 2016 inflasi Jawa Timur tercatat hanya 2,74 persen, merupakan inflasi yang paling rendah selama sepuluh tahun terakhir. Di tahun 2017 inflasi Jawa Timur lebih tinggi dibanding dua tahun sebelumnya yaitu mencapai 4,04 persen sedikit diatas angka inflasi nasional yang tercatat 3,61 persen. Hingga september 2018 inflasi Jawa Timur relatif terkendali yaitu hanya mencapai 1,78 persen sedikit dibawah angka nasional yang mencapai 1,94 persen.
7. Pada tahun 2016, inflasi kota Surabaya mencapai 3,22 persen dan merupakan satu satunya kota IHK di Jawa Timur yang memiliki angka inflasi diatas inflasi Jawa Timur yang hanya 2,74 persen. Tahun 2017 semua kota IHK di Jawa Timur mencatat inflasi diatas 3 persen, bahkan untuk kota Madiun dan Kota Surabaya memiliki inflasi diatas 4 persen yaitu 4,78 persen dan 4,37 persen sedikit diatas angka inflasi Jawa Timur yang hanya mencapai 4,04 persen.

F. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur. Kami mengharapakan agar semua permasalahan yang ditemukan dalam Kunjungan Kerja dimaksud dapat ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah.

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI
DPR RI**

KETUA TIM,

Ir. M. PRAKOSA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI

MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2018-2019

KE PROVINSI SUMATERA SELATAN

7 – 9 DESEMBER 2018

A. PENDAHULUAN

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019, Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 7 sampai dengan 9 Desember 2018. Sesuai dengan ruang lingkup tugasnya di bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional dan perbankan, Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah serta instansi-instansi Pemerintah Pusat dan mitra kerja Komisi XI DPR RI yang ada di daerah. Komisi XI DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank yang bermitra kerja dengan Pemerintah.

Sebagaimana kita ketahui, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, Bank Indonesia menyusun berbagai program sosial dengan tema “Memperkuat Akseptasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bank Indonesia di Seluruh Lapisan Masyarakat” untuk memperkuat implementasi Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi maupun SDM dan Pemahaman Publik.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagai bank sentral, Bank Indonesia melakukan kegiatan sosial yang diber nama Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Orientasi implementasi PSBI tahun 2018 lebih diarahkan pada upaya untuk memperkuat implementasi Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemahaman Publik, tanpa mengesampingkan Program Kepedulian yang menyentuh aspek pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan, lingkungan, dan bantuan terkait bencana.

Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi serta Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemahaman Publik dikategorikan dalam subtema, yaitu Ketahanan Pangan Strategis, Komoditas Unggulan, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Syariah, Indonesia cerdas, Beasiswa, Pengelolaan Komunitas Penerima Beasiswa, dan Edukasi Publik. Subtema Ekonomi Syariah merupakan subtema baru pada 2018, sedangkan delapan subtema lainnya meneruskan subtema yang telah dicanangkan pada tahun sebelumnya.

Adapun susunan keanggotaan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Tugas Nomor 113/ST/K.XI/DPRRI/XII/2018 adalah sebagai berikut:

No	No. Anggota	Nama Anggota	Fraksi	Keterangan
1	410	Ir. Marwan Cik Asan	F.P. DEMOKRAT	<u>Ketua Tim</u> Wakil Ketua Komisi
2	183	M. Prakosa	F.PDI-P	Wakil Ketua Komisi
3	189	Indah Kurnia	F.PDI-P	Anggota
4	295	H. Andi Achmad Dara, SE.	F.P. GOLKAR	Anggota
5	392	Haerul Saleh	F. P. GERINDRA	Anggota
6	498	H. Sukiman, S.Pd., M.M.	F. PAN	Anggota
7	471	Achmad Najib Qudratullah, SE	F. PAN	Anggota
8	51	H. Alamuddin Dimiyati Rois	F. PKB	Anggota
9	64	Faisol Riza	F. PKB	Anggota
10	525	H. M. Romahurmuziy, S.T., M.T	F. PPP	Anggota
11	27	Johnny G. Plate., S.E	F.P. NASDEM	Anggota
12	546	Erik Adtrada Ritonga	F.P. HANURA	Anggota
13		Drs. Urip Soedjarwono		Kepala Bagian

14		Oki Ganjar Ristawan		Staf
15		Ratih Estika Sari		Staf
16		Nyoman Indra Jursa		Tenaga Ahli
17		Kiki Saepudin		Staf
18		Devi Riandi		Media Cetak
19		Ila Rahmayati		TV Parlemen

B. INFORMASI DAN TEMUAN

1. Bank Indonesia

- a. Rencana aksi/kerja dan pelaksanaan atas rencana aksi/kerja Program Sosial Bank Indonesia Tahun 2018 khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Departemen Komunikasi sebagai satuan kerja pengampu Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) menetapkan tema PSBI 2018 adalah “Memperkuat Akseptasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bank Indonesia di Seluruh Lapisan Masyarakat melalui Program Sosial Bank Indonesia”. Tema tersebut dijabarkan dalam 3 ruang lingkup yaitu: Peningkatan Kapasitas Ekonomi, Peningkatan Kapasitas SDM, dan Kepedulian.

Peningkatan Kapasitas Ekonomi	Peningkatan Kapasitas SDM	Kepedulian
<ul style="list-style-type: none"> • Ketahanan Pangan Strategis • Komoditas Unggulan • Pemberdayaan Perempuan • Ekonomi Kreatif • Ekonomi Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia Cerdas • Beasiswa • Pengelolaan Komunitas Beasiswa (GenBI) • Edukasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan • Kebudayaan • Pendidikan • Keagamaan • Kesehatan dan Bencana

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan program PSBI sesuai arahan dari Departemen Komunikasi dengan mengalokasikan program PSBI di ketiga ruang lingkup tersebut. Berikut adalah rincian rencana program, dan realisasi pelaksanaan program:

Rencana	Realisasi	Gap
Peningkatan Kapasitas Ekonomi		
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Tahap III Griya Kain Tuan Kentang. • Tujuan: Pengembangan komoditas kain tradisional Sumatera Selatan 	Pengembangan Tahap III Griya Kain Tuan Kentang telah terlaksana dengan baik berupa perbaikan dermaha, visitor center, toilet dll	Masih diperlukan pendampingan terhadap pengelolaan kelompok Usaha Bersama Griya Kain Tuan Kentang
<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan Rumah Kembar: • Tujuan : Guna mendukung area wisata terintegrasi dengan Griya Kain Tuan Kentang 	Telah dilakukan perbaikan Rumah Kembar berupa penggantian kayu halaman depan dan pagar, serta pengecatan dinding depan.	Tidak ada (telah terealisasi)
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Komoditas Kopi Sumatera Selatan. • Tujuan: menciptakan branding Sumatera Selatan sebagai Provinsi Kopi dan 	<ul style="list-style-type: none"> • KPw BI Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan Pemerintah Provinsi melakukan pengembangan Rumah Kopi 	Tidak ada (telah terealisasi)

<p>mendorong perdagangan kopi Sumatera Selatan dengan kualitas premium baik di pasar domestic maupun internasional/global.</p>	<p>Sumatera Selatan yang berfungsi sebagai tempat pemasaran kopi Sumatera Selatan dengan memanfaatkan asset Pemerintah Provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pembuatan demplot konversi kopi robusta ke arabika di Semendo Muara Enim. • Telah diberikan bantuan mesin roaster kopi kepada klaster kopi Muara Enim. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pariwisata Sungai Musi <i>"Must See Musi"</i> • Tujuan: mengembangkan wisata terintegrasi dengan memanfaatkan potensi sungai musu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan perbaikan perahu wisata sebanyak 40 kethek dan <i>speedboat</i>. • Pembuatan peta wisata, seragam dan <i>life jacket</i> bagi pengguna. 	<p>Masih diperlukan penyusunan proses bisnis <i>"Must See Musi"</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Klaster Cabai (OKI), Bawang Merah (Musi Rawas), Bawang Putih (Pagaralam), dan Kopi (Muara Enim). • Tujuan: mengendalikan inflasi komoditas pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pendampingan terhadap kelompok tani Cabai, Bawang Merah berupa pelatihan, studi banding, bantuan bibit, saprodi dan alat mesin pertanian. • Pembangunan kandang komunal sapi, pasar lelang cabai, gudang bawang, dll 	Tidak ada (telah terealisasi)
<ul style="list-style-type: none"> • Program Kemandirian Pondok Pesantren Nurul Huda di OKU Timur. • Tujuan: mendorong kemandirian ekonomi pondok pesantren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pemberian bantuan budidaya ikan patin, seperti benih ikan sebanyak 10.000 benih, peralatan ikan, dan berbagai pelatihan. 	Tidak ada (telah terealisasi)
Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemahaman Publik		
<ul style="list-style-type: none"> • Program Indonesia Cerdas. • Tujuan: membantu meningkatkan kualitas pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pembangunan 4 (empat) BI Corner di Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan, 	Diperlukan pemantauan untuk memastikan keberlangsungan pemanfaatan BI Corner oleh Lembaga Penerima.

melalui penyediaan sarana informasi.	Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang, dan Perpustakaan Ponpes Aulia Cendekia.	
<ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa Bank Indonesia • Tujuan: membantu biaya pendidikan kepada mahasiswa berprestasi yang kurang mampu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah diberikan kepada 100 mahasiswa UIN Raden Fatah dan Universitas Sriwijaya 	Tidak ada (telah terealisasi)

- b. Orientasi implementasi Program Sosial Bank Indonesia tahun 2018 dan capaian atas orientasi implementasi tersebut di Tahun 2018 khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi dan Prognosa anggaran PSBI 2018 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan per 7 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

PSBI	Anggaran	Realisasi		Prognosa	
Tematik	1.713.983.104	1.443.403.023	83,3%	1.675.338.223	96,7%
Beasiswa	1.220.000.000	1.220.000.000	100,0%	1.220.000.000	100,0%
Reguler	700.000.000	601.946.000	86%	679.000.000	99,6%
Total	3.651.983.104	3.265.349.023	89,4%	3.592.338.223	98,4%

Realisasi PSBI Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan per 7 Desember 2018 adalah sebesar 89,4%, namun dengan adanya tambahan realisasi pembayaran pada pertengahan sampai dengan akhir bulan Desember, kami optimis bahwa realisasi PSBI Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dapat mencapai 98,4%.

c. Sub tema PSBI tahun 2018:

1) Gambaran umum program peningkatan Kapasitas Ekonomi, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pemahaman Publik khususnya di Provinsi Sumatera Selatan

a) Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan tergolong dalam kategori:

- Pengembangan Komoditas Unggulan dan Pemberdayaan Perempuan antara lain pengembangan sentra kain tradisional melalui Griya Kain Tuan Kentang, pengembangan komoditas kopi khas Sumsel Rumah Kopi Sumatera Selatan.
- Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pengembangan wisata terintegrasi sungai Musi "*Must see Musi*". Melalui pengembangan wisata terintegrasi sungai Musi diharapkan dapat mendorong perekonomian para pengemudi perahu serta meningkatkan potensi wisata yang berada sekitar sungai Musi.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan juga terlibat dalam Program Ketahanan Pangan Strategis dengan memberikan pendampingan terhadap beberapa klaster komoditas pangan binaan Bank Indonesia yaitu Klaster Cabai di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Klaster Bawang Merah di Kabupaten Musi Rawas, dan Klaster Bawang Putih di Kota Pagaram.

- Selain itu, terkait dengan Ekonomi Syariah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan juga mendorong program kemandirian Pondok Pesantren di Ponpes Nurul Huda Kabupaten OKU Timur. Program yang sudah dilaksanakan adalah bantuan budidaya patin oleh santri Pondok Pesantren Nurul Huda.

b) Peningkatan Kapasitas SDm dan Pemahaman Publik :

- Program Indonesia Cerdas dengan pendirian 4 (empat) BI Corner di Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang, Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya, dan Perpustakaan Ponpes Aulia Cendekia.
- Program Beasiswa Generasi Baru Indonesia (GenBI) yang diberikan kepada 100 (seratus) orang mahasiswa dari Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

2) Capaian atas sub tema PSBI tahun 2018 yang dikategorikan ke dalam Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemahaman Publik khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Peningkatan Kapasitas Ekonomi
<p>a) Pengembangan Tahap III Griya Kain Tuan Kentang</p> <p>Dalam rangka pengembangan UMKM, pengembangan kawasan Tuan Kentang dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Palembang sejak tahun 2015. Di tahun 2016, sebagai persiapan pengembangan galeri Griya Kain Tuan Kentang, dilakukan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) beranggotakan 30 orang pengrajin. Untuk pembangunan sarana dilakukan dalam 3 tahap yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahap 1 – tahun 2016: Pembangunan galeri pemasaran dengan merenovasi bangunan utama untuk pemasaran. • Tahap 2 – tahun 2017: Pendirian Bangunan Workshop untuk menyajikan proses pembuatan dan informasi mengenai pembuatan kain tradisional,

serta bangunan serbaguna untuk penyelenggaraan acara-acara di Griya Kain Tuan Kentang.

- Tahap 3 – tahun 2018: Pengembangan Dermaga, Visitor Center, dan perlengkapan fasilitas serta renovasi Rumah Kembar sebagai sarana pendukung Griya Kain Tuan Kentang untuk pengembangan kawasan wisata.

b) Pengembangan Komoditas Kopi Sumatera Selatan

Sumatera Selatan merupakan penghasil kopi terbesar di wilayah Sumatera dengan luas lahan hingga mencapai 250.000 hektar dan menghasilkan biji kopi sekitar 140 ribu ton. Namun demikian, Sumatera Selatan belum dikenal sebagai penghasil kopi sebagaimana provinsi lain di Sumatera seperti Aceh dan Lampung. Melihat hal tersebut, perlu dilakukan suatu terobosan untuk mendorong kopi Sumatera Selatan agar dapat bersaing dengan kopi dari daerah lain.

Dalam rangka mengembangkan komoditas kopi Sumatera Selatan, telah disusun sebuah roadmap pengembangan kopi yaitu:

Roadmap Pengembangan Kopi Sumatera Selatan:

Tahap I: Penjajakan Potensi Ekonomi dan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
Hasil Riset Growth Strategy merekomendasikan kopi sebagai komoditas unggulan yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomibaru Sumatera Selatan. Sebagai follow up perlu dilakukan penjajakan mulai dari sisi hulu hingga hilir kopi Sumatera Selatan melalui sinergi dengan program Pemerintah Daerah setempat.

Tahap II: Pembenahan Budidaya Kopi di sisi Hulu

Melakukan kajian awal potensi pengembangan komoditas kopi dan membuka demonstration plot budidaya kopi sebagai percontohan bagi kelompok tani dalam menerapkan teknik budidaya kopi yang benar.

Tahap III: Pembentukan Kelembagaan Petani Kopi

Pembentukan kelembagaan petani kopi untuk memperbaiki budidaya kopi di sisi hulu dan memperbaiki penanganan pasca panen oleh petani di sisi

hilirnya. Dalam tahap ini dilakukan pelatihan kepada kelompok tani.

Tahap 4: Pengembangan Rumah Kopi Sumatera Selatan sebagai sarana pengemabngan komoditas kopi di sisi hilir

Pada tahap ini akan dilakukan:

- Pembanguna fisik Rumah Kopi Sumatera Selatan;
- Penyiapan proses bisnis pengelolaan Rumah Kopi Sumatera Selatan;
- Penyusunan standarisasi penanganan pasca panen oleh petani dan kriteria kelayakan untuk seleksi biji kopi yang eligible dipasarkan melalui Rumah Kopi Sumatera Selatan;
- Membangun kelembagaan Rumah Kopi Sumatera Selatan.

Tahap 5: Operasionaliasi dan Pengenalan Rumah Kopi Sumatera Selatan

Pengoperasian Rumah Kopi Sumatera Selatan dan pengenalan misi Rumah Kopi Sumatera Selatan kepada masyarakat melalui kegiatan harian maupun yang terjadual.

Tahap 6: Pengembangan dan Positioning Rumah Kopi Sumatera Selatan sebagai lembaga yang melakukan chanelling untuk perdagangan kopi premium, fasilitator standarisasi Kopi Sumatera Selatan dan Sarana Branding

Pada tahap ini akan dilakukan:

- Reviu menyeluruh dengan melengkapi fasilitas pendukung Rumah Kopi Sumatera Selatan;
- Memperkuat jaringan kelembagaan kelompok petani kopi sebagai supplier kopi kualitas premium;
- Membuka akses perdagangan Kopi Sumatera Selatan ke pasar domestic dan eskpor melalui kegiatan-kegiatan business link dan promosi;
- Memperkuat reputasi Rumah Kopi Sumatera Selatan sebagai fasilitator untuk standarisasi kualitas kopi dengan melibatkan professional Q-Grader dan lembaga sertifikasi;
- Wadah asosiasi barista, roaster dan kedai kopi dan komunitas kopi;
- Mengembangkan kemitraan yang lebih luas dengan stakeholders seperti

c) Pengembangan Wisata Sungai Musi "*Must See Musi*"

Sungai Musi merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian kota Palembang/Provinsi Sumatera Selatan, terutama sebagai jalur lalu lintas perdagangan maupun jalur perjalanan penduduk melalui sarana transportasi sungai. Meskipun demikian, pemanfaatan Sungai Musi untuk kepentingan pariwisata masih sangat terbatas, sehingga masih terdapat potensi yang belum tergarap secara optimal.

Dalam rangka mendukung program wisata di Kota Palembang/Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan pengembangan di Sungai Musi agar potensi wisata dapat semakin maksimal. Program PSBI yang telah dilakukan adalah perbaikan terhadap 40 perahu wisata (kethek dan *speedboat*) di sekitar Sungai Musi.

Roadmap Pengembangan *Must See Musi*

Tahap 1: Penjajakan Potensi Ekonomi dan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah

Penjajakan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui pengembangan wisata Sungai Musi melalui sinergi dengan program Pemerintah Daerah setempat.

Tahap 2: Penyusunan Desain/Model Bisnis Wisata Sungai

Penyusunan model bisnis wisata Sungai Musi dengan mengambil referensi pengelolaan pariwisata oleh kota-kota yang telah mengembangkan wisata sungai dan menerapkan konsep *water front city* dalam pengembangan wilayahnya.

Tahap 3: Pembentukan Kelembagaan

Pembentukan kelembagaan para pelaku usaha angkutan sungai dan pengemudi angkutan sungai untuk memudahkan pengembangan kapasitas mereka dalam mempersiapkan wisata sungai baik dari sisi kesiapan SDM maupun kesiapan sarana/prasarana pengembangan wisata Sungai Musi.

Tahap 4: Penyiapan Infrastruktur wisata Sungai Musi

Pengembangan infrastruktur wisata Sungai Musi yang mencakup:

- Perbaikan perahu angkutan sugai yang dalam jangka pendek dialihkan menjadi perahu wisata;
- Penyiapan dermaga keberangkatan dan kedatangan masing-masing destinasi;
- Penyusunan proses bisnsi wisata sungai;
- Penyusunan standarisasi layanan, mulai dari penetapan tariff hingga standar pelayanan oleh operator sejak kedatangan wisatawan hingga selesainya perjalanan wisata;
- Penyediaan informasi wisata sungai dan penetapan destinasi wisata Sungai Musi;
- Capacity Building SDM.

Tahap 5: Operasionalisasi Wisata Sungai Musi dan Pengintegrasian

Pengoperasian Wisata Sungai Musi dengan mengintegrasikan beberapa tujuan wisata di tepian Sungai Musi. Didahului dengan tahap uji coba dan evaluasi. Penyiapan destinasi wisata dan fasilitas pelengkap dermaga.

Tahap 6: Pengembangan dan Positioning Wisata Sungai Musi sebagai paket wisata unggulan.

Pada tahap ini akan dilakukan reviu menyeluruh dengan melengkapi fasilitas pendukung baik di dermaga keberangkatan maupun di setiap destinasio yang dikunjungi, memperbaiki proses bisnis dan layanan, meningkatkan kapasitas SDM, serta mengeksplorasi dan mempersiapkan destinasi wisata baru untuk pengembangan paket tour Sungai Musi. Meningkatkan promosi dan mengembangkan kemitraan yang lebih luas dengan stakeholders.

d) Klaster Ketahan Pangan

- Klaster Cabai Kabupaten OKU

Sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi yang disebabkan komoditas

cabai, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan mengembangkan program klaster cabai di Kabupaten OKI. Program ini dimulai pada tahun 2015, awalnya hanya di Desa Muara Burnai kecamatan lempuing kabupaten OKI dengan 2 kelompok tani, 28 anggota serta luas lahan 13 hektar saat ini telah berkembang menjadi 3 desa dampingan yaitu Desa Muara Burnai Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI dan 2 desa yang ada di Kecamatan Jejawi (Desa Pedu dan Simpang IV), 5 kelompok tani dengan jumlah anggota 76 orang serta luas lahan 28 hektar dengan produk per hektar mencapai 8 ton.

Bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia berupa bantuan teknis antara lain pelatihan-pelatihan, studi banding dan demonstration plot (demplot) sebagai sarana belajar bersama, pendampingan serta bantuan saprodi berupa bibit, obat-obatan, pupuk, mulsa, peralatan tanam berupa pompa air serta kultifator.

- **Klaster Bawang Merah, Kabupaten Musi Rawas**

Program ini dilaksanakan sejak tahun 2015 di Kabupaten Musi Rawas sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan bawang merah terhadap daerah lain utamanya dari Brebes sehingga inflasi bawang merah yang sering terjadi lebih terkendali. Selanjutnya kami mengembangkan budidaya bawang merah varietas bima brebes di beberapa daerah antara lain di Desa Bingin Jungut Kecamatan Muara Kelingi, Desa K. Kalibening Kecamatan Tugu Mulyo, Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti, Desa Mardiharjo Kecamatan Purwodadi, Desa Srimulyo Kecamatan. STL Ulu Terawas. Adapun produksi rata-rata bawang merah di klaster Musi Rawas adalah sebesar 8-9 ton per hektar. Guna mewujudkan kemandirian benih kepada kelompok tani diberikan pelatihan penangkaran benih serta bantuan gudang penangkar benih dengan kapasitas 40 ton di Desa Bingin Jungut saat ini luas lahan pengembangan bawang merah di Bingin Jungut mencapai 8 hektar dari luas total 21 hektar yang ada di Kabupaten

Musirawas. Secara umum bantuan yang diberikan BI berupa bantuan teknis berupa pelatihan-pelatihan, demonstration plot (demplot), studi banding, pendampingan dan bantuan saprodi berupa pupuk, bibit, obat-obatan, mulsa, mesin pompa, kultifator, *hand tractor* serta bantuan gudang penangkaran benih.

- Klaster Padi Organik, Kabupaten OKU Timur

Program ini kami laksanakan sejak tahun 2012 di beberapa kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Sumber Makmur yang terdiri dari 11 kelompok Tani yang tersebar di 5 Desa di Kecamatan Belitang. Bantuan yang telah diberikan berupa pelatihan, studi banding, sarana produksi, sarana instalasi pembuatan pupuk organik cair, pendampingan, pompa serta kandang sapi komunal di Dersa Sumber Suko Kecamatan Belitang dengan kapasitas 100 ekor sapi. Pencapaian saat ini kelompok tani telah mampu membuat pupuk organik cair sendiri beserta biopestisida hingga memperoleh sertifikat organik. Saat ini luas lahan yang telah bersertifikat organik seluas 70 hektar dan sekitar 100 hektar yang sedang proses menuju sertifikasi organik, dengan produksi rata-rata 8 ton.

Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemahaman Publik

a) Indonesia cerdas : Pembangunan 4 (empat) Unit BI Corner

Guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tugas dan peran Bank Indonesia dalam mengawal perekonomian Indonesia serta untuk mendorong literasi bagi masyarakat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembangunan 4 (empat) unit BI Corner yang berada di Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang, Perpustakaan Negeri Sriwijaya, dan Perpustakaan Ponpes Aulia Cendekia.

b) Beasiswa Bank Indonesia

Bank Indoensia pada tahun 2018 telah memberikan beasiswa Bank Indonesia kepada 100 orang mahasiswa dari Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam

Negeri Raden Fatah. Tidak hanya dalam bentuk bantuan materi saja, Bank Indonesia selalu memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap para mahasiswa yang diwadahi dalam komunitas Generasi Baru Indonesia Sumatera Selatan

d. Sebaran atas sub tema PSBI tahun 2018 di Provinsi tahun 2018.

Anggaran PSBI Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 adalah terbagi menjadi 3 yaitu Peningkatan Kapasitas Ekonomi sebesar 49%, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemahaman Publik 45%, dan Kepedulian sebesar 5%.

e. Program Ekonomi Syariah yang merupakan program baru di dalam PSBI tahun 2018 khususnya program konkret di Provinsi Sumatera Selatan.

Program Ekonomi Syariah yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yaitu Program kemandirian Pesantren. Program ini direalisasikan dengan melakukan penjajakan berdasarkan potensi yang dimiliki, sehingga berdasarkan kajian tersebut kami melakukan bantuan berupa bibit ikan patin 10.000 ekor beserta bantuan pakan 7,5 ton serta beberapa kelengkapan lain seperti terpal, jaring dsb.

Mengingat 70 persen biaya untuk budidaya ikan ada di pembelian pakan, maka pada tahun 2017 diberikan bantuan berupa mesin pencetak pellet pakan ikan yang terdiri dari mesin penepung dan mesin pencetak pellet sehingga beserta pelatihan teknik pembuatannya sehingga lebih ekonomis. Panen patin dilakukan pada bulan Mei 2017 dengan hasil sekitar 2,5 ton dengan harga jual Rp18.000 per kg. dari hasil ini kemudian Pondok Pesantren mengembangkan budidaya ikan mas dan nila pada tahun 2018 dengan pertimbangan lebih singkat masa budidayanya dan harga jual relative stabil.

f. Capaian Serapan Anggaran dari Program Sosial Bank Indonesia Tahun 2018

Periode : s.d 30 Nopember 2018

No	Kpw	DR	%Realisasi PSBI Tematik	% Realisasi PSBI Reguler	% Realisasi Beasiswa	% Total Realisasi
1	KPw BI Lhokseumawe	1	117,50	83,28	99,92	103,51
2	KPw BI Pematang Siantar	1	81,34	96,55	-	86,71
3	KPw BI Banda Aceh	1	101,16	89,26	83,18	91,20
4	KPw BI Bengkulu	1	65,79	80,00	59,37	65,15
5	KPw BI Jambi	1	85,55	101,53	92,84	93,06
6	KPw BI Babel	1	63,14	60,19	102,33	73,12
7	KPw BI Kep. Riau	1	79,69	99,10	98,39	88,97
8	KPw BI Lampung	1	41,19	94,09	99,56	75,16
9	KPw BI Riau	1	77,91	86,05	100,00	88,53
10	KPw BI Sumbar	1	57,99	95,64	99,31	86,50
11	KPw BI Sumsel	1	71,86	81,38	100,88	83,36
12	KPw BI Sumut	1	70,87	88,76	99,63	85,71
13	KPw BI Sibolga	1	90,48	89,78	100,00	92,94
	TOTAL DR 1		76,49	88,14	144,51	85,06

Berdasarkan data per tanggal 30 November 2018, Realisasi Anggaran PSBI seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri di Sumatera mencapai 85,06% atau masih berada dibawah rentang target realisasi PSBI yang sebesar 90 – 100%.

Memperhartikan hal tersebut, maka diperlukan upaya ekstra bagi Kantor Perwakilan BI Dalam Negeri di Sumatera yang terealisasi PSBI nya masih di bawah rentang target realisasi yaitu KPw BI Pematang Siantar, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong realisasi pembayaran pekerjaan sehingga target realisasi PSBI dapat segera tercapai. Sedangkan untuk nasional, realisasi s.d. 23 November 2018 adalah sebesar 224,6 Miliar yang terbagi menjadi Program Strategis sebesar Rp79,2 Miliar dan Kepedulian sebesar Rp58,9 Miliar.

C. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh didalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta menindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi XI DPR RI.

Jakarta, 10 Desember 2018
TIM KUNJUNGAN KERJA
KOMISI XI DPR RI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Ketua,



Ir. Marwan Cik Asan, MM

A - 410



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK ANGGOTA KOMISI XI DPR RI
MASA SIDANG TAHUN SIDANG KE PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
TANGGAL 4 S.D. 6 OKTOBER 2018**

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI serta Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 91/ST/K.XI/DPRRI/X/2018 tentang Penugasan Kepada Anggota Komisi XI dan Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan Kunjungan. Kunjungan Kerja Spesifik ini dipimpin oleh Ir. H. Soepriyatno.

II. INFORMASI YANG DITEMUKAN

A. OJK

1. Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada dalam gugusan Sunda Kecil dan termasuk dalam Kepulauan Nusa Tenggara.
2. Dari total 10 Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 7 Kota/Kabupaten terkena dampak bencana gempa bumi, yaitu Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat dan Kab. Sumbawa.
3. Pada wilayah di 7 Kota/Kabupaten tersebut, terdapat 32 bank, dengan rincian 15 bank umum dan 17 BPR/BPRS yang terkena dampak bencana. Adapun jumlah debitur yang terdampak bencana diperkirakan berjumlah 39.397 debitur, mencakup 33.881 debitur bank umum dan 5.516 debitur BPR/BPRS (posisi 10 September 2018).
4. Jumlah kredit atau pembiayaan bank umum di ke-7 Kota/Kabupaten tersebut yang terkena dampak bencana gempa adalah sebesar Rp1,92 Triliun, atau sekitar 9,01% dari total kredit bank umum di 7 Kota/Kabupaten tersebut yang sebesar Rp21,33 triliun.

5. Dari total kredit/pembiayaan yang terkena dampak bencana gempa tersebut (Rp1,92 Triliun), 77% diantaranya adalah merupakan kredit/pembiayaan dengan plafond sampai dengan Rp5 Miliar. Sedangkan total kredit BPR yang terdampak bencana gempa adalah sebesar Rp145 Miliar.
6. Dalam membantu memulihkan usaha debitur dan memperbaiki kinerja perbankan, serta kondisi perekonomian daerah, pada bulan Agustus 2018 yang lalu, OJK telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kredit/pembiayaan dari perbankan yang disalurkan kepada debitur atau proyek yang berada di lokasi bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Melalui Keputusan Dewan Komisiner Nomor 22/KDK.03/2018 tanggal 23 Agustus 2018, OJK menetapkan 7 Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat dan Kab. Sumbawa sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank.
8. Perlakuan khusus tersebut berupa pelanggaran aturan penilaian kualitas kredit/pembiayaan, kualitas kredit yang restrukturisasi, serta pemberian kredit/pembiayaan baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam. Kebijakan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.
9. Terdapat 22 perusahaan di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang terkena dampak gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana sebagian besarnya adalah merupakan perusahaan pembiayaan (13 perusahaan).
10. Bagi perusahaan pembiayaan, dalam rangka membantu debitur yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran karena terkena dampak gempa, maka perusahaan pembiayaan dapat memberikan relaksasi, antara lain berupa:
 - a. Rescheduling pembayaran angsuran.
 - b. Penyesuaian biaya administratif, dan/atau
 - c. Penyesuaian denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran.
11. Bagi perusahaan asuransi, OJK juga mendorong untuk segera dilakukan proses penanganan klaim secara profesional, dan jika diperlukan, perusahaan dapat melakukan jemput bola untuk meringankan beban pemegang polis yang tertimpa musibah

B. BRI

1. Perkembangan Kondisi Pertumbuhan dan Kinerja Pembiayaan sebelum dan paska gempa

Kategori	Des-17	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	Mei 18	Jun 18	Juli 18	Agus 18
Aset	493.829	489.212	493.388	503.199	511.416	515.513	519.997	521.949	525.014
DPK	173.575	179.148	176.029	179.692	172.521	170.000	176.808	180.888	185.800
Kredit/Pemb	481.958	479.585	483.859	493.905	501.776	503.144	505.478	511.400	508.979
NPL/F	19.140	21.045	20.332	21.021	21.178	21.294	21.587	22.263	22.724
LDR	277,67%	267,70%	274,87%	274,86%	290,85%	295,97%	285,89%	282,72%	273,94%

2. Total nasabah BRI Syariah yang menjadi korban baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung sebanyak 2.212 Noa, dengan rincian:

Pembiayaan	NOA	Volume
Reguler (SME dan Konsumer)	237	80.008
Mikro KUR	1.028	15.841
Mikro Non KUR	947	75.636
Jumlah	2.212	171.487

3. Langkah yang dilakukan Bri Syariah antara lain Restrukturisasi dan Adjustment kolektibilitas pada nasabah terdampak gempa berdasarkan siaran pers OJK terkait kebijakan khusus paska gempa di NTB
4. Adapun wujud empati Bri Syariah KC Mataram yang sudah dilakukan antara lain:
 1. Kunjungan ke lokasi usaha dan tempat tinggal nasabah,
 2. Memberikan bantuan (Bris Peduli) ke daerah Obel-obel, Sembalun dan Lombok Utara
 3. Distribusi daging dan hewan Qurban, dan
 4. Lebih bijak melakukan penagihan.

C. MANDIRI

1. Perkembangan Kondisi Pertumbuhan Kredit Bank Mandiri di Area Mataram Pasca Gempa :

(dalam Rp M)

Indikator	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Growth (Juli 2018- Sept 2018)	
				Nominal	%
Total Kredit	3,899.3	3,977.9	4,108.8	209	5.4%
% NPL Total Kredit	0.70%	0.82%	0.72%	-0.02%	-2.9%
Kredit Sektor Middle Corporate	331.1	321.6	318.7	(12)	-3.7%
NPL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Kredit Sektor SME	318.3	314.0	320.4	2	0.7%
NPL	1.72%	0.76%	0.00%	1.72%	100.00%
Kredit Sektor Consumer	287.5	287.4	291.6	4	1.4%
NPL	1.67%	1.56%	2.73%	-1.06%	-63.47%
Kredit Sektor Micro	2,805.5	2,904.0	3,035.0	229	8.2%
NPL	0.46%	0.63%	0.58%	-0.12%	-26.09%
New KSM	2,291.8	2,403.6	2,540.5	249	10.8%
NPL	0.07%	0.11%	0.08%	-0.01%	-14.29%
KUM	242.3	235.5	233.8	(9)	-3.5%
NPL	3.13%	4.70%	4.01%	-0.88%	-28.07%
KUR	271.3	264.8	260.7	(11)	-3.9%
NPL	1.00%	1.40%	1.59%	-0.59%	-58.47%

2. Pertumbuhan Kredit Bank Mandiri Area Mataram secara Total di Propinsi NTB tetap tumbuh terjaga pasca gempa yang terjadi, dengan growth pertumbuhan Baki debit di bulan September 2018 sebesar Rp 209 M dibandingkan dengan bulan Juli 2018. Sektor yang tumbuh yaitu :

- Sektor SME (Small Medium Enterprise) tumbuh sebesar Rp 2 M
- Sektor Consumer Loan (KPR) tumbuh sebesar Rp 4 M
- Sektor Micro di segment KSM tumbuh sebesar Rp 249 M

Sektor yang menurun pertumbuhannya yaitu :

- Sektor Middle Corporate menurun sebesar Rp 12 M
- Sektor Micro di segment KUM & KUR dengan penurunan masing-masing Rp 9 M dan Rp 11 M

3. Kinerja Perkreditan Bank Mandiri di Propinsi Nusa Tenggara Barat, secara total mengalami pelemahan NPL sebesar 0,02% Pasca Gempa Lombok, dengan pelemahan NPL terbesar ada di sektor Kredit Consumer Loan (KPR) dan Sektor KUR, dimana masing-masing melemah sebesar 0,89% dan 0,88%. Sedangkan untuk pelemahan

Kolektibilitas 2 ada di sektor kredit Consumer Loan (KPR), dengan pelemahan sebesar 2,30% dari posisi Juli 2018.

4. Total Nasabah yang mengalami kerugian Pasca Gempa Lombok sebanyak 4.329 Debitur.
5. Langkah-langkah yang dilakukan perbankan mengakselerasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan kebijakan khusus pasca gempa di Propinsi NTB :
 - a. Mendata Jumlah Debitur dan Nasabah Bank Mandiri yang terdampak Gempa
 - b. Memonitor pergerakan portofolio dengan membandingkan % kol 1, % kol 2, % dpd 30+, dan NPL sebelum dan setelah terjadinya gempa
 - c. Melaksanakan perintah OJK terkait siaran pers OJK No.SP.54/DHMS/OJK/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Perlakuan Khusus terhadap Nasabah dan Industri Jasa Keuangan yang terdampak Gempa di Propinsi NTB, dimana Bank Mandiri membagi 3 Jenis pengajuan terhadap korban yang terdampak gempa, yaitu
 - Permohonan perlakuan khusus pasca bencana
 - Permohonan Restrukturisasi biasa tanpa perlakuan khusus
 - Tidak membutuhkan perlakuan khusus & berjanji tetap membayar angsuran sesuai jadwal yang ada
6. Program Perbankan dalam hal ini Bank Mandiri kepada Nasabah atau masyarakat pasca gempa di Nusa Tenggara Barat :
 - a. melakukan skema restrukturisasi untuk Debitur terdampak gempa
 - b. Bank Mandiri sebagai Koordinator BUMN Peduli dalam menyalurkan bantuan dari BUMN kepada Korban Gempa di Lombok
 - c. Bank Mandiri membangun rumah ramah gempa di wilayah kekait dan Wadon Lombok Barat dengan total yang dibangun sebanyak 216 Rumah

D. BTN

1. Kondisi pertumbuhan kredit (Termasuk KUR) dan investasi Pasca Gempa

Keterangan	Tahun 2018 (Jan - Juli) dlm juta	Pasca Gempa (Agustus) dlm juta	Pasca Gempa (September) dlm juta
Realisasi Kredit	492.627	59.599	85.839
Kredit Konsumer	285.020	43.133	68.844
a. Kredit Non Subsidi	61.721	6.168	6.035
b. Kredit Subsidi	223.299	36.965	62.809
Kredit Komersial & SME	207.247	16.466	16.995
a. KYG	186.150	14.920	13.050
b. KUMK	21.097	1.546	3.945

2. 2.1 Kinerja Perkreditan Bank BTN sebelum Gempa

KETERANGAN	2012	2013	2014	2015	2016	Realisasi s/d Des 2017	RKAP 2017	PENCAPAIAN THD RKAP 2017
REALISASI KREDIT	472,431	614,527	454,639	509,053	612,734	954,174	706,407	135.07%
KRD KONSUMER	341,784	396,940	337,793	334,018	418,168	724,478	504,504	143.60%
a. Krd Non Subsidi	338,597	396,940	329,727	289,049	197,002	145,096	221,375	65.54%
b. Krd Subsidi	3,187	-	8,066	44,969	221,165	579,382	283,129	204.64%
KRD KOMERSIAL & SME	130,648	217,587	126,846	175,035	194,566	229,696	201,903	113.77%
a. Krd Komersial	91,193	204,863	122,911	167,837	179,208	208,797	179,208	116.51%
b. Krd SME	39,455	12,724	3,935	7,198	15,358	20,899	22,695	92.09%

2.2 Pola Penyaluran KUR Sebelum Gempa

KUR	Th 2013		Th 2014		Th 2015		Th 2016		Th 2017	
	saldo pokok	debitur	saldo pokok	debitur	saldo pokok	debitur	saldo pokok	debitur	saldo pokok	debitur
KUR - KI	13,513	91	8,728	80	5,352	59	4,478	48	824	11
KUR - KMK	9,215	141	6,959	112	3,494	41	2,353	23	-	-
KUR - LINKAGE POLA EXECUTING	6,721	12	4,149	11	1,981	6	457	3	-	-
JUMLAH	29,449	244	19,836	203	10,827	106	7,288	74	824	11

Berdasarkan pengelompokan Debitur KUR di propinsi NTB, Kelompok Debitur KI dan KMK merupakan dominasi terbesar karena mayoritas debitur dalam tahap pengembangan usaha baik dari tempat usaha dan modal usaha.

2.3 Kinerja Perkreditan Bank BTN Pasca Gempa

Keterangan	Tahun 2018 (Jan - Juli) dlm juta	Pasca Gempa (Agustus) dlm juta	Pasca Gempa (September) dlm juta
Realisasi Kredit	492.627	59.599	85.839
Kredit Konsumer	285.020	43.133	68.844
c. Kredit Non Subsidi	61.721	6.168	6.035
d. Kredit Subsidi	223.299	36.965	62.809
Kredit Komersial & SME	207.247	16.466	16.995
b. KYG	186.150	14.920	13.050
b. KUMK	21.097	1.546	3.945

2.4 Pola Penyaluran KUR Tahun 2018 (Pasca Gempa Juli – Oktober 2018)

KUR	Jan - Oktober 2018		Pasca Gempa	
			Juli 2018 - Oktober 2018	
	Saldo Pokok	Debitur	Saldo Pokok	Debitur
KUR - KI	6,689,427,371	24	1,786,958,334	6

3. Jumlah nasabah perbankan yang mengalami kerugian dan bagaimana langkah – langkah yang dilakukan perbankan mengakselerasi kebijakan OJK yang menetapkan kebijakan khusus pasca gempa di prov NTB

Jumlah Nasabah Terdampak Gempa	Total Outstanding terdampak Gempa	Langkah – langkah yang dilakukan perbankan
715 debitur	110 miliar	1)PUST, penjadwalan ulang sisa tunggakan 2)PUSP, penjadwalan ulang sisa pinjaman 3)Grace Period

4. Dalam menanggulangi permasalahan gempa sesuai kebijakan internal Bank BTN memutuskan beberapa relaksasi kebijakan dalam rangka perlakuan khusus kepada debitur KUR yang terkena dampak gempa bumi di Lombok dan sekitarnya, Relaksasi berupa restrukturisasi khusus untuk debitur KUR mekanisme subsidi bunga yang diberlakukan mulai 18 September 2018 yang terdiri dari :

- a) **Suplesi** adalah penyesuaian perjanjian kredit antara penyalur dan debitur KUR dimana penyalur melakukan penambahan besaran akad KUR dan tidak mengubah jangka waktu KUR
- b) **Perpanjangan** adalah penyesuaian perjanjian kredit antara penyalur dan debitur KUR dimana penyalur melakukan penambahan jangka waktu KUR dan tidak mengubah besaran akad KUR
- c) **Restrukturisasi** adalah penyesuaian perjanjian kredit antara penyalur dan debitur KUR dimana penyalur melakukan penambahan jangka waktu KUR dan penambahan besaran akad KUR

E. NTB SYARIAH

1. Nasabah Terdampak Gempa Per-Kabupaten/Kota Posisi 31 Agustus 2018

No	WILAYAH	PRODUKTIF									KONSUMTIF			TOTAL		
		KUR			NON KUR			TOTAL			KSG					
		Nsb	Plafond	Baki Debet	Nsb	Plafond	Baki Debet	Nsb	Plafond	Baki Debet	Nsb	Plafond	Baki Debet	Nsb	Plafond	Baki Debet
1	Mataram	-	-	-	5	515	444	5	515	444	-	-	-	5	515	444
2	Lombok Barat	72	1,552	1,521	36	3,555	2,767	108	5,107	4,288	-	-	-	108	5,107	4,288
3	Lombok Tengah	-	-	-	1	100	47	1	100	47	28	5,296	4,485	29	5,396	4,532
4	Lombok Utara	91	2,085	2,083	374	47,843	30,323	465	49,928	32,406	757	99,030	73,730	1,222	148,958	106,136
5	Lombok Timur	68	1,651	1,651	28	3,075	2,409	96	4,726	4,060	-	-	-	96	4,726	4,060
6	Sumbawa	19	610	523	56	7,925	6,107	75	8,535	6,630	-	-	-	75	8,535	6,630
Total		250	5,898	5,778	500	63,013	42,097	750	68,911	47,875	785	104,326	78,215	1,535	173,237	126,090

2. Langkah Program Relaksasi Dampak Gempa Lombok Sumbawa

1. Pendataan nasabah terdampak gempa pada seluruh wilayah kerja Cabang dan Cabang Pembantu.
2. Klasifikasi tingkat dampak gempa terdampak langsung dan tidak langsung dengan katagori terburuk, moderate dan ringan.

3. Kebijakan Restrukturisasi melalui Surat Keputusan Direksi Bank NTB Syariah mengacu pada kebijakan khusus POJK dan KDK.
4. Sosialisasi kebijakan Restrukturisasi kepada Nasabah terdampak gempa.
5. Proses dan realisasi kebijakan Restrukturisasi kepada Nasabah terdampak gempa secara proaktif dan bertahap.
6. Pembinaan dan pendampingan kepada Nasabah terdampak gempa.

3. Program Relaksasi Dampak Gempa Lombok Sumbawa

1. Pembiayaan KUR Syariah dengan akad Murabahah

- a. Tujuan untuk modal kerja dan investasi sektor pertanian (termasuk peternakan)
- b. Perpanjangan jangka waktu maksimal 12 bulan untuk pembiayaan modal kerja dan maksimal 24 bulan untuk investasi
- c. Penundaan pembayaran di akhir jatuh tempo sesuai masa produksi (panen)
- d. Margin tetap (tidak bertambah dengan adanya perpanjangan jangka waktu)

2. Pembiayaan Murabahah (Non KUR)

- a. Sisa jangka waktu pembiayaan tidak mengalami perubahan.
- b. Penundaan pembayaran angsuran bulanan sebesar 50% selama maksimal 36 bulan, yang dibayarkan secara prorata dari sisa jangka waktu pembiayaan berjalan dikurangi jangka waktu keringanan.

3. Pembiayaan Kerja Sama (Musyarakah)

- a. Penyesuaian jangka waktu kerja sama akad musyarakah dengan angsuran bertahap (aflopend) dimulai bulan ke-13
- b. Jangka waktu pembiayaan maksimal 60 bulan (5 tahun) dengan jadwal pengembalian pokok syirkah dan bagi hasil secara sesuai kesepakatan Nasabah dan Bank (bulanan / triwulanan / semesteran / tahunan).

F. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur. Kami mengharapkan agar semua permasalahan yang ditemukan dalam Kunjungan Kerja dimaksud dapat ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah.

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR
RI**

KETUA TIM,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. H.', written in a stylized, cursive manner.

Ir. H. SOEPRİYATNO

MILESTONE 3

TABEL ANALISA LAPORAN KUNJUNGAN KERJA MS. I – II TAHUN SIDANG 2018-2019

NO	NAMA DAERAH	FUNGSI	WAKTU PELAKSANAAN	ANALISA
1.	PROVINSI SUMATERA UTARA	PENGAWASAN	22 S.D 24 SEPTEMBER 2018	<p>a. kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan Badan usaha,yang dibuat dalam bentuk skema kerjasama pemerintah badan usaha(KPBU), adalah suatu bentuk yang telah direncanakan pemerintah (solicited project),juga mengundang swasta untuk mengusulkan proyek kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) atas prakarsa swasta sendiri.</p> <p>b. fasilitasi yang ditujukan untuk mempercepat investasi dalam pembiayaan proyek strategis nasional,dan sumber pembiayaan tersebut berasal dari luar APBN/APBD dan didukung penuh oleh kebijakan pemerintah di kenal dengan istilah skema pembiayaan non anggaran pemerintah(PINA)</p> <p>c. terhadap skema PKBU dan skema PINA,agar tetap dilanjutkan realisasinya agar ke depan dapat mendukung perkembangan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.</p> <p>d. progres yang di jalankan berdasarkan pembiayaan non anggaran pemerintah(PINA) antara lain</p>

				<p>berupa bandar udara, jalan tol, jaringan optik, pembangkit listrik, pembiayaan investasi sukuk syariah, dan lainnya.</p> <p>e. setiap tahapan yang dilakukan dalam proses dimaksud agar dilakukan secara bersama sehingga diantara para pihak terkait dapat saling melakukan pemantauan dan pengawasan langsung sehingga tercapai target sesuai dengan program yang telah ditetapkan.</p>
2.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	PENGAWASAN	4 S.D 6 OKTOBER 2018	<p>a. Bahwa terdapat lokasi bencana alam yakni gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari total 10 Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 7 Kota/Kabupaten terkena dampak bencana gempa bumi, yaitu Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat dan Kab. Sumbawa.</p> <p>b. Pada wilayah di 7 Kota/Kabupaten tersebut, terdapat 32 bank, dengan rincian 15 bank umum dan 17 BPR/BPRS yang terkena dampak bencana. Adapun jumlah debitur yang terdampak bencana diperkirakan berjumlah 39.397 debitur, mencakup 33.881 debitur bank umum dan 5.516 debitur BPR/BPRS (posisi 10 September 2018).</p> <p>c. Jumlah kredit atau pembiayaan bank umum di ke-7</p>

				<p>Kota/Kabupaten tersebut yang terkena dampak bencana gempa adalah sebesar Rp1,92 Triliun, atau sekitar 9,019o dari total kredit bank umum di 7 Kota/Kabupaten tersebut yang sebesar Rp21,33 triliun. 10.</p> <p>d. Dari total kredit'(pembiayaan yang terkena dampak bencana gempa tersebut (Rp1,92 Triliun), 776 diantaranya adalah merupakan kredit/pembiayaan dengan plafond sampai dengan Rp5 Miliar. Sedangkan total kredit BPR yang terdampak bencana gempa adalah sebesar Rp145 Miliar.</p> <p>e. Dalam membantu memulihkan usaha debitur dan memperbaiki kinerja perbankan, serta kondisi perekonomian daerah, pada bulan Agustus 2018 yang lalu, OJK telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kredit/pembiayaan dari perbankan yang disalurkan kepada debitur atau proyek yang berada di lokasi bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p> <p>f. Melalui Keputusan Dewan Komisioner Agustus 2018 OJK menetapkan 7 Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat dan Kab. Sumbawa sebagai</p>
--	--	--	--	---

				<p>daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank. Perlakuan khusus tersebut berupa pelanggaran aturan penilaian kualitas kredit/pembiayaan, kualitas kredit yang restrukturisasi, serta pemberian kredit/pembiayaan baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam. Kebijakan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Terdapat 22 perusahaan di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang terkena dampak gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana sebagian besarnya adalah merupakan perusahaan pembiayaan (13 perusahaan).</p> <p>g. untuk perusahaan pembiayaan, dalam rangka membantu debitur yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran karena terkena dampak gempa, maka perusahaan pembiayaan dapat memberikan relaksasi,</p> <p>h. diharapkan relaksasi dimaksud dapat membantu pemulihan kesulitan pembayaran angsuran. Program ini sebaiknya tetap dilanjutkan hingga pemulihan berjalan maksimal.</p> <p>i. Terkait dengan Penyesuaian denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran, bagi perusahaan asuransi, OJK mendorong untuk</p>
--	--	--	--	---

				segera dilakukan proses penanganan klaim secara profesional, dan jika diperlukan, perusahaan dapat melakukan jemput bola untuk meringankan beban pemegang polis yang tertimpa musibah.
3.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	PENGAWASAN	4 S.D 6 OKTOBER 2018	<p>a. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memperlancar penerimaan negara dari sektor bea dan cukai di Provinsi Kepulauan Riau selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pemahaman masyarakat di perbatasan negara akan kewajiban pabean. - Adanya pelabuhan rakyat (pelabuhan tidak resmi) yang lokasinya relatif sulit dijangkau oleh pengawasan Bea dan Cukai. - Terbatasnya sumber daya manusia dan sarana pengawasan (contohnya kapal patroli beserta perlengkapannya) pada Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau yang wajib meng-cover wilayah laut yang luas dan daerah kepulauan: <p>b. Sejak berlakunya Permendag Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian yang mengatur tentang persyaratan ekspor timah batangan mempengaruhi kegiatan</p>

				<p>penambangan dan produksi timah batangan di wilayah Kepri yang menggunakan peralatan eks impor antara lain sparepart dan kapal hisap pasir timah menjadi menurun dan cenderung tidak ada</p> <p>c. Untuk penerimaan Bea Masuk dari komoditi lain, faktor yang menyebabkan turunnya penerimaan adalah adanya impor yang berasal dari negara-negara yang memberlakukan perdagangan bebas (Free Trade Area), sehingga tarif BM menjadi lebih kecil atau bahkan menjadi 04 dengan menggunakan tarif BM preferensial FTA.</p> <p>d. Pengawasan dan pembinaan terhadap Aparat Bea dan Cukai Provinsi Kepulauan Riau selama ini sehingga tidak terjadi kebocoran Penerimaan Negara yakni antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tindak Lanjut Kepuasan Pengguna Jasa - Melakukan monev dalam bentuk pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas terkait sop proses bisnis dan prosedur yang rawan terjadi penyalahgunaan wewenang - Asistensi Penanganan dugaan pelanggaran disiplin pegawai - penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi SIPUMA:
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Asistensi Analisis Beban Kerja - Memberikan reward dan punishment yaitu dengan memberikan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan memberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang melanggar ketentuan - Briefing rutin terkait pelaksanaan kegiatan operasional, dan telah dilakukan pengarahan-pengarahan dalam bentuk p2kp guna mengedukasi pegawai dalam menjalankan tugas. <p>e. Dari pengawasan dan pembinaan yang telah dilakukan, sebaiknya dilanjutkan dan ditingkatkan secara melekat, dengan demikian ke depan tidak terjadi kebocoran penerimaan negara, dan diperlukan komitmen dari seluruh pihak terkait untuk menjaga agar penerimaan negara dapat diterima secara maksimal untuk pembangunan Indonesia ke depan.</p>
4.	PROVINSI JAWA TIMUR	PENGAWASAN	25 .D 27 OKTOBER 2018	<p>a. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini dan perlu diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang yang baru guna mendukung terwujudnya suatu</p>

				<p>lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beberapa materi penting dalam perubahan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan ini, yaitu mengenai penentuan formasi dan rekrutmen Pelaksana BPK, penetapan struktur organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK, penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara/ penghitungan kerugian negara, dan pengaturan pengisian kekosongan Anggota BPK serta masa jabatan Pimpinan BPK.</p> <p>b. Terdapat masukan terhadap revisi UU tentang Badan Pemeriksa Keuangan yakni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 4A : Anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat kolektif kolegial <p>Catatan: Reference Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XI/2013, Apa yang dimaksud "keputusan" dalam hal ini. Apakah keputusan tersebut dikategorikan sebagai KTUN? (referensi Putusan Kasasi 466K/TUN/2017) Apa yang dimaksud dengan "setiap keputusan,</p>
--	--	--	--	---

				<p>apakah keputusan dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang atau termasuk dalam tata kelola kelembagaan. Bila dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang, jenis-jenis keputusan apa yang dihasilkan? Termasuk dalam hal pembentukan peraturan peraturan, apakah hal ini termasuk pula “kolektif-kolegial”.</p> <p>Batasan kolektif kolegial “hanya pengambilan keputusan” mempunyai hubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang. Apakah setiap pelaksanaan tugas dan wewenang membutuhkan keputusan, maka berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang, termasuk dalam pemberian mandate (Pasal 11A RUU BPK).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 11A: Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, BPK dapat memberi mandat kepada Anggota BPK dan/atau Pelaksana BPK. - Pasal 12: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 11A diatur dengan Peraturan BPK. - Tata cara pelimpahan wewenang (termasuk mandat) secara umum terdapat pada UU Administrasi Pemerintahan.
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan pemberian mandate tunduk pada ciri-ciri dari mandate. c) Referensi Putusan PTUN Jambi 20/G/2016/PTUN.JBI, Putusan PT TUN Medan 85/B/2017/PT.TUN.MDN dan Putusan Kasisi 446 K/TUN/2017. - Implikasi tata cara pengaturan supporting pada kelembagaan (pelaksana, auditor) dan tata naskah. - Pasal 13 : Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon Anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi dimaksud - karakter pengisian jabatan bagi lembaga yang independen adalah berbasis pada non partisan dan keahlian. Maka perubahan Pasal 15 dalam RUU telah mendorong kearah independen dan keahlian. b) Khusus mengenai ketentuan “paling singkat telah 2 (dua) tahun tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik”, seharusnya paling singkat tidak 2 tahun: 1) Hakikat pengisian jabatannya adalah proses politik. 2) Hubungan kelembagaan BPK dan DPR. - Pasal 14 Catatan: Jabatan dengan karakteristik independen dan expertise” harus dilakukan secara terbuka dan diseleksi oleh mereka yang
--	--	--	--	--

				<p>expertise juga. Sehingga pengguna (DPR) diasumsikan akan “puas” dengan hasil panitia seleksi atas basis expertise” dan pemenuhan syarat lainnya (pasal 13). (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu diatur sifat dari keputusan hasil panitia seleksi (misalnya harus menggunakan/mengikat atau final). - Selain unsur panitia seleksi, misalnya bidang keahlian. - Tetap perlu diatur tentang partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen anggota BPK (Lihat Pasal 14 ayat 3). - Pasal 14A”; DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam rangka pemilihan anggota BPK. - Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hasil seleksi dan penilaian calon Anggota BPK yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR. - Pasal 14B : BPK yang dibutuhkan, paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya hasil seleksi dan penilaian calon Anggota BPK yang disampaikan oleh Presiden. <p>Catatan: Masa jabatan anggota BPK 5 (lima) tahun. (referensi</p>
--	--	--	--	--

				<p>Putusan MK 13/PUU-XI/2013). Referensi pada beberapa lembaga negara lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi Pasal 22 dan Pasal 3 ayat (3). Maka Pembatasan perlu dilakukan terhadap masa jabatan ketua dibatasi tidak dalam satu masa jabatan anggota, alasan: basic expertise, kolektif-kolegial. Model evaluasi berpotensi menimbulkan konflik (siapa yang melakukan evaluasi, parameter, metode dan akibat hukum) Pasal 30</p> <p>(1) Untuk menegakkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik BPK yang keanggotaannya terdiri dari Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi.</p> <p>(la) Keanggotaan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari unsur-unsur profesi dan akademisi lebih banyak dari unsur Anggota BPK.</p> <p>(2) Majelis Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak undang-undang ini berlaku.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata cara persidangan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK diatur dengan Peraturan BPK.</p>
--	--	--	--	--

				<p>Catatan:</p> <p>a) Untuk keseimbangan pada pemeriksaan, sudah seharusnya ditegaskan anggota BPK tidak lebih banyak dari unsur lainnya.</p> <p>b) Bahkan bila dipandang auditor adalah prodesi maka unsur profesi dan unsur akademisi atau masyarakat saya yang diperlukan</p>
5.	PROVINSI JAWA TIMUR	PENGAWASAN	1 S.D 5 NOVEMBER 2018	<p>. KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI JAWA TIMUR</p> <p>1. Kendala yang mempengaruhi peningkatan penerimaan yakni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bea masuk/ bea keluar kepabeanan dan cukai sebagai faktor pengurang penerimaan Restitusi/pengembalian dari fasilitas dibidang Cukai - Pergeseran selera konsumen ke produk perusahaan lain diluar wilayah Jatim - Berkurangnya penyerapan produk MMEA di beberapa kota wisata yang terdampak bencana alam - Cukai HT: Meskipun terdapat penurunan persentase rokok ilegal pada tahun 2018 hingga menjadi 7,04Y6 namun pengetahuan masyarakat tentang rokok ilegal masih perlu

				<p>ditingkatkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat resistensi masyarakat terhadap penegakan ketentuan di bidang cukai di daerah rawan BKC illegal - berkembangnya modus pelanggaran dan jaringan dari tahun ke tahun. <p>Penyerapan Anggaran BEA CUKAI JATIM</p> <p>1. Kendala Belanja Pegawai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mutasi pegawai menyebabkan jumlah pegawai tidak pasti - Pegawai pensiun menyebabkan jumlah pegawai berkurang <p>2. Kendala Belanja Barang & Modal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan program efisiensi anggaran - Pemotongan anggaran - Pembatalan pemotongan anggaran <p>Terhadap permasalahan dimaksud, diperlukan komitmen bersama untuk menyelesaikan dan menjadikan prioritas penyelesaian.</p>
6.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	PENGAWASAN	7 S.D 9 DESEMBER 2018	<p>Bahwa Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagai bank sentral, Bank Indonesia melakukan kegiatan sosial yang diber nama Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Orientasi implementasi PSBI tahun 2018 lebih diarahkan pada upaya untuk memperkuat implementasi Program Peningkatan</p>

				<p>Kapasitas SDM dan Pemahaman Publik, tanpa mengesampingkan Program Kepedulian yang menyentuh aspek pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan, lingkungan, dan bantuan terkait bencana. Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi serta Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemahaman Publik dikategorikan dalam subtema, yaitu Ketahanan Pangan Strategis, Komoditas Unggulan, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Syariah, Indonesia cerdas Beasiswa, Pengelolaan Komunitas Penerima Beasiswa, dan Edukasi Publik. Subtema Ekonomi Syariah merupakan subtema baru pada 2018, sedangkan delapan subtema lainnya meneruskan subtema yang telah dicanangkan pada tahun sebelumnya.</p> <p>Terhadap program yang dijalankan, sebaiknya dilanjutkan agar dapat memenuhi target dengan pemantauan dan pengawasan sehingga dapat mengenai objek sasaran dari program dimaksud.</p>
--	--	--	--	--

MILESTONE 4

Sosialisasi Penggunaan Aplikasi *Cloud Share*
di Ruang Rapat Komisi XI
29 Juli 2019





**PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI
CLOUD SHARE UNTUK PENGIRIMAN
HASIL LAPORAN KUNJUNGAN KERJA**

**Bagian Komisi XI
Biro Persidangan I**

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2019**

CLOUD DPR RI

Berikut ini adalah panduan singkat menggunakan Aplikasi CLOUD SHARE untuk Pengiriman Hasil Laporan Kunjungan Kerja:

1. Dengan penjelajah internet (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, dsb.) buka alamat:

<https://cloud.dpr.go.id>

2. Masukkan username dan password email Bagian Komisi XI untuk Login Cloud.

Nama Pengguna: **semyati@dpr.go.id** → masukkan **semyati** saja
(@dpr.go.id tidak perlu dicantumkan)

Password: **emmyyati66**

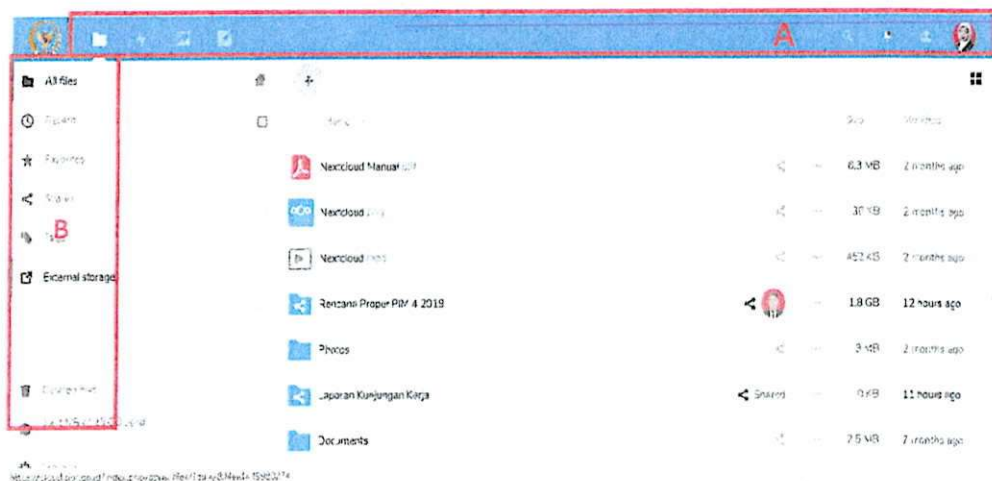
Setelah itu tekan tombol **LOG IN**.



PERHATIAN

- Nama pengguna (*username*) dapat dituliskan menggunakan huruf kecil, kapital dan atau kombinasi keduanya.
- *Password* adalah bersifat *case sensitif*, yakni kesesuaiannya sangat bergantung pada penggunaan huruf kapital atau huruf kecil sesuai *password* email Anda.

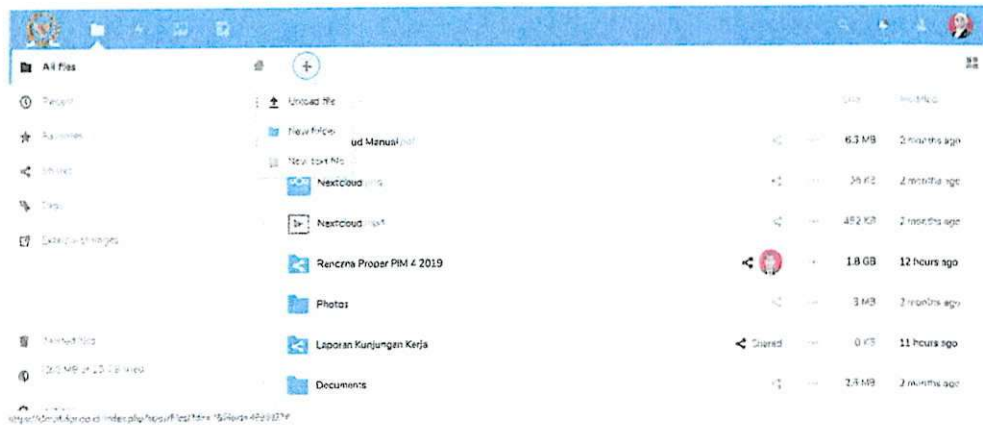
Setelah berhasil login kedalam Cloud Bagian Komisi XI DPR RI, Anda akan mendapat tampilan halaman utama sbb:



Keterangan:

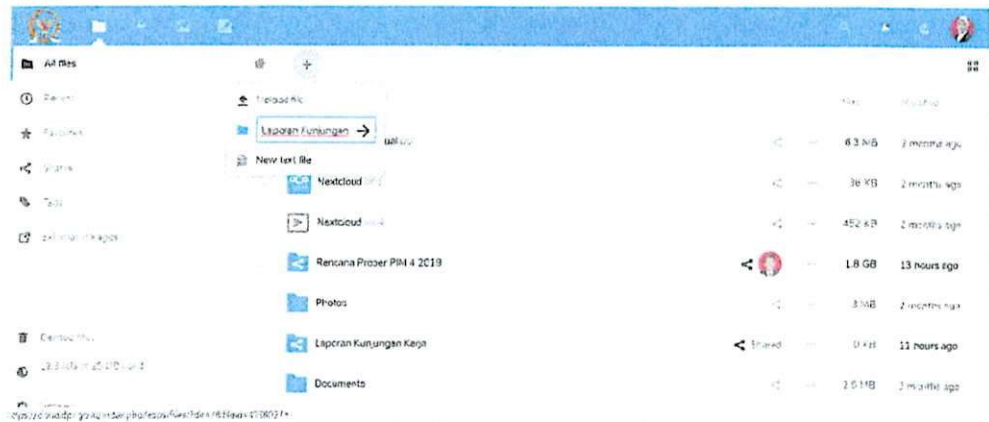
- A. Menu Apps :** menu ini berisi pilihan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan seperti files, activity, galery, notes, search, announcements dan contacts.
- B. Menu Utama:** menu ini berisi daftar menu utama seperti All Files, Recent, Favorites, Shares, Tags, External Storages, Deleted Files dan Settings.

3. Klik Icon (+), lalu pilih New Folder untuk membuat folder baru yang akan di share dengan Unit Pengusul.

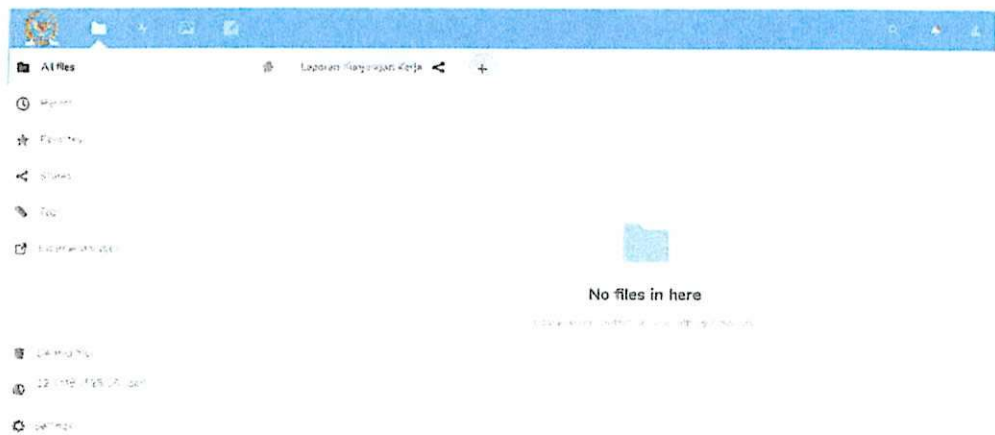


- Pastikan Anda telah melakukan LOG OUT ketika akan menutup aplikasi Portal, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- Lakukan perubahan password secara berkala, dan TIDAK disarankan menempel kertas berisi *Username / Password* Anda di depan monitor/komputer Anda dengan tujuan mudah diingat.

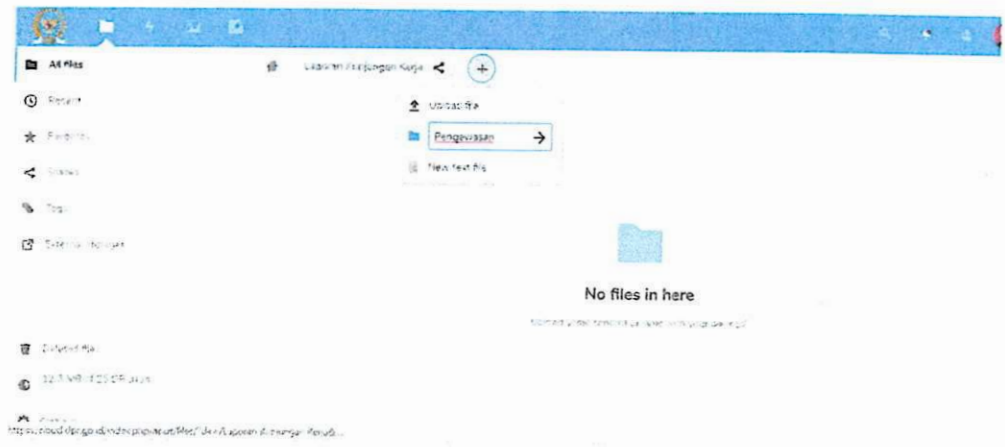
4. Beri Nama Folder dengan Format “Laporan Kunjungan Kerja”.



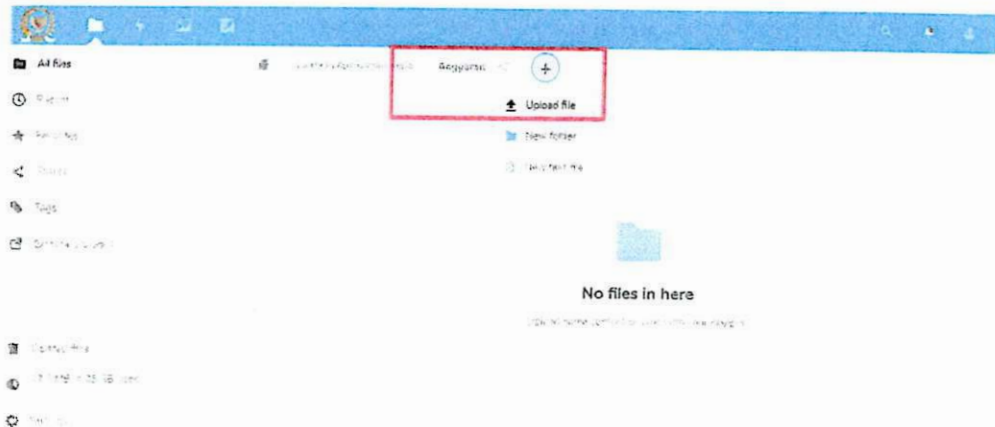
5. Buka Folder yang telah diberi nama

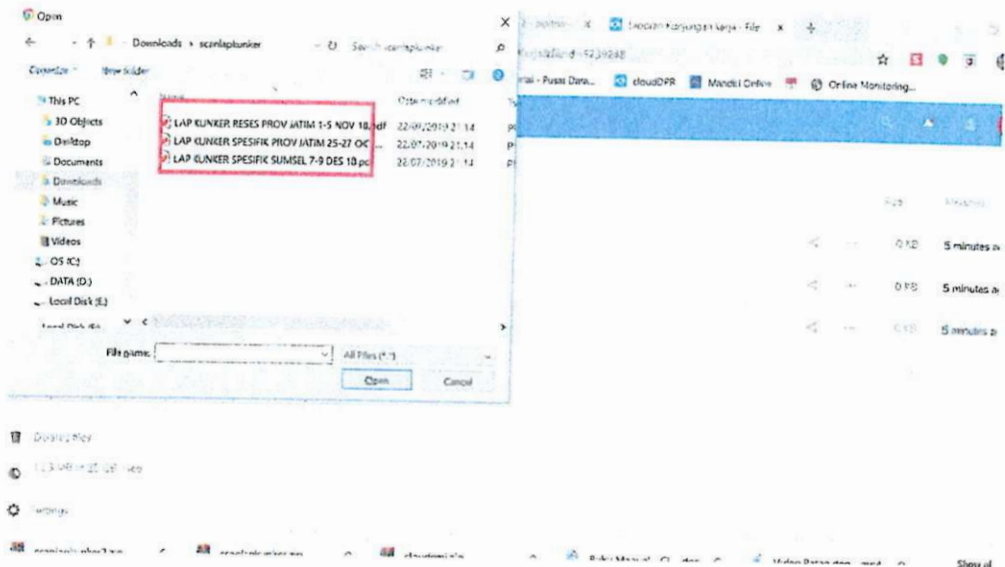


6. Tambahkan folder baru untuk membagi Laporan Kunjungan Kerja berdasarkan fungsi, yaitu Legislasi, Anggaran, Pengawasan

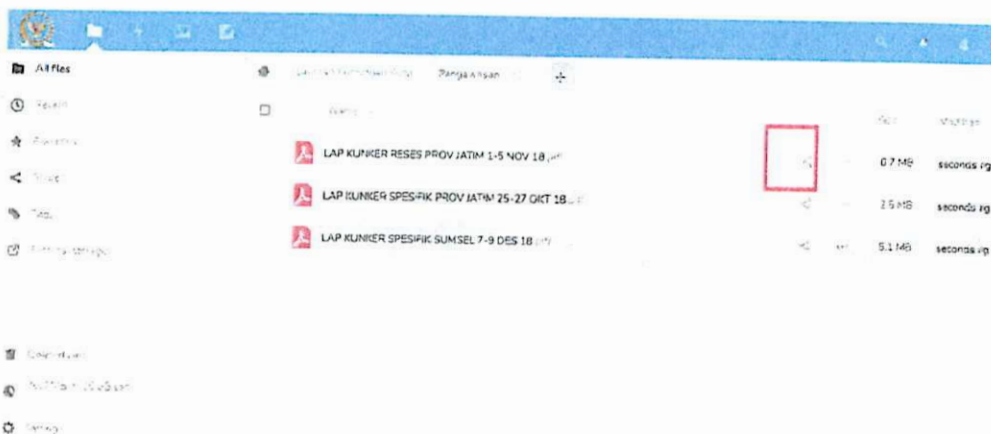


7. Upload Laporan Kunjungan Kerja di Folder yang telah dibuat di point no 6.





8. Berikut adalah tampilan Cloud setelah berkas diupload ke folder, lalu pilih icon share.



MILESTONE 5

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN JANGKA PENDEK

1. KESIMPULAN

Setelah dilakukan implementasi jangka pendek, didapat beberapa perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi XI DPR RI, antara lain:

- a. Laporan Kunjungan Kerja Masa Sidang I-II Tahun Sidang 2018-2019 telah terkompilasi dengan baik dan teridentifikasi sesuai dengan fungsi DPR RI yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.
- b. Laporan Kunjungan yang telah teridentifikasi dapat menjadi bagian bahan rapat dalam setiap pelaksanaan rapat di DPR RI sesuai dengan fungsi DPR RI, sehingga dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan dalam rapat.

2. REKOMENDASI

- a. Hasil Identifikasi Laporan Kunjungan kerja yang telah terkompilasi dengan baik, agar dapat juga dapat disampaikan kepada Mitra Kerja Komisi XI DPR RI secara berkala
- b. Penyampaian laporan kompilasi kepada mitra kerja, dapat mengembangkan aplikasi cloudshare untuk pengembangan jaringan di masa mendatang.

Mengetahui
Mentor/Atasan Langsung,

Jakarta, Juli 2019
Yang menyatakan,

Drs. Urip Soedjarwono
NIP. 196205211982031001

Semiyati, SE
NIP. 196611281988032002

**LAMPIRAN
DUKUNGAN
STAKEHOLDER**

STAKEHOLDER DENGAN BAPAK Ir. SOEPRIYATNO/ A-365
PIMPINAN KOMISI XI DPR RI
ANGGOTA FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA



**STAKEHOLDER DENGAN KEPALA BIRO PERSIDANGAN I
SETJEN DAN BK DPR RI**



**STAKEHOLDER DENGAN Ir. H. A. HAFISZ TOHIR/A-465
PIMPINAN KOMISI XI DPR RI
ANGGOTA FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ir. H. Soepriyatno**
Jabatan : Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Semiyati.SE** Jabatan Kepala Sub Rapat Komisi XI Sekretaris Jenderal DPR RI Untuk Mendukung Proyek Perubahan dengan Judul Optimalisasi Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI melalui Cloud File Sharing.

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019
Yang Membuat Pernyataan



Ir. H. SOEPRIYATNO

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

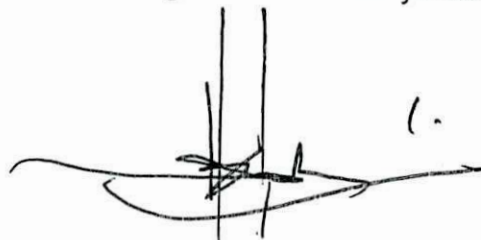
Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ir. H. Achmad Hafisz Tohir**
Jabatan : Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Semiyati.SE** Jabatan Kepala Sub Rapat Komisi XI Sekretaris Jenderal DPR RI Untuk Mendukung Proyek Perubahan dengan Judul Optimalisasi Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI melalui Cloud File Sharing.

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019
Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over a vertical line.

Ir. H. Achmad Hafisz Tohir

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Dimyati Sudja, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Persidangan I
Unit Kerja : BIRO PERSIDANGAN I
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Semiyati, SE** Jabatan Kepala Sub Rapat Komisi XI DPR RI dengan judul Optimalisasi Tindak Lanjut Laporan Kunjungan Kerja melalui Cloud File Sharing. Untuk Mendukung Penetapan Program Prioritas Tahunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dengan menggunakan Teknologi Informasi.

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019
Yang Membuat Pernyataan

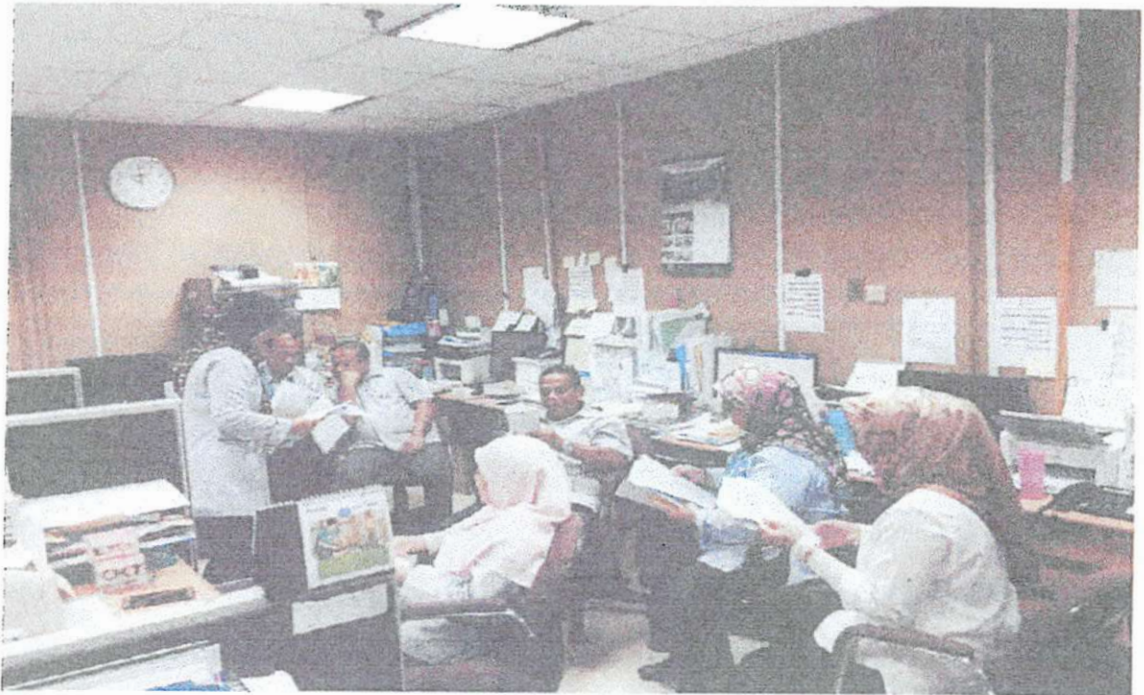


M. Dimyati Sudja, S.Sos., M.Si.
NIP. 195909101980031005

**LAMPIRAN
LAIN-LAIN**

LAMPIRAN FOTO

Rapat awal Tim efektif yang dilakukan tanggal 16 Mei 2019 untuk berkoordinasi tentang tahapan aktualisasi implementasi milestone jangka pendek proyek perubahan



Kegiatan Konsultasi dengan Mentor terkait rencana lanjutan implementasi proyek perubahan.



Kegiatan *Scanning* Laporan Kunjungan Kerja Masa Sidang I – II Tahun
Sidang 2018-2019



Gambar . Kondisi Penyimpanan Laporan Kunjungan Kerja Masa Sidang I – II Tahun Sidang 2018-2019 sebelum dan sesudah dilakukan penataan.

SEBELUM PENATAAN



SESUDAH PENATAAN




Kegiatan Analisa terhadap Laporan Kunjungan Kerja berdasarkan fungsi Dewan yang belum ditindaklanjuti Masa Sidang I-II TS 2018-2019.



LAMPIRAN


Lampiran 1. Formulir Persetujuan oleh Coach

FORMULIR PERSETUJUAN COACH PADA TAHAP MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA

1. Nama Peserta	: SEMIYATI
2. Unit Kerja	: Bagian Sekretariat Komisi XI
3. Gagasan Perubahan	:1. Rekapitulasi pencatatan jadwal rapat melalui komputerisasi. ②. Penataan Dokumen Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Negeri Komisi XI DPR RI melalui Scanning dengan menggunakan Mesin Scanner.
Catatan terhadap Gagasan Perubahan yang disiapkan peserta	
<p>Meningkatkan / optimalisasi distribusi data</p> <p>.....dst</p>	
Rekomendasi	
<p>.....dst</p>	
Jakarta,	
<p>COACH,</p> <p></p> <p>(Agus Supriyono, S.S., M.A.P)</p>	

Lampiran 2. Formulir Persetujuan oleh Mentor


**FORMULIR PERSETUJUAN MENTOR
PADA TAHAP MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA**

1. Nama Peserta	: Semiyati, SE
2. Unit Kerja	: Bagian Sekretariat Komisi XI
3. Gagasan Perubahan	: 1. Pendokumentasian Laporan Kunjungan Kerja Dalam Negeri melalui scanning
Catatan terhadap Gagasan Perubahan yang disiapkan peserta	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....dst</p>	
Rekomendasi	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....dst</p>	
<p style="text-align: right;">Jakarta, Mei 2019</p> <p style="text-align: right;">MENTOR,</p> <p style="text-align: right;">  (Drs. Urip Soedjarwono) </p>	

LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Persetujuan oleh Coach

FORMULIR PERSETUJUAN COACH PADA TAHAP MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA

1. Nama Peserta	: Semiyati, SE
2. Unit Kerja	: Bagian Sekretariat Komisi XI
3. Gagasan Perubahan	: 1. Optimalisasi Penataan Laporan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI
Catatan terhadap Gagasan Perubahan yang disiapkan peserta	
<p>Gagasan dapat meningkatkan kinerja Organisasi melalui Cloud-Spr.go.id</p> <p>.....dst</p>	
Rekomendasi	
<p>.....dst</p>	
Jakarta, 10 Mei 2019	
COACH,	
	
(Agus Supriyono, S.S., M.A.P.)	

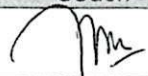
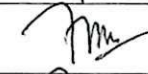
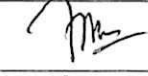

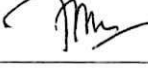
Lampiran 3. Kartu Kendali Pembimbingan Bagi Peserta, Coach dan Mentor

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

PESERTA

**KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN ANTARA PESERTA DENGAN COACH
DIKLATPIM TK. IV ANGKATAN II TAHUN 2019**

Nama : Semiyati Nama Coach : Agus Supriyono, S.S., M.A.P
Instansi : Setjen dan Badan Keahlian DPR RI
NIP. : 196611281988032002

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach*
1	17 Mei 2019	latar belakang	langsung	penyusunan Utr. Bkz.	
2	8 Juli 2019	milestone	langsung	sebaiknya yg langsung	
3	10 Juli 2019	milestone	langsung	sebaiknya yg langsung	
4	22 Juli 2019	tahapan milestone	langsung	sebaiknya yg langsung	
5	23 Juli 2019	milestone	langsung	langsung ditambah	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12	Dst..				






(*) Pembimbingan yang sah adalah pembimbingan yang ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

Rusmanto, SH., MH

**KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN ANTARA COACH DENGAN PESERTA
DIKLATPIM TK. IV ANGKATAN II TAHUN 2019**

Nama : Semiyati Nama Coach : Agus Supriyono, S.S., M.A.P
Instansi : Setjen dan Badan Keahlian DPR RI
NIP. : 196611281988032002

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Peserta
1	22 Mei 2019	latar belakang	Langsung	penyusunan latar belakang	
2	27 Mei 2019	milestone	Langsung	servikal & koordin	
3	10 Juli 2019	Tahapan milestone	WA	sesuai jadwal	
4	22 Juli 2019	Tahapan milestone	Langsung	lengkap output	
5	23 Juli 2019	Milestone	Langsung	lengkap output	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	Dst..				

(*) Pembimbingan yang sah adalah pembimbingan yang ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

Rusmanto, SH., MH



PROYEK PERUBAHAN

OPTIMALISASI TINDAKLANJUT LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI MELALUI CLOUD FILE SHARING

OLEH :

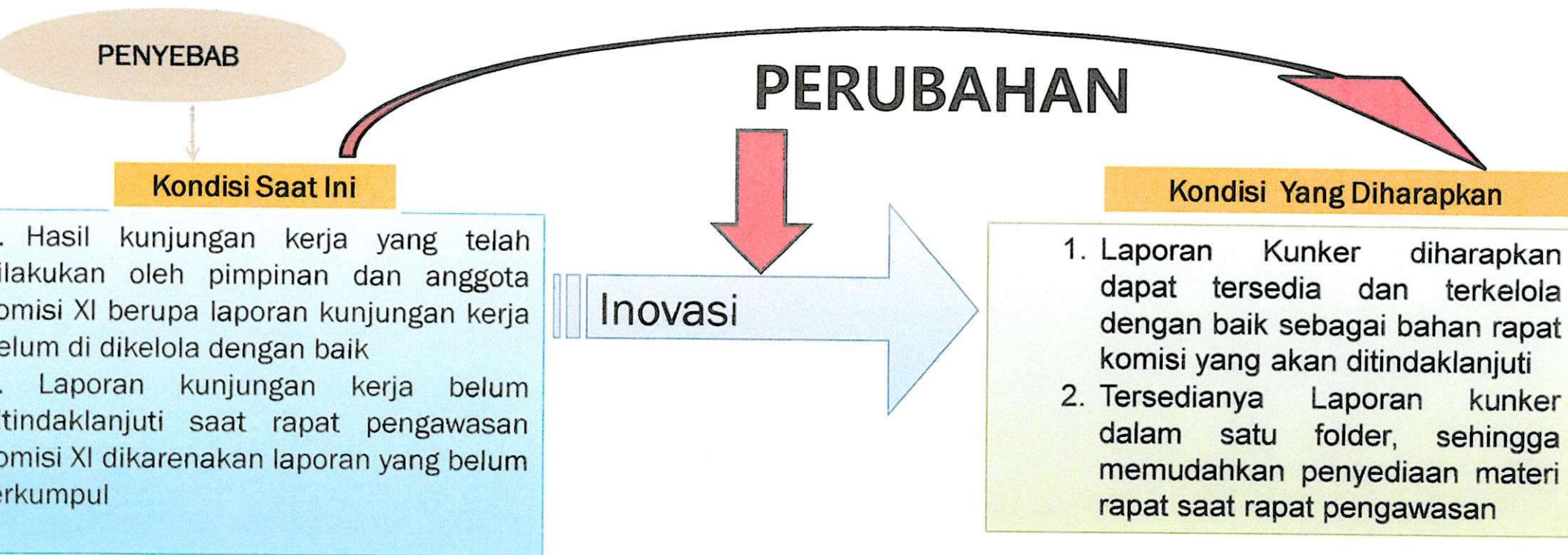
NAMA : SEMIYATI. SE

NIP : 196611281988032002

PROGRAM DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2019

LATAR BELAKANG



Jika tidak dilakukan Perubahan

Tidak tertibnya laporan kunjungan kerja

ORGANISASI

Pencarian data menjadi lebih efektif dan efisien khususnya laporan kunjungan kerja untuk selanjutnya menjadi masukan bagi laporan Kinerja Komisi XI DPR RI dan Laporan Kinerja DPR RI

PESERTA

Meningkatkan kinerja Subbagian rapat terutama dalam mendukung kinerja dewan dalam kegiatan kunjungan kerja

STAKEHOLDER

1. Meningkatkan kinerja Bagian Sekretariat Komisi XI dengan lebih efektif dan efisien
2. Kemudahan dalam mencari data terkait pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja

MANFAAT



CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

KEGIATAN I 16 Mei 2019

TERBENTUKNYA TIM EFEKTIF :

- Persiapan pertemuan
- Membuat undangan rapat
- Pendistribusian undangan
- Rapat pembentukan tim
- Pembuatan dan penandatanganan Surat Tugas Tim efektif.

OUTPUT:

- ✓ Undangan
- ✓ Daftar Hadir
- ✓ Laporan Singkat
- ✓ Surat Tugas tim



KEGIATAN II 20 s.d 21 Mei 2019

Identifikasi Laporan Kunjungan Kerja sesuai fungsi Dewan Masa Sidang I - II TS 2018-2019 :

- Pengumpulan laporan Kunjungan Kerja MS I - II TS 2018-2019
- Identifikasi Laporan Kunjungan Kerja berdasarkan fungsi Anggaran, Pengawasan dan Legislasi

OUTPUT:

- ✓ Laporan Kunjungan Kerja,
- ✓ Klasifikasi Laporan Kunjungan Kerja

KEGIATAN III 8 s.d. 9 Juli 2019

Analisa Laporan Kunjungan Kerja berdasarkan fungsi Dewan yang belum ditindaklanjuti Masa Sidang I - II TS 2019.

- Analisa Laporan Kunjungan Kerja yang belum ditindaklanjuti.
- Penyampaian hasil Analisa Laporan Kunjungan Kerja kepada Pimpinan Komisi untuk dijadikan bahan rapat dan untuk ditindaklanjuti

OUTPUT:

- ✓ Analisa Laporan Kunjungan Kerja yang belum ditindak lanjuti





www.artie.com www.artie.com www.artie.com www.artie.com



CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

KEGIATAN IV 10 Juli 2019

Penggunaan Aplikasi *Cloud Share*

- Membahas Panduan penggunaan aplikasi cloud share
- Pembuatan Folder sesuai Fungsi DPR RI
- Sosialisasi Penggunaan aplikasi *Cloud share* internal

OUTPUT:

- ✓ Panduan penggunaan aplikasi *cloud share*
- ✓ *Screenshot* rekapitulasi melalui aplikasi cloud
- ✓ Laporan Kunker

KEGIATAN V 11 S.D 12 Juli 2019

Penyusunan Laporan :

- Penyusunan Laporan Proyek Perubahan
- Penyusunan hasil evaluasi kegiatan jangka pendek

OUTPUT:

- ✓ Laporan Proyek Perubahan
- ✓ Laporan Evaluasi

SCREENSHOT PENYAMPAIAN HASIL LAPORAN KUNJUNGAN KERJA

Left Sidebar:

- All files
- Recent
- Favorites
- Shares
- Tags
- External storages
- Deleted files
- 38.5 MB of 25 GB used

Main File List:

Name	Size	Modified
LAP KUNKER RESES PROV JATL... pdf	6.7 MB	2 days ago
LAP KUNKER SPESIFIK PROV 4... pdf	5.7 MB	7 minutes ago
LAP KUNKER SPESIFIK PROV JA... pdf	2.5 MB	2 days ago
LAP KUNKER SPESIFIK PROV N... pdf	3.4 MB	8 minutes ago
LAP KUNKER SPESIFIK PROV S... pdf	2.8 MB	7 minutes ago
LAP KUNKER SPESIFIK SUMSEL... pdf	5.1 MB	2 days ago

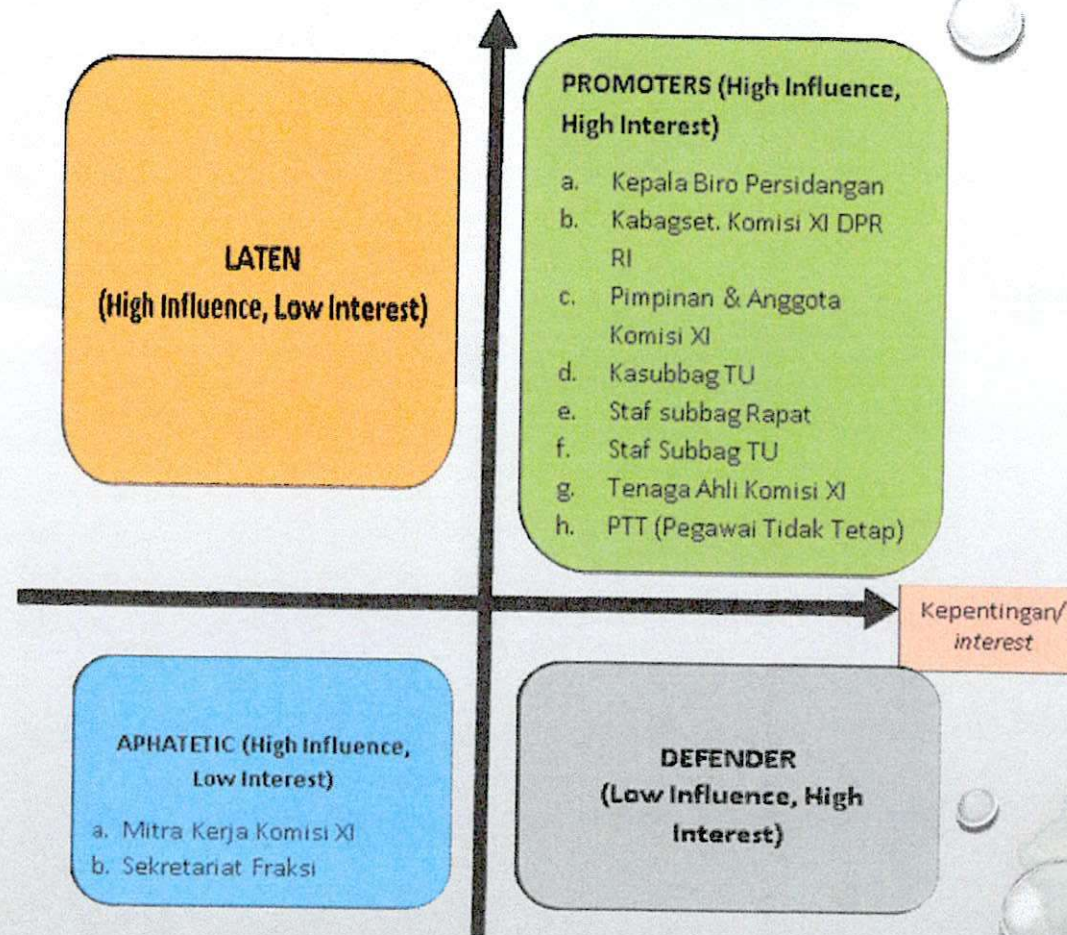
Right Pane (File Details for 'LAP KUNKER SPESIFIK SUMSEL 7-9 D...'):

- Size: 5.1 MB, 2 days ago
- Activity, Comments, **Sharing**, Versions
- Name, federated cloud ID or email address...
- Share link
- Ok Ganjar Ristawan (Can edit)

SEBELUM PROYEK PERUBAHAN



SETELAH PROYEK PERUBAHAN



KENDALA/MASALAH DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA/MASALAH

POTENSI KENDALA/MASALAH

- Kurangnya Kerja sama Tim Efektif karena ada tugas pokoknya yg harus dikerjakan.
- Keterbatasan jumlah SDM bagian SubRapat

RESIKO

- Proyek perubahan tidak akan berjalan sesuai yang telah direncanakan
- Proyek perubahan berjalan lambat

STRATEGI MENGATASI KENDALA/MASALAH

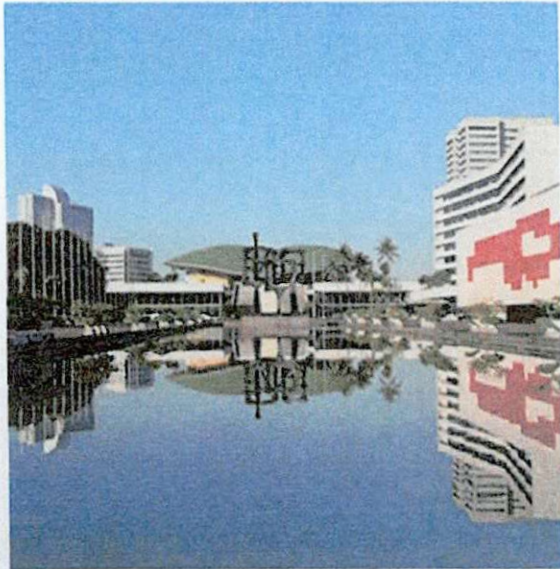
- Kerjasama tim dengan membangun komunikasi yang efektif sehingga tujuan tercapai.
- Meminta bantuan dari bagian SubTU



FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN:

1. Terbangunnya tim efektif yang terpadu dalam melaksanakan pekerjaan sesuai perencanaan;
2. Adanya dukungan dan komitmen dari Pembina, Mentor, Coach, Tim Efektif dan stakeholder untuk melaksanakan proyek perubahan;
3. Adanya komitmen dan disiplin Tim Efektif dalam menjalani semua tahapan yang direncanakan;
4. Adanya server dan aplikasi cloud.dpr.go.id

KESIMPULAN



Proyek perubahan yang telah dilakukan dari kegiatan optimalisasi tindaklanjut laporan kunjungan kerja Komisi XI melalui aplikasi cloud file sharing, dan telah membawa perubahan, yang dapat disimpulkan :

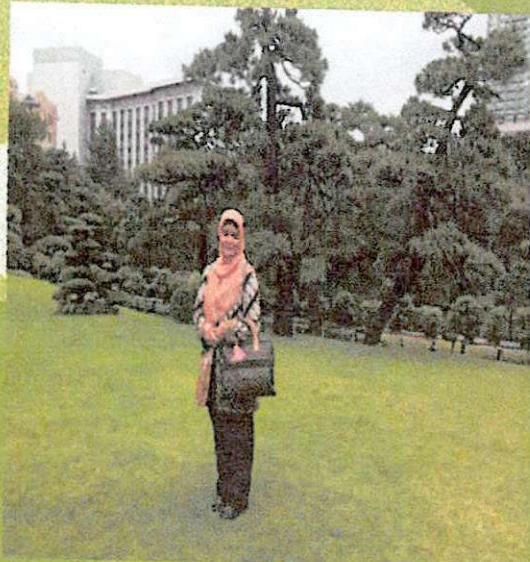
1. Laporan Kunjungan Kerja Masa Sidang I - II Tahun Sidang 2018-2019 telah terkompilasi dengan baik dan teridentifikasi sesuai dengan fungsi DPR RI yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.
2. Laporan Kunjungan yang telah teridentifikasi dapat menjadi bagian bahan rapat dalam setiap pelaksanaan rapat di DPR RI sesuai dengan fungsi DPR RI, sehingga dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan dalam rapat.

REKOMENDASI

- a. Hasil Identifikasi Laporan Kunjungan kerja yang telah terkompilasi dengan baik, agar dapat juga dapat disampaikan kepada Mitra Kerja Komisi XI DPR RI secara berkala.
- b. Penyampaian laporan kompilasi kepada mitra kerja, dapat mengembangkan aplikasi cloudshare untuk pengembangan jaringan di masa mendatang.

DUKUNGAN STAKEHOLDER





SALAM HORMAT
&
TERIMAKASIH

